

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARTWISATA

KONFERENSI NASIONAL SEJARAH VIII

ABSTRAK

TEDIAN QUANG DAN WAKTU: TANTANGAN SEJARAH

HOTEL MILLENNIUM,
JAKARTA, 13 - 16 NOPEMBER 2006

ektorat ayaan

906 KON

KATA PENGANTAR

Konferensi Sejarah Nasional VIII tahun 2006 merupakan salah satu diantara beberapa kegiatan Direktorat Nilai Sejarah, Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang diadakan setia lima tahun sekali. Pada Konferensi tahun 2006 ini tampil sebanyak 102 pemakalah yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia, Organisasi Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), dan instansi terkait lainnya.

Buku ini merupakan kumpulan abstrak dari seluruh makalah yang akan dipresentasikan dalam Konferensi Sejarah Nasional VIII. Adapun tujuan diterbitkannya Buku Kumpulan Abstrak iniuntuk memberikan gambaran singkat tema-tema makalah yang dibahas, yang disusun berdasarkan abjad nama pemakalah. Semoga buku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta konferensi.

Jakarta,

November 2006

Panitia

DAFTAR ISI

- 1. A.A. Bagus Wirawan, Dinamika Kebudayaan di Kota Gianyar
- 2. A.Adaby Darban, Pengaruh Akar Budaya Politik pada Dinamika Politik Ekonomi di Indonesia (1900-1990-an): Dalam Perspektif Sejarah
- 3. Abdul Syukur, Sejarah Lisan 'Orang Biasa' : Sebuah Pengalaman Penelitian
- 4. Achmad Maulana, Drs, Kabupaten Berau dengan Ragam Budayanya
- 5. Agung Pardini, S.Pd, Majalah Islam Sabili: Media Revivalis
- 6. Agus Mulyana, Dr. M.Hum, Kuli dan Anemer Keterlibatan Orang Cina dalam
- 7. Aminuddin Kasdi Prof. Dr., Pendidikan Sejarah & Nation and character building
- 8. Amurwani Dwi Lestariningsih, Jago dan Jagoan:
- Anhar Gonggong Dr. Masyarakat warisan v.s masyarakat merdeka tercitacitakan: Hambatan-hambatan Psiko-historis mewujudkan tujuan mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- 10. Anwar Thosibo, Dr. M.Hum, Membaca Dan Merekonstruksi Sejarah Toraja Melalui Bidang Seni Rupa Grafis
- 11. Agus Setyanto, Bung Karno dan Inggit di tengah para pemain sandiwaranya
- 12. Ali Hadara, Dinamika Sejarah Pelayaran Orang Buton Kepulauan Tukang Besi
- 13. Asep Suryana, Dari Ommelannden Batavia ke Pinggiran Jakarta
- 14. Baha'uddin, SS. M.Hum, Politik Etis dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa
- 15. Bambang Sulistyo Dr, Dari Dekolonisasi Ke Neo Kolonialisme; Kebijakan Ketenagakerjaan Migas Negara Sejak Masa Kolonial Hingga Reformasi.
- 16. Bambang Samsu B, M.Si, Karakterist1k Etnik Dan Hubungan Antar Etnik: Kasus Di Kabupaten Sumenep Madura
- 17. Budi Agustono: Pusat Daerah Dalam Perbenturan Politik dan Ekonomi (Konflik Etnik
- 18. Cosmas Batubara, Drs (Abstrak belum masuk)

- 19. Chusnul Hayati: Gender dan Perubahan Ekonomi: Peranan Perempuan dalam dan Ekonomi Sentralisme dan Perlawanan Daerah (1945-dan Formasi Identitas Orang Pakpak, Dairi, Sumatera Utara dari Kota Keraton sampai Kota Seni, 1771 1980- an di Antara Hasrat Positivis dan Kritikan Relativisdi Laut Sawu Abad XVII-XIX di Tahun 1950-an)
- 20. Didik Pradjoko, M.Hum, Perebutan Pulau Dan Laut: Perebutan Hegemoni Politik Dan Ekonomi Antara Kekuatan Portugis, Belanda
- 21. Dan Kekuasaan Pribumi Di Laut Sawu Abad XVII-XIX
- 22. Djoko Marihandono Strategi Pertahanan Napoleon Bonaparte Di Jawa (1810 1811)
- 23. Djoko Suryo Menjadi Kota Dan Kebudayaan Indonesia Baru
- 24. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Prof. Dr. Peranan Ingatan di dalam Pengenalan
- 25. Dwi Ratna Nurhajarini, M. Hum, Kain Kebaya dan Rok: Perempuan di Yogyakarta Pada Awal Abad XX
- 26. Edi Sedyawati, Prof. Dr. Kesenian Sebagai Pantulan Perubahan Sosial Ekonomi antara Kekuatan Portugis, Belanda dan Kekuasaan Pribumi
- 27. Fadlillah. Drs. M.Si., Sejarah, Sastra, Dan Imajinasi Sebuah Dekonstruksi
- 28. Edy Burhan Arifin SU, Pertumbuhan Kota Jember Dan Munculnya Budaya Pandhalungan
- 29. Gayung Kusuma SS, Privacy ke Vulgar Perilaku Sek s di Jawa Awal Abad ke- 20 Gerakan Tarbiyah (1989 1993)
- 30. Gusti Asnan Prof. Dr, Tradisional dan Ritual Sungai Masyarakat Koto Panjang Sejarah Sosial Sebuah Negeri Yang Ditenggelamkan di Derbatasan Sumatera Barat Riau
- 31. Hari Untoro Dradjat, Peninggalan Sejarah dan Kesadaran Sejarah
- 32. Harto Juwono, Gorontalo Abad XVII: Daerah Konflik Yang Terlupakan
- 33. Hary Efendi Iskandar, Dari Pemilu "Badunsanak" Hingga "Basiarak": Studi Tentang Radikalisasi Politik dalam Pilkada Padang Pariaman Sumatera Barat 2005
- 34. Himawan Sutanto, M. Hum, Menghadapi Pembrontakan di Madiun bulan pada September 1948

- 35. Husaini Ibrahim, MA Peninggalan Sejarah Dan Kesadaran Sejarah Di Aceh: Suatu Tantangan Masa Depan
- 36. Ietje Martina. Dr. D.M.Si, Kedudukan Wanita Menak Dalam Strukiur Masyarakat Sunda
- 37.1 Gde Parimartha, Persepsi Kultural Dan Keputusan Politik Abad XIX
- 38.l Ketut Ardhana, Masalah Perbatasan Di Asia Tenggara Dalam Perspektif Sejarah Pengalaman Indonesia Di Kalimantan Timur
- 39. Indera M.Hum, Diversifikasi Usaha Deli Spoorweg Maatschappij: Studi Sejarah Perusahaan Di Sumatera Timur (1883-1940)
- 40.1 Nyoman Sukiada, Politik Gender Orde Baru Dan Keterpinggiran
- 41. Idrus A. Rore, S. Pd, Metode Poker Suatu Alternatif Pengembangan Daya Tarik Mata Pelajaran Sejarah
- 42. Ilham, Agama, Kemajuan Sosial Dan Penggunaan Ruang: Kota Manado, 1919 -1972 Implikasi Dalam Sistim Desa Di Bali Individualisasi Dalam Pertanian Buah Di Wilayah Jagakarsa 1930-1966 industri Batik Di Yogyakarta 1900 -1965
- 43. Joko Sayono, Drs M.Pd. M.Hum, Historiografi Pesantren : Perspektif Metodologis Antara Ada Dan Tiada
- 44. Jumhari, Kawasan Perbatasan Sebagai Labolatorium Legal Pluralism Kasus : Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat
- 45. K. Soepardjo Roestam, Pengalaman Dan Peristiwa Dalam Ingatan Keluarga Sebagai Lembaga Pembinaan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 46.La Ode Rabani, Politik Dan Kelangsungan Ekonomi Kota Bau-Bau 1945 1960an
- 47. Lamijo, Prostitusi DI Jakarta Dalam Tiga Kekuasaan, 1930 1959 Sejarah Dan Perkembangannya
- 48. Langgeng Sulistyowati, Ketika Negara Berhutang Kepada Rakyatnya: Pinjaman Nasional 1946
- 49. Lucia Yuningsih, Migrasi Tahun 1870-1942: Kajian Migrasi Wanita Ribumi Antar Wilayah Di Dalam Pulau Jawa.
- 50.M. Alie Humaedi, Gaboengan Romusha Ngamoek (Garong) Di Kaki Pegunungan Dieng Banjarnegara, Tahun 1942 — 1957

- 51.M. Nur, M.S. Dr., Peradaban Laut Dan Permasalahan Toponimi Pulau-Pulau Di Sekitar Sumatera Menghadapi Pemberontakan Pki Di Madiun Pada Bulan September 1948
- 52. Mestika Zed Prof. Dr, Pusat, Daerah Dan Perbenturan Politik, Militer
- 53. Muhammad Said D Kota Kendari Dan Dinamika Kebudayaan : Suatu Kajian Perspektif Sejarah
- 54. Mursini Zahiban, Migrasi Orang Sasak Sebagai Tenaga Kerja Luar Negeri Dan Proses Globalisasi Dalam Kehidupan Orang Sasak Di Pulau Lombok Ntb
- 55. Muhammad Wasith Albar H.M. Ashadie: Pengusaha Pribumi Rokok Kretek Kudus, 1894 1952
- 56. Mudji Sutrisno, TAFSIR SEJARAH HURUF KECIL VS BESAR
- 57. Munanjar Widiyatmika, Laut Timor Dan Sungai Benanain Dalam Perspektif Perkernbangan Sosial Politik Di Timor Barat Pada Abad Ke 17
- 58. Mutiah Amini, S.S., M.Hum., Menelusuri Jejak Sang Putri: Dinamika Pemilihan "Putri" Indonesia Pada Masa Orde Baru
- 59. Nasrul Hamdani, Menulis Sejarah Kelompok Minoritas: Untuk Siapa? "Cina Medan' Dalam Kajian 1930-1960
- 60. Nina Herlina M. S Prof. Dr, Reinterpretasi Kasus Lebak
- 61. Ninie Susanti, Rutinisasi Karisma: Kajian Atas Data Prasasti-Prasasti Di Asia Tenggara Pada Abad XI-XIV Masehi
- 62. Nur Hadi, M.Pd, M.Si Gerakan "Kawi Pact" Dan "Hilangnya" Tan Malaka
- 63. Nuryahman, SS, Perdagangan Budak Di Nusa Tenggara Sampai Abad Ke-19 Pada Awal Abad XX
- 64. Pattikaihatu J.A, Pendidikan Dan Pengajarah Sejarah Dalam Tantangan Hari Esok
- 65. Pembangunan Jalan Kereta Api Di Priangan (1878 1924) Perempuan Bali Dalam Kancah Politik Peristiwa-Peristiwa Sejarah Permukiman Rakyat Semarang Tahun 1930-1960
- 66. Qasim Ahmad, M Prof. Dato' Dr. Penafsiran Dalam Pensejarahan Barat
- 67. Ratna, Perubahan Sosial Dan Kesenian Di Medan

- 68. R.Z. Leirissa, Bfo (Musyawarah Negara-Negara Federal): Saat Yang Mfnentukan Dalam Pfrjuangan Kfmerdekaan Indonesia
- 69. Radjimo Sastro Wijono, K4mpung Di Bawah Naungan Tiga Penguasa:Ratna Perubahan Sosial Dan Kesenian Di Medan
- 70. Restu Gunawan, Banjir Di Batavia 1913 1940: Dinamika Pembangunan Kota Di Dataran Rendah
- 71. Riwanto Tirtosudarmo Ketidakadilan Global, Keamanan Bersama Dan Buruh Migran Indonesia
- 72. Rusli, M. Hum, Gerakan Aspirasi Merdeka: Studi Kasus Gerakan Kemerdekaan Di Papua Pada Awal Reformasi
- 73. S.HAMID HASAN Prof. Dr. Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis (1950 2005)
- 74. Saleh A. Djamhari, Politik Militer Pasca Perang Kemerdekaan 1950-1952
- 75. Sarkawi B. Husain, Mereka Tidak Bisu: Makna Dan Perebutan Simbol Monumen, Patung, Dan Tugu Di Kota Surabaya
- 76. Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen Tni (Purn) Bergerilya Dengan Batalyon Nasuhi
- 77. Slamet Subekti, Bagaimana Menyikapi Over Produksi Historiografi Alam Era Postmodern: Pembelajaran Dari Perspektif F.R. Ankersmit Untuk Proyeksi Diri Ke-Indonesiaan
- 78. Slamet Sujud P.J. Rekaman Sejarah Dalam Legenda Reyog Ponorogo Studi Kriminalitas Di Jakarta 1945-1950-An
- 79. Soedarmono, SU, Dinamika Saudagar Kaum Perempuan Jawa Di Laweyan
- 80. Srisuyanti, M.Hum, Jalan Panjang Menuju Perdamaian Di Aceh (4-12-1976 15-8-2005)
- 81. Syafei Anwar (Abstrak belum Masuk)
- 82. Sudarno, MA Kerja Magang: Dari Jurutulis Sampai Bupati Pada Zaman Kolonial Belanda
- 83. Sudibyo, Menjinakkan Kuli: Praktik Dehumanisasi Terhadap Para Kuli Di Deli Berdasarkan Novel Kuli Dan Berpacu Nasib Di Kebun Karet Karya M.H. Szek Ely-Lulof S

- 84. Sukendra Martha, Menjinakkan Kuli: Praktik Dehumanisasi Terhadap Para Kuli Di Deli Berdasarkan Novel Kuli Dan Berpacu Nasib Di Kebun Karet Karya M.H. Szek
- 85. Ely-Lulof S Laut, Sungai Dan Perkembangan Peradaban: Bencana Alam Dan Kesiapsiagaan Manusia
- 86. Sulistyowati, Irianto Gender Dan Dinamika Sejarah
- 87. Suprayitno , Wanita Dan Revolusi Kemerdekaan Di Sumatera Utara 1945-1950
- 88. Supsiloani, S.Sos. Fungsi Budaya Megalitik Di Orahili-Gomo, Kabupaten Nias Selatan, 1000-1500 Masehi
- 89. Susanto Zuhdi Laut, Sungai Dan Peradaban:Tantangan Dan Peluang Indonesia Sebagai Negara Bahari
- 90. Sutejo K. Widodo, Kebijakan Ekonomi Berdikari Dan Perkembangan Sektor Perikanan
- 91. Suwardi, M.S. Prof. Kota Dan Dinamika Kebudayaan: Rasionalitas Menjadikan Pekanbaru Sebagai Pusat Kota Budaya Melayu Di Asia Tenggara
- 92. Tanti Restiasih Skober, S.S., M.Hum Orang Cina Di Bandung, 1930-1960 Siasat Ekonomi Etnis Cina Di Bandung Dalam Menghadapi Kebijakan Penguasa
- 93. Tri Chandraaprianto, Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Dalam Transisi Ketatanegaraan Indonesia (Jember 1900 1960)
- 94. Trisni Andayani, Perubahan Peranan Wanita Dalam Ekonomi Keluarga Di Pedesaan Nelayan (Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan)
- 95. Umasih, Refleksi Kritis Terhadap Strategi Pedagogis Mata Pelajaran Sejarah Di Sma
- 96. Undri. SS. M. Si Konflik Tanah Di Daerah Perbatasan: (Studi Kasus Tiga Kelompok Etnik Di Pasaman, Sumatera Barat, 1930-1960)
- 97. Warto, Pencurian Dan Pelanggaran Hutan:Perbanditan Sosial Di Pedesaan Rembang Padaakhir Abad Ke-19 Dan Awal Abad Ke-20
- 98. Yuda B. Yangkilisan, M. Hum, Dinamika Perekonomian Kerajaan Sintang Di Kalimantan Barat 1822 1855
- 99. Yudhi Andoni, SS, Satu Islam Beda Pemahaman Satu Iman Beda Jalan: Nurcholish Madjid Dan Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam Di Indonesia 1970-2004
- 100. Zeffry Alkatiri, Dr Tujuh Buku Memoar Tentang Pulau Buru

- Zul Asri, Kota Bukittinggi Dan Kaitannya Dengan Pemilikan Tanah 1945-1980
- 102. William Chang, BENTUK SIKAP ANTIKEKERASAN

DINAMIKA KEBUDAYAAN DI KOTA GIANYAR: DARI KOTA KERATON SAMPAI KOTA SENI, 1771 — 1980- AN.

A.A. Bagus Wirawan

Sejumlah predikat untuk mencari ciri keunikan dilekatkan pada kota-kota baik di mancanegara maupun di nusantara yang mengalami pertumbuhan dan proses dinamikanya sendiri-sendiri sebagai produk fenomena historis. Kota Paris diberi predikat "Kota Mode atau Kota Parfum", Bandung "Kota Kembang", Yogyakarta "Kota Pelajar", Denpasar "Kota Budaya" Jakarta" Kota Perjuangan atau Kota Proklamasi" dan lain lainnya. Pemberian predikat terhadap sebuah kota laizimnya dikaitkan dengan potensi alam dan bakat warga kota bergumul dengan lingkungannya dalam sebuah ekosistem. Pergumulan dalam ekosistem yang berproses dalam waktu itu telah mampu menampilkan produk dinamika unsur-unsur kebudayaan yang kemudian dijadikan ciii dan keunikan dan sebuah ruang yang disebut kota. Salah satu produk unsur kebudayaan yang diangkat pada forum dialog mi adalah kota Gianyar, sekarang sebuah kota kabupaten di propinsi Bali yang punya arti sejarah dan predikat keunikan tersendiri di antara kota-kota kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sesungguhnya nama Gianyar berasal dan nama sebuah keraton yang dibangun dan befungsi sebagai pusat pemerintahan kerajaan oleh Ida Dewa Manggis Sakti, raja Gianyar I, pada tanggal 19 April 1771. Sejak itu kerajaan Gianyar muncul menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat di antara kerajaan-kerajaan lainnya di Bali yaitu Buleleng, Karangasem, Klungkung, Mengwi, Badung, Tabanan dan Bangli. Konsep dan teori tentang terbentuknya kota digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan lahimya kota yaitu "kota keraton" dan "kota seni" dalam proses temporalnya.

Ekotipe kota dan komunitas sosial yang berkembang di kota sangat ditentukan oleh pembagian pekerjaan, antara lain pendeta, prajurit, pedagang, pengrajm yang pada umumnya tinggal di lokasi yang terpisah-pisah. Di kota-kota kuno, pada umumnya kuildan tempat ibadah menjadi pusat kegiatan warganya namun lambat laun kota itu berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan serta hiburan. Kota-kota di Asia banyak berpusat path keraton (istana raja) sedangkan pelbagai lembaga terletak di bagian lain dan kota itu. Pemusatan penduduk di tepi beberapa sungai besar seperti Indus, Tigris atau pantai Lautan Tengah menjadi pusat perdagangan, pemenintahan kerajinan dan peribadatan. Pendeknya mencakup semua unsur dan aktivitas kebudayaan (Sartono Kartodirdjo, 1977: 3).

Fungsi kebudayaan kota tercermin pada struktur ekotipe dan ekosistemnya, yaitu sebagai pusat ibacfah, keraton dan benteng pertahanan. Konsentrasi kekuasaan kultural dan fisik mendorong terjadinya komunikasi kekuasaan dan kerjasama sesama warga sehingga dapat mempertinggi kreativitas dan produktivitas mereka. Oleh karena itu, nyata bahwa kota menjadi sinonim dengan kebudayaan. Selain itu, pelbagai institusi seperti pemerintahan, pusat pemujaan dan upacara. pasar, alun-alun, hiburan akan memperkuat integrasi antar golongan penduduk. Lagi pula kota akan tetap berfungsi untuk mengubah kekuasaan menjadi bentuk, energi menjadi kebudayaan dan materi menjadi lambang kesenian. Ketiganya itu merefleksikan dirinya serta menentukan identitasnya sebagai mahiuk yang berbudaya (Sartono Kartodirdjo, 1977: 9). Konsep teori yang didukung data

historis tentang proses dinamika kehidupan kota Gianyar selama dua abad lebih memberikan tambahan pemahaman dalam forum komunikasi profesi sej arawan. Malang melintang, pasang surut kehidupan dialami sejak lahir dan tumbuhnya menjadi kota keraton Gianyar dalam percaturan politik antar kerajaan di Bali (1771 - 1900). Ketika memuncaknya perebutan wilayah kekuasaan kerajaan Gianyar oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya yaitu Bangli, Klungkung dan Badung maka sikap Ida Dewa Gde Raka, raja Gianyar VI (1896 — 1912) yang memalingkan tumpuan kepada pemerintah Gubememen sangat tepat. Sejak dinobatkan pada tahun 1896, masih mewarisi proses konsolidasi disertai kekacauan politik dan gangguan keamanan ketertiban yang berlangsung sejak tahun 1883 dan masih terasa sampai akhir abad ke- 19. Sikap permusuhan raja Klungkung dan raja Bangli terhadap raja Gianyar masih tetap bergelora. Ketika keadaan yang penuh konflik, krisis dan suram itu Ida Dewa Gde Raka memulai pemerintahannya di kerajan Gianyar (Agung, 1989). Wilayah kerajaan Gianyar di desa Manca Warna dekat Tampaksiring diserang oleh laskar Bangli tahun 1899, demikian juga desa Pejeng, desa Sloli dan desa-desa perbatasan lainnya. Rakyat di desa-desa perbatasan di sebelah barat, Tohpati, Batubulan, Negari senantiasa menjadi sasaran serangan laskar kerajaan Badung. Desa Perbatasan sebelah timur: Banjarangkan dan Lebih menjadi sasaran laskar kerajaan Klungkung. Jadi desa-desa perbatasan kerajaan Gianyar menjadi sasaran serangan dan laskar kerajaan-kerajaan tiga penjuru. Untuk menangkis tekanan tekanan kerajaan tetangga, raja Gianyar Ida Dewa Gde Raka meminta suaka kepada raja stedehouder Karangasem I Gusti Gde Jelantik pada tahun 1898. Permintaan ditolak setelah bekonsultasi dengan Residen Liefrinck di Singaraja.

Atas penolakan itu, raja Gianyar kemudian memohon bantuan langsung kepada pemerintah Gubernemen melalui Residen Liefrinck pada tanggal 28 Desember 1899 dan pada tanggal 8 Januari 1900. Isinya yang terpenting adalah penyerahan kerajaan Gianyar kepada pemerintah Gubememen dengan alasan untuk lestarinya lembaga-lembaga yang ada dan menghindari kepungan musuh dan segala penjuru (Agung, 1989). Berdasarkan keputusan gubernur jendral tanggal 29 Nopember 1900 No 15 ditetapkan bahwa Ida Dewa Gde Raka dikukuhkan dalam kedudukan dan martabatnya sebagai stedehouder (wakil) pemenintah Hindia Belanda di kerajaan Gianyar (Agung 1989, ARA, 1900). Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 1903 Ida Dewa Gde Raka dinobatkan dalam suatu upacara penobatan menurut adat agama Hindu Bali (mabiseka ratu) sebagai raja Gianyar dengan gelarnya " Ida I Dewa Manggis" seperti lazimnya dipakai oleh raja-raja yang berkuasa di Gianyar turun-temurun (sejak Ida Dewa Manggis Sakti). Kemudian oleh penggantinya yang bemama Ida Dewa Ngurah Agung gelar stedehouder diganti dengan menggunakan gelar regent berdasarkan surat keputusan Gubemur Jendral path tahun 1913. Gelar dan jabatan regent berlangsung sampai tahun 1929. Berdasarkan surat keputusan gubernur jendral pada tanggal 8 Juli 1929 No 23 berhak menggunakan gelar adat Bali yaitu Anak Agung untuk negara Gianyar. Sejak tahun 1929 Ida Dewa Ngurah Agung dikukuhkan oleh pemerintah Gubememen dengan dun gelar sekaligus yaitu gelar secara modem (bestuurder) dan secara adat di negara Gianyar (Anak Agung).

Selama pemenintahan stedehouder dan regent (1913 — 1929) kemudian besruurder dan Anak Agung Ngurah Agung, raja Gianyar VII (1913 — 1943) suasana aman dan tertib mewarnai kehidupan masyarakatnya. Secara perlahan bakat alam bersentuhan dengan kemampuan berkreasi. Kreativitas waktu-waktu luang telah menampilkan aktivitas seni dan pelbagai produk kaiya seth yang sejak semula terkait erat

dengan persembahan untuk upacara keagamaan Hindu di pura-pura (kahyangan) untuk kepentingan keraton (pun, istana raja, court art), dan untuk kepentingan rakyat atau masyarakat (folk art). Sejak itu berkembang pelbagai produk karya seni antara lain: seni lukis, seth ukir, seth patting, seni tan pertunjukan, wayang, seni karawitan dan gamelan, seth sastra kekawin. Melalui kreativias para seniman dan produk kaiya-karya seni mereka. kerajaan Gianyar di Bali semakin dikenal oleh wisatawan mancanegara.

Kehadiran sethman-seniman berkebangsaan asing : Walter Spies dan Rusia dan Rudolf Bonnet dan Belanda pada tahun 1928 yang menetap di Ubud dapat dijadikan tonggak akulturasi terjadinya dinamika kebudayaan pada unsur karya seth. Atas inisiatif kedua seniman Barat yang memperoleh dukungan para bangsawan Ubud: Tjokorda Gde Raka Soekawati (punggawa Ubud), Tjokorda Gede Agung Sukawati dan Tjokorda Gede Rai (punggawa Peliatan) beserta pam seniman Gianyar mereka bersama-sama membentuk sebuah organisasi modern pertama para seniman yaitu "Pita Maha" pada tanggal 29 Januani 1936. Keanggotaannya terdiri dani para pelukis, pemahat, pengukir, pengerajin anyaman, pengerajin perak dan emas hingga mencapai jumlah 159 orang di Ubud dan di luar Ubud sampai di Badung. Melalui pameran-pameran yang diselenggarakan di kota-kota di Bali (Singaraja), di Jawa : Bandung, Yogya, dan Batavia, Surabaya, Tegal, di Sumatra (Medan dan Palembang), di Kalimantan (Pontianak), bahkan hingga ke luar negeri (Amsterdam, Den Haag, London), organisasi seniman "Pita Maha" semakin luas dikenal. Akan tetapi selama pendudukan Jepang dan revolusi Indonesia aktivitas "Pita Maha" terhenti. Setelah Pemilu I tahun 1955 timbul lagi ithsiatif dan R. Bonnet, Tjokorda Gede Agung Sukawati dan beberapa seniman Ubud untuk menghimpun para seniman. Mereka mendirikan organisasi "Golongan Pelukis Ubud" pada tahun 1956. Ketuanya adalah A.A. Gede Sobrat. Kehadiran seorang pelukis Belanda yang menjadi warga negara Indonesia Arie Smith pada tahun 1961 telah menciptakan pembauran lewat karya seth lukisan yang kemudian dikenal dengan aliran "the young artist". Gaya young artist menghasilkan lukisan-lukisan yang bertemakan kehidupan sehari-hari dengan polesan warna-warna cerah, kontras, bebas dan ekspresif.

Visi dan misi organisasi "Pita Maha" yaitu menampung hasil karya seniman seniman berbakat sekaligus sebagai dokumentasi dan pemeran terwujud pada tahun 1959. Ketika itu didirikan sebuah museum yang diberi nama" Museum Pun Lukisan Ratna Warta "di Ubud. Disusul dengan dibukanya museum lukisan oleh Pande Wayan Suteja Neka., seorang pelukis kelahiran tahun 1939. Museum lukisan yang dibukanya sendiri pada tahun 1976 diberi nama "Museum Neka" diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 7 Juli 1982. Setelah itu berdiri pula museum-museum lukisan lainnya seperti "Museum Anna", "Museum Rudana".

Untuk menampung produk karya-kaiya seth dan menjualnya kepada konsumen bennunculan pula bengkel kerja (work shop), studio-studio, galery-galery, art shop-art shop yang tersebar di kecamatan-kecamatan hingga ke desa-desa di seluruh kabupaten Gianyar: Batubulan, Celuk, Guang, Sukawati, Bone, Gianyar, Ubud, Tegallalang, Kedewatan, dan lain-lain. Dan pihak pemerintah kabupaten Gianyan menjadi fasilitator pembangunan "pasar seni" di Sukawati pada tahun 1983 dan "pasar seth" Blahbatuh pada tahun 1987. Selain itu pemenintah memfasilitasi tanah dan pembangunan gedung Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI) di Ubud dan Guwang serta Sekoiah Seni Karawitan di Batubulan. Atraksi kesenian seperti tan Barong dan Keris, Kecak bisa ditemukan di Singapadu, Bedulu dan Bone.

Sesungguhnya dinamika kebudayaan yang melekat pada tepian ruang yaitu Gianyar sejak dijadikan nama keraton (Pun Agung Gianyar) ibukota pusat pemenintahan kerajaan pada tahun 1771 hingga dijadikan nama ibukota kabupaten tahun 1960-an hingga sekarang tidak pernah kehilangan nuansa seth dan kreativitas para senimannya. Kota kabupaten Gianyar adaiah buminya seniman dunia berakulturasi dengan seniman lokal yang telah menghasilkan kreativitas karya-karya seth penuh dinamika dan gaya kiasik sampai gaya modem dan kontemporer, jadi sangatiah pantas apabila kabupaten Gianyar saat mi dibeni predikat Kota Seth" yang semula "Kota Keraton" berdasarkan realitas bukti-bukti dan fakta-fakta sejarah yang ada dan ditemukan.

PENGARUH AKAR BUDAYA POLITIK PADA DINAMIKA POLITIK EKONOMI DI INDONESIA (1900-1990-AN): DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

A.Adaby Darban

Bagian pertama adalah pembukaan akan diungkapkan tentang garis besar perkembangan akar budaya politik di Indoensia dan pengaruhnya terhadap kekuasaan dalam politik ekonomi pada era kebijakan politik-ekonomi "Benteng", era kebijakan politik-ekonomi "Demokrasi Terpimpin", sampai dengan di Era kebijakan politik-ekonomi "Orde Baru". Bagian pertama ini sebagai pengantar ke arah permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini selanjutnya.

Bagian kedua makalah akan diungkapkan dinamika perkembangan akar budaya politik di Indonesia sejak zaman kekuasaan kerajaan tradisional, zaman kekuasaan kolonial, sampai pada zaman penjajahan Jepang. Masing-masing kekuasaan yang telah membudaya itu memiliki ciri khas yang kemudian perilaku budayanya muncul dan terbawa diaktualisasikan kembali dipakai sebagai kebijakan pada zaman setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Akar budaya itu adalah antara lain: Budaya Feodal, Budaya Eksploatasi Kolonial, dan juga Budaya Fasisme Jepang.

Bagian ketiga makalah ini dibicarakan proses transformasi akar budaya politik itu pada bidang perekonomian, yang juga mendorong munculnya birokrasi dan pengusaha militer di Indonesia. Lebih lanjut berkembang munculnya empat golongan borjuasi, yaitu: Pedagang Asli, Kapitalisme Negara, Birokrasi Militer, dan Pengusaha sebagai klien birokrasi. Kesemuanya menggunakan modal asing yang dalam perjalanannya hanyalah sebagai "broker", sedang yang melakukan aksi perekonomiannya adalah pengusaha asing dan China. Politik-ekonomi semacam ini hanya menguntungkan pemodal asing dan pengusaha China, sehingga bila negara dalam keadaan krisis dan kritis, penguasa modal itu melarikan modal ke luar negeri, maka akan goyahlah perekonomian negara. Perkembangan selanjutnya, kekuatan negara yang hanya mengandalkan modal asing itu akan rapuh dan akan mengalami kehancuran.

"SEJARAH LISAN ''ORANG BIASA" : SEBUAH PENGALAMAN PENELITIAN

Abdul Syukur

Sejarah lisan 'orang biasa' merupakan alternatif penelitian sejarah yang relatif masih asing di Indonesia. Hal ini disebabkan kecenderungan para sejarawan untuk lebih menyandarkan diii pada informasi tertulis. Pada saat bersamaan mengabaikan informasi lisan karena dianggap kurang berguna. Akibatnya timbul persepsi keliru yang mengartikan penelitian sejarah hanya di pusat-pusat kearsipan. Persepsi keliru ini telah mempersempit jalan bagi perkembangan sejarah lisan yang pernah dirintis lembaga Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI). Selama dekade 1970-an dan 1980-an, ANRI mengerjakan penelitian sejarah lisan dengan melibatkan sebagian besar sejarawan di Indonesia. Fokusnya kepada 'orang-orang besar' yang oleh sejarawan lisan disebut sebagai sejarah lisan elit.

Fokus sejarah lisan yang pernah dilakukan ANRI sangat bertentangan dengan fokus penelitian sejarawan terkemuka Sartono Kartodirdjo. Sebaliknya, ia mengangkat 'orang kecil' atau 'orang biasa' dengan memanfaatkan informasi tertulis. 'Orang kecil' atau 'orang biasa' adalah mereka yang dianggap tidak mempunyai peranan menentukan dalam suatu peristiwa sejarah sehingga seringkali diabaikan.

Penulis sangat terpengaruh dengan 'semangat Sartono' tersebut. Selama dua tahun (1999-2000) atas biaya *The Toyota Foundation*, penulis meneliti sejarah lisan 'orang biasa' dalam kasus --meminjam istilah Orde Baru-- Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Warsidi di Lampung pada 1989. Keputusan menggunakan metode sejarah lisan ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap arsip-arsip yang ada dan pemberitaan surat kabar nasional. Kebenaran seluruh informasi tertulis meragukan sehingga tidak bisa diandalkan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah.

Namun tidaklah mudah menerapkan metode sejarah lisan 'orang biasa'. Sejumlah kendala sempat menghadang. Pertama, mencari keberadaan informan. Alamat mereka sering tidak jelas karena hidup berpindah-pindah dengan mengontrak rumah di berbagai tempat. Para bekas tetangganya banyak yang tidak mengetahui lagi keberadaannya. Diperlukan ketekunan untuk melacak keberadaan informan dan 'orang-orang biasa' ini

Kedua, membujuk informan agar bersedia diwawancarai. Sebagian besar informan menolak karena pengalaman tersebut menurut mereka amat menyakitkan dan memalukan. Mereka kehilangan seluruh harta benda beserta orang-orang yang sangat dicintai seperti anak, istri, suami atau sahabat. Di samping itu mereka memikul beban sosial sebagai mantan narapidana dengan vonis sebagai musuh negara. Secara sadar mereka ingin mengubur masa lalunya demi ketenangan hidup masa sekarang dan masa depan. Mereka sudah merasakan pahitnya tersingkir dan karena itu mereka tidak ingin tersisih di lingkungan barunya. Keluwesan peneliti menjadi syarat mutlak pada tahap mi. Ia harus menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Menciptakan suasana kekeluargaan yang wajar sangat berguna untuk memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan.

Ketiga, menyeleksi informasi yang diperoleh.. Ketidakkritisan akan menyebabkan peneliti memperoleh informasi menyesatkan. Merupakan kesalahan fatal apabila langsung mempercayai informan. Hams dipertimbangkan daya ingat, kejujuran dan posisi informan. Posisi mereka dapat dibagi tiga, yaitu orang yang mengalami, yang menyaksikan, dan yang mengetahui peristiwa yang diungkapkannya. Kecermatan peneliti diperlukan. Untuk mengatasi soal daya ingat dan kejujuran maka harus dilakukan dua cara, yakni melakukan wawancara beberapa kali dengan tema yang sama dan cek silang dengan informan lain tanpa harus mengkonfrontasikannya. Konfrontasi informasi secara langsung akan menyebabkan informan menutup diri karena malu kebohongannya diketahui atau karena mereka merasa diragukan informasinya.

Dalam penelitian sejarah lisan orang biasa' sebaiknya menggunakan teknik wawancara naratif secara indivual. Maksudnya wawancara dilakukan secara terpisah dan peneliti menempatkan diri sebagai pendorong informan untuk menceritakan masa lalunya hingga terlibat atau menyaksikan atau mengetahui peristiwa sejarah yang menjadi tema penelitian. Pengetahuan terhadap latar belakang kehidupan seluruh informan sangat bermanfaat untuk memahami keputusannya terlibat atau tidak terlibat dalam suatu peristiwa.

Judul Makalah : KABUPATEN BERAU DENGAN RAGAM BUDAYANYA

Penulis : Drs. H. Achmad Maulana, Kab. Berau Prop. Kaltim

Sub Tema : Kota dan Dinamika Kebudayaan

ABSRAK

Masyarakat Banua sebagai penduduk pribumi Daerah Berau termasuk rumpun Melayu Austronesia. Mencatat sejarah kehidupannya sejak abad ke-13 Masehi dan berkebudayaan Melayu.

Tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan di daerah Berau Kalimantan Timur, yaitu : faktor lingkungan hidup, faktor komunikasi, dan faktor manusia sendiri.

Tiga ragam budaya di daerah ini yakni : ragam budaya pantai, ragam budaya keraton, dan ragam budaya pedalaman.

Faktor-faktor seperti dijelaskan di atas menyebabkan wilayah perkotaan di daerah Berau berfungsi sebagai pusat perkembangan kebudayaan.

Tiga fungsi kota ini, selain fungsi budaya juga berfungsi sebagai pusat ekonomi dan pusat administrasi. Pusat budaya adalah keraton, masjid, rumah, dan lembaga adat. Pusat ekonomi adalah pasar, terminal, stasiun, PKL, dan tempat-tempat transaksi jual beli.

Beragam kebudayaan berkembang di empat kota kecamatan (empat kecamatan kota) yaitu : Tanjung Redep, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Teluk Bayur.

Tiga jenis budaya yang berkembang yaitu : budaya fisik, budaya non fisik dan hasil karya.

Selain nilai positif dari perkembangan kebudayaan terdapat nilai negative sebagai nilai ikutan pergeseran nilai positif ke arah negatif, seperti merosotnya etika norma moral dan agama.

Nilai-nilai negatif seperti ini harus dicari jalan untuk merekonstruksi budaya bangsa yang hakiki berupa martabat dan harga diri.

MAJALAH ISLAM SABILI : MEDIA REVIVALIS GERAKAN TARBIYAH (1989 – 1993)

Agung Pardini, S.Pd.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian historis yang bertujuan untuk merekonstruksi perkembangan awal majalah Islam Sabili sebagai pers ilegal pada dekade akhir pemerintahan Orde Baru. Tema penelitian ini menarik untuk dikaji karena walaupun terbit secara ilegal, namun Sabili dapat bertahan dan terus menaikkan tirasnya selama lima tahun. Terlebih lagi sebagai majalah yang terlahir dari gerakan Islam baru yang revivalis, Sabili memiliki konsistensi dalam pembelaannya terhadap Islam, khususnya tentang pemberitaan mengenai kondisi perjuangan Jihad, seperti yang terjadi di Palestina, Afghanistan, dan Bosnia. Majalah Sabili juga dipandang sebagai media yang merefresentasikan berkembangnya Gerakan Tarbiyah yang merupakan gerakan revivalisme baru Islam di Indonesia, sebab majalah ini sendiri didirikan dan dikelola oleh para kader tarbiyah.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, kalangan aktivis Islam memiliki optimisme yang besar untuk kembali memainkan peranan yang dominan dalam perpolitikan nasional, mengingat peran kelompok ini dalam menumbangkan rezim Orde Lama dan dalam membuharkan unsur—unsur kekuatan PKI. Kemenangan Orde Baru atas Orde Lama ini sesungguhnya bukan hanya keherhasilan dan pihak militer semata, melainkan juga kemenangan bersama-sarna dengan mahasiswa dan umat Islam. Namun pada akhirnya militer (FNI—AD) tampil sebagai kekuatan yang sangat dominan dalam panggung politik Orde Baru. Sedangkan kekuatan mahasiswa dan umat Islam kemudian dipinggirkan dan kepengurusan lembaga-lembaganya banyak diintervensi.

Pola hubungan antara pemerintah Orde Baru dengan kalangan Islam yang mulai menaik di akhir tahun 1980-an merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Sikap refresif yang dilakukan oleh Militer kepada Islam yang terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya sudah mulai dikurangi. Salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi terciptanya corak baru dalam hubungan antara Islam dan Negara sejak akhir 1980-an adalah dengan tumbuhnya berbagai gerakan Islamisme baru di Indonesia. Salah satu gerakan Islamisme baru tersebut adalah kelompok-kelompok pengajian Usroh yang banyak terinspirasi oleh pergerakan Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan Jarniatul Muslimin dari Pakistan.

Karakter keagamaan yang sangat khas dan menonjol dari gerakan Islam baru tersebut antara lain adalah

- 1. Reformatif, yakni pemurnian pemahaman Islam dan unsur-unsur di luar Islam baik dari pemikiran Barat maupun dari tradisi lokal.
- 2. Corak kesadaran diri untuk keluar dari dominasi dan isolasi kekuatan di luar Islam terutama Barat.

3. Corak pertumbuhan kepercayaan diri untuk tampil sebagai salah satu kekuatan alternatif yang membawakan penyelesaian atas problem-problem yang dihadapi yang dihadapi oleh manusia.

Munculnya gerakan Islamisme baru di Indonesia dengan coraknya yang revivalis, membawa efek besar bagi penyiaran-penyiaran dakwah Islam. Sejumlah usaha-usaha untuk mendorong timbulnya kembali kesadaran dan solidaritas kepada segenap kaum Muslimin untuk kembali kepada kehidupan Islam secara benar dan utuh semakin terus digencarkan. Sehingga munculnya gerakan-gerakan revivalisme Islam tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu indikator lahirnya kebangkitan Islam di Indonesia.

Salah satu bentuk strategis yang coba dikerjakan oleh para aktivis-aktivis dakwah dan gerakan Islamisme baru dalam mendukung kebangkitan Islam adalah dengan membangun media cetak Islam yang mampu menjadi refresentasi penting terhadap perkembangan baru Islam di tanah air. Hal ini dikarenakan masa kebangkitan intelektual Muslim, tanpa disadari juga disertai oleh kebangkitan institusi masyarakat madani yang vital dalam sejarah masyarakat modern yakni media massa dalam arti yang luas. Apalagi sebagian besar pembaca surat kabar atau majalah dari segi pendidikan biasanya adalah kalangan kelas menengah yang banyak tinggal di daerah perkotaan.

Pers Islam ini memiliki tugas dalam melakukan perlawanan (counter) opini terhadap pemberitaan-pemberitaan dari media-media masa Barat yang seringkali memojokkan kedudukan Islam. Fungsi-fungsi ini penting dilakukan karena munculnya kebangkitan Islam di Indonesia pada awal tahun I 980-an hampir bertepatan waktunya.

Dengan awal proses globalisasi dunia. Ditambah lagi hampir semua opini internasional selalu berasal dari media pers Barat yang dengan kekuatan modalnya seringkali membuat pemberitaan yang tidak berimbang karena harus membawa misi bagi kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga keberadaan berbagal media massa Islam mutlak dibutuhkan.

Maka pada tahun 1988, lahir majalah baru berukuran setengah folio yang dinamai SABILI, yang dalam bahasa Arab berarti 'jalanku'. Majalah ini secara gotong-royong dibangun oleh para aktivis Muslim yang tergabung dalam Kelompok Telaah dan Amaliah Islam (KTAI). Para pengelolanya di awal penerbitan hanya terdiri dan lima orang, diantaranya M. Zainal Muttaqin menjabat sebagai pemimpin redaksi, dan pemimpin umumnya dipegang oleh Ustadz Rahmat Abdullah.

Sebelum majalah Sabili ini muncul, di Indonesia telah banyak majalah-majalah Islam lain yang sudah berkembang menjadi media besar dan dikenal luas oleh umat. Majalah-majalah Islam tersebut antara lain adalab: Panji Masyarakat, Suara Muhammadiyah, Adzan, Media Dakwah, Suara Hidayatullah, dan Al-Muslimun. Walaupun sama-sama berlabel majalah Islam, namun antara masing-masing majalah Islam tersehut memiliki jenis dan corak khas pemberitaan yang saling berbeda. Semua majalah Islam ini memiliki izin terbit yang dikeluarkan langsung oleh Departernen Penerangan, baik SIT (Surat Izin Terbit), SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pens), maupun STT (Surat Tanda Terbit). Perbedaan yang paling menonjol antara majalah majalah tersebut dengan majalah Sabili terletak pada masalah perizinan penerbitan. Sabili adalah majalah Islam yang terbit tanpa dilengkapi oleh izin apapun dan pemerintah. Akibatnya, majalah Sabili harus terbit secara sernbunyi-sembunyi sebagai sebuah pers bawah tanah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan bentuk penyajian historiografis yang bersilat deskriftif-naratif. Sumber primer tertulis yang digunakan adalah kumpulan dan eksernplar-eksemplar majalah Sabili yang pernah diterbitkan antara tahun 1988-1993. Sedangkan sumber primer lainnya didapat dan sumber lisan yang merupakan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi pengelola Sabili, seperti M. Zaenal Muttaqin, Arifinto, dan Abdurrahman Tamin. Sumber tertulis sekundernya berasal dari buku-buku, karya-karya penel itian, serta artikel —artikel dan majalah, surat kabar dan juga dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan relevan dengan objek kajian yang akan diteliti.

Dari hasil penelitian mi, didapatkan kesimpulan bahwa walaupun majalah Sabili terbit tanpa memiliki SIUPP dan STT, namun majalah ini dapat bertahan selama lima tahun dengan jumlah oplah yang terus mengalami peningkatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Faktor pertama, kondisi sosial-politik nasional, kebijakan pemerintah Orde Baru pada saat itu yang tidak mau untuk segera menutup atau membredel penerbitan majalah Sabili serta tidak pula menangkapi para pengelolanya. Hal ini didasari oleh tiga pendapat yakni: (1) Sabili lahir bertepatan waktunya dengan dimulainya fase akomodatif oleh negara kepada umat Islam, (2) Presiden Soeharto sedang berusaha mencari simpati dari kelompok-kelornpok Islam, dan (3) keberadaan Sabili sejak awal belum dianggap oleh pemerintah sebagai ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan negara.

Faktor kedua, diadakannya reorganisasi pengelolaan Sabili pada tahun 1991. Hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan manajemen menjadi lebih profesional yang dilakukan dengan cara merombak struktur redaksi majalah Sabili dan menambah modal keuangan. Faktor ketiga, muatan informasi yang disajikan oleh Sabili memiliki komitmen yang kuat terhadap pembelaannya terhadap Islam. Daya tarik utama yang dimiliki oleh Sabili adalah melalui rubrik Alam Islami yang banyak memberitakan perkembangan aktual dari kondisi jihad di Palestina, Afghanistan, dan Balkan. Hal tersebut menjadikan informasi yang disediakan oleh Sabili semakin dibutuhkan oleh khalayak pembacanya.

Faktor pendukung keempat, dilihat dari sisi bisnis, dapat bertahannya Sabili antara 1988 sampai dengan 1993 adalah karena dimilikuiya segmentasi pasar pembaca yang tidak tumpang tindih dengan segmen pembaca dari majalah—majalah Islam yang lain. Karena Sabili merupakan bagian dari gerakan Tarbiyah, maka sebagian besar pembaca setia majalah Sabili umumnya adalah para aktivis dakwah dan golongan kelas menengah yang berafiliasi dengan gerakan Tarbiyah.

Untuk menghambat laju perkembangan Sabili yang kian membesar tersebut, maka pemerintah melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengirimkan sebuah surat panggilan untuk pemnimpin umum Sabili dalam rangka dimintai keterangan. Namun karena disinyalir akan disertai dengan penangkapan, maka M. Zaenal Muttaqin tidak memenuhi undangan Kejati tersebut. Akibat dari tekanan penguasa yang semakin keras tersebut, maka Sabili terpaksa harus ditutup sendiri pada awal tahun 1993, oleh para personilnya. Bila Sabili tidak ditutup, maka akan ada banyak pihak yang terkena dampaknya.

KULI DAN ANEMER KETERLIBATAN ORANG CINA DALAM PEMBANGUNAN JALAN KERETA API DI PRIANGAN (1878 – 1924)

Agus Mulyana, Dr. M.Hum

Pada pertengahan abad ke-19 merupakan periode sejarah di Hindia Belanda yang ditandai dengan eksploitasi kolonial yang begitu meluas. Eksploitasi kolonial di Hindia Belanda pada akhir ahad ke- 19 disebabkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat sebagai dampak dan adanya pembukaan lahan perkebunan Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya sudah mulai nampak sejak pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kebijakan Sistern Tanam Paksa. Dampak pertumhuhan ekonomi tersebut yaitu membutuhkan sarana infrastruktur bagi kelancaran proses produksi dan pengangkutan hasil-hasil perkebunan.

Salah satu infrastruktur yang penting dihangun adalah jalan kereta api. Pembangunan jalan kereta api dilatarbelakangi oleh kesulitan dari hasil perkebunan ke pelabuhan untuk diekspor. Lokasi perkebunan sebagian besar berada di daerah pedalarnan apalagi wilayah Priangan merupakan daerah pegunungan dengan struktur tanah yang berbukit-bukit. Pengangkutan yang lambat akan berdampak kepada kwalitas hasil perkebunan Hasil perkebunan tersehut apabila banyak menumpuk di gudang kualitasnya dapat menurun dan yang lebih parah lagi dapat membusuk sehingga dapat merugikan bagi perdagangan ekspor hasil-hasil perkebunan. Oleh sebab itu pembangunaan kereta merupakan solusinya.

Pembangunan jalan kereta api merupakan pembanguran proyek besar kolonial Belanda, hal ini ditandai dengan melihatkan banyak tenaga kerja dalam proses pembangunannya. Salah Satu golongan yang terlibat dalam pembangunan jalan kereta api di Priangan adalah orang cina. Orang cina pada umumnya berperan sebagai kuli dan pemborong atau anemer. Kuli Cina digunakan dalam pembangunan jalan kereta api pada umurnnya dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan fisik. Sedangkan para pemborong Cina atau anemer banyak berperan dalam mernasok bahan-bahan material yang digunakan untuk peinbangunan jalan kereta api. Bahan bahan seperti batu, pasir, kapur, kayu dan lain-lain, Selain berperan sehagai pernborong bahan - bahan material, orang cina berperan pula sebagai pengarah tenaga kerja atau kuli yang akan dipekejakan dalam pembangunan jalan kereta api. Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda yang menjadi pelaksana pernbangunan jalan kereta api di Priangan menggunakan orang-orang cina untuk mencari kuli yang akan dipekerjakan berbagai cara dilakukan oleh orang cina baik untuk bisa memasok bahan maupun mengerahkan kuli dalam pembangunan jalan kereta api. Untuk bisa memasok bahan material dilakukan dengan cara pelelangan baik dengan cara pelelangan baik melalui lelang gelap maupun terbuka. Sedangakan untuk mendapatkan tenaga kerja, orang Cina terlebih dahulu harus mengeluarkan uang muka untuk membayar para kuli agar mereka mau bekerja. Baik sebagai pemasok bahan material maupun sebagai pengerah tenaga kerja, bagi orang-orang Cina memiliki resiko keterlibatannya dalam pembangunan jalan kereta api di Priangan.

PENDIDIKAN SEJARAH & NATION AND CHARACTER BUILDING

Prof. Dr. Aminuddin Kasdi

Telah menjadi ftrah bahwa kehidupan manusia memiliki dimensi individual dan sosial. Dalam dimensi kehidupan sosialnya antara lain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila kehidupan bermasyarakat terbentuk secara alamiah bersendikan faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan sosial, geografis dan alam, maka kehidupan berbangsa dan bernegara disebabkan oleh faktor-faktor historis, terutama karena memiliki nasib yang sama, baik oleh faktor internal maupun eksternal. Meskipun munculnya suatu bangsa ada yang disebabkan oleh faktor internal, misalnya: Inggris, akan tetapi tampaknya suatu konsolidasi dari suatu bangsa terjadi lebih disebabkna oleh faktor-faktor eksternal . Apalagi pada bangsa-bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Kata kunci eksistensi suatu bangsa adalah integrasi nasional.

Dalam pembentukan dan penjadian sejak zaman kuno sampai sekarang Bangsa Indonesia ternyata harus menghadapi kedua faktor itu. Dalam rentangan waktu itulah terjadi dialektika antara berbagai unsur kehidupan Bangsa Indonesia asli baik sosial, budaya, ekonomi dengan berbagai pengalaman, pengaruh dari luar yang terjadi secara damai maupun konflik. Jalinan dialektis tersebut kemudian memberikan relief pada lukisan (rekonstruksi) Sejarah Nasional Indonesia. Dalam perjalanan waktu itu terlukis pengalaman indah seperti terwujudnya gagasan Persatuan Nusantara oleh Gadjah Mada, juga berbagai pengalaman menyedihkan karena harus berjuang berhadapan dengan kekuatan kolonialisme. Dalam perjuangan itulah tampak kepribadian tokoh-tokoh di Indonesia. Misalnya siapa tokoh pejuang yang mengorbankan harta benda, kedudukan, keluarga, jiwa dan raga. Juga siapa berjuang demi kepentingan dan keuntungan diri, menjadi tanah dan rakyat, dan juga mereka yang berkhianat. Tegasnya jalinan dialektis itu telah membentuk pribadi Bangsa Indonesia yang terbentang dalam layer Sejarah Indonesia.

Dalam menapaki era globalisasi perjuangan bangsa menapaki fase baru, karena kuat dan derasnya pengaruh asing yang tidak seluruhnya sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Untuk itu sebagai instrumen pendidikan pembentukan watak atau jatidiri Bangsa pelajaran sejarah mutlak perlu diberikan di semua jenjang pendidikan, baik pada jurusan/Program Studi IPS, IPA, bahasa, dan Kejuruan

JAGO DAN JAGOAN: STUDI KRIMINALITAS DI JAKARTA 1945-1950-AN

Amurwani Dwi Lestariningsih

Kriminalitas sebagai suatu fenomena di Jakarta merupakan suatu ciri dari sebuah kehidupan kota yang tidak dapat dihindari, disamping masalah urbanisasi Masalah keamanan di Jakarta mempunyai sejumlah masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi oleh para aparat pemerintah. Adanya knisis ekonomi dan politik semakin mendorong meningkatnya kriminalitas, Kondisi iniiah yang kemudian melahirkan jagoan untuk berperan.

Para jagoan adakalanya membuat keresahan masyarakat. Mereka seningkali membuat keonaran Dalam suasana tertentu jagoan kadang-kadang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan keamanan yang tidak dapat diatasi oleh aparat keamanan setempat. Terminologi jago dapat dilihat dan dua konsep yang berbeda. Jago adakalanya dipandang sebagai jago yang baik. Mereka itu oleh masyarakat sering disebut juga dengan istilah jago saja. Seorang jago bagi warga Jakarta mempunyai konotasi yang baik. Jago biasanya diartikan sebagai seorang yang memiliki kekuatan fisik, keberanian, kekebalan tubuh, dan ilmu mistik yang berhubungan dengan ilmu silat. Mereka biasanya bertindak atas dasar pertimbangan baik dan buruk menurut ajaran agama. Para jago juga dikenal sebagai seorang pejuang yang membela kepentingan rakyat. Kedua, seorang jago dipandang sebagai jagoan yang oleh masyarakat Jakarta lebih dikonotasikan pada suatu perbuatan yang tidak baik, Sebutan yang digunakan bagi anggota masyarakat yang melakukan tindakan kniminal, kejahatan dan terkadang disebut sebagai pengecut. Jagoan biasanya tidak disukal oleh masyarakat. Jagoan identik dengan kekerasan.

Pada masa revolusi, banyak jagoan yang terlibat dalam perjuangan. Pada saat itu batas batas antara jagoan dan pejuang sangat kabur, Tidak sedikit dari mereka yang membonceng revolusi untuk kepentingan pnibadi, sehingga sulit untuk menyatakan tentang tindakannya sebagai tindakan seorang "pejuang sejati" ataukah tindakan suatu tindakan kriminal.

Pasca revolusi. banyak pejuang yang kecewa melihat kehidupannya, yang ternyata tidak seperti yang mereka cita-citakan dan impikan. Kenyataan inilah yang mendorong bebenapa orang eks laskar untuk terjun ke dunia hitam, meskipun ada yang memasuki dunia birokrasi dan meneruskan karier di militer,

Makalah ini berusaha untuk merekonstruksi aktifitas para jago dan jagoan pada masa tahun 1945-1950-an, bagaimanakah peranan para jagoan dalam kaitannya dengan penjuangan Indonesia dan jaringan kerja (nett working) antara para jago, jagoan dengan aparat pemerintah pada periode 1945—1950-an.

MASYARAKAT WARISAN v.s MASYARAKAT MERDEKA TERCITA-CITAKAN: HAMBATAN-HAMBATAN PSIKO-HISTORIS MEWUJUDKAN TUJUAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

Dr. Anhar Gonggong

Enam puluh satu tahun sudah usia kita sebagai bangsa-negara merdeka. Tetapi dalam jarak waktu, yang tentu tidak dapat disebut singkat itu tampak, masyarakat merdeka tercitacitakan yang menjadi landasan perjuangan dalam sejarah kelampauan kita, belum juga terwujud sebagaimana yang diharapkan dan dikehendaki. Cita-cita yang dirumuskan dalam salah satu rangkaian kalimat "... mencerdaskan kehidupan bangsa ..." dalam Pembukaan UUD Negara tampak masih jauh dari perwujudannya. Dari segi ini harus disadari bahwa memperjuangkan kemerdekaan memang amat-amat sulit dengan segala korban yang dilahirkannya. Dan karenanya, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, ternyata belum berhasil untuk mewujudkan cita-cita yang sering digambarkan "luhur" itu.

Tak dapat disangkal, terdapat sejumlah hal yang menjadi penghambat untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Mungkin salah satu di antara penghambat itu bermula dari kekliruan menafsirkan rangkaian kata ".... Mencerdaskan kehidupan berbangsa....". yang saya maksud ialah terdapat sejumlah orang-termasuk di lingkungan pemerintah, pengambilan kebijakan dan tokoh politik serta masyarakat yang berpengaruh-yang menafsir kata "mencerdaskan" itu hanya berkaitan dengan pencerdasan otak, yang lebih berkaitan dengan tugas formal dalam pendidikan (sekolah). Tafsir ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi rangkai kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak hanya seperti tersebut di atas, melainkan juga menjangkau pula aspek kehidupan lain yang lebih luas, termasuk dalam perubahan hidup dalam bidang ekonomi dan/atau kesejahteraan.

Hal lain yang juga tidak dapat diabaikan sebagai penghambat dalam mewujudkan tyujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah keterkaitan kita dengan perkembangan global yang memang amat sulit untuk dihiondarkan. Ketika periode Perang Dingin antara dua blok kekuatan ideologi bertarung, kita tidak dapat lepas dari pengaruh globalnya yang juga menjangkau bangsa-negara kita. Tentu jangkaunnya itu memberi dampak pada sikap pemerinatha kita ketika itu. Hal yang sama juga terjadi setelah kehancuran blok Timur-Komunis oleh kekuatan Amerika-barat yang kemudian bersambung dengan situasi ekonomi dengan neo liberalisme yang bertumpu pada "pasar bebas"

Namun, harus pula ditatap secara histories-jujur, di samping hal-hal yang disebutkan di atas, hal terpenting, dalam pandangan saya, sebagai faktor penghambat dari mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa itu ialah karena masih kuatnya (sistem nilai) masyarakat warisan yang berhadapan dengan masyarakat merdeka tercita-citakan. Apa yang saya maksudkan dengan psico-historis itu terwujud dalam masyarakat warisan: dan

masyarakat warisan itu sendiri mengandung dua unsur (sistem) masyarakat kelampauan-historis kita yaitu pertama, masyarakat feodalistik dan kedua masyakat kolonialistik. Kedua (sistem nilai) masyarakat itu telah menjadi landasan kehidupan bersama masyarakat di kelampauan-historis kita selama ratusan tahun; dan tentu saja memiliki kemampuan bertahan di dalam dirinya.

Tentu amat sulit bagi masyarakat di kekinian kita untuk dengan segera memutus dampak yang telah terangkai itu. Bahkan tampak gejala-faktual dampak dari kedua jenis unsure masyarakat warisan itu, masih sangat kuat di lingkungan masyarakat kita, juga di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam kaitan itu, sejak awal kemerdekaan, paling tidak sejak 1950-an dan semakin ramai menjadi bahan pembicaraan-termasuk di dalam pelbagai seminar dan media cetak-tentang berkembangnya apa yang disebut neofeodalisme!.

Berdasarkan atas kenyataan di atas, maka terjadi tarik menarik antara dua kekuatan yang saling berhadapan, yaitu masyarakat warisan vs masyarakat merdeka tercita-citakan yang dirumuskan dalam rangkaian kata mencerdaskan kehidupan banagsa. Dalam makalah yang berangkat dari pemikiran di atas, akan dicoba untuk menganalisa faktor-faktor penghambat mewujudkan tujuan masyarakat merdeka tercita-citakan, terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memfokuskan perkaitan antara cita-cita menciptakan pemerintahan yang bergerak di atas prinsip-prinsip demokrasi dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui rencana-rencana pembangunan kesejahteraan-ekonomi.

MEMBACA DAN MEREKONSTRUKSI SEJARAH TORAJA MELALUI BIDANG SENI RUPA GRAFIS

Dr. Anwar Thosibo, M.Hum

Etnis Toraja di Sulawesi Selatan merupakan salah satu suku bangsa yang tidak mengenal aksara tulisan dalam bentuk eks verbal, oleh karena itu secara metodologi ada kesulitan untuk rnerekonstruksi masa lalu Toraja hanya dengan mengandalkan tradisi lisan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa etnis torala tidak rneninggaikan dokurnen sejarah. Karya seni rupa grafis passurak yang menghiasi rumah adat Tongkonan merupakan suatu sistem dokumentasi. Kesemuanya berfungsi sehagai sumber sej arah yang mengandung inforniasi, pesan. dan peristiwa inasa iarnpau layaknya deretan arsip yang penuh arti.

Bagi orang Toraja, passurak adalah tulisan, ukiran dan pelukisan. Dalam pengertian tersebut, menarik dan penting untuk disampaikan dalam konferensi nasional sejarah bahwa artikulasi passurak ternyata identik dengan tuflsan, namun bukan (lal modus seperti loritarak Bugis atau hiragana Jepang tetapi dalam representasi yang lain yaitu seni rupa grafis. Seperti halnya bahasa, passurak adalah karya seni visual yang merupakan "sistem pembuka dan penyimpan makna" realitas masyarakat Toraja, karena itu maka passurak tidak sekedar komunikatif tetapi lehih herperan sebagai tempat kreatifitas seni. Dalam kapasitas seni inilah pribadi passurak - sehagai seorang sejarawan dan seniman perupa - memiliki kehebasan untuk merefleksikan apa yang dialami dalam dunia imajinasinya.

Sesuai dengan poin 16 sub tema konferensi, maka tujuan makalah akan menawarkan suatu "pendekatan alternatif perubahan" dalam merekonstruksi kesejarahan dengan menggunakan sumber karya seni rupa tradisi dan gambar pra-sejarah. Selanjutnya akan membuka diskusi lehih lanjut mengenai persinggungan antara disiplin sejarah dan seni rupa, dengan harapan selain akan memberikan peluang pada pembentukan atau kritik pada teori yang selama mi telah mapan, juga akan menelaah lehih lanjut peran dan hakekat karya seni rupa dalam konteks hakikat disiplin sejarah.

Agus Setiyanto Ketua Umum MSI Cabang Bengkulu



Bung Karno dan Inggit di tengah para pemain sandiwaranya

Kongres Sejarah VIII, 14 – 17 Nopember 2006 di Hotel Millenium, Jakarta Pusat

Jakarta 2006

dengan judul: Panggung Sandiwara Bung Karno tris. wass Agus Setiyanto (Ketua Umum MSI Cab.Bengkulu) NB: mohon disms jika udah diterima email ini ke no hp: 081367729511

PANGGUNG SANDIWARA BUNG KARNO

Semasa Pengasingannya di Bengkulu (1938-1942)

Oleh : Agus Setiyanto

Sekilas Naskah Bung Karno

Naskah sebagai peninggalan produk masa lampau seringkali mengandung berbagai informasi tentang aspek kehidupan masyarakat lampaunya baik aspek ekonomi, politk, maupun sosial budaya (Siti Chamamah Soeratno, 1997:10). Demikian juga dengan kumpulan naskah sandiwara toneel karya Bung Karno.

Kumpulan naskah sandiwara karya Bung Karno ini berbentuk dialog – dan kadang-kadang pada bagian-bagian tertentu diperlukan monolog. Oleh karenanya naskah tersebut dapat dimasukkan dalam kategori teks drama. Dialog bergantian (giliran bicara), sekali-kali monolog, merupakan teks-teks yang disiapkan kepada para aktornya – tak seorangpun ada berperan sebagai juru cerita (dalang) yang berhubungan langsung dengan penonton (Jan Van Luxemburg dkk, 1986:160).

Jumlah naskah yang pernah ditulis oleh Bung Karno semasa pengasingannya di Ende (1934 – 1938) tercatat sebanyak dua belas judul (Cindy Adams, 1966:175; Lambert Giebels, 1999:200). Keduabelas judul tersebut, yang tercatat antara lain: Dr. Sjaitan; Ero Dinamik; Rahasia Kelimoetoe; Tahoen 1945; Don Louis Pereira; Koetkoetbi; Toberro, dan Kummi Torro? -. Menurut cerita Pak Burhan Wahid, naskah Bung Karno yang diberi judul Toberro itu merupakan kepanjangan dari Tokyo – Berlin – dan Roma. Sayang, tak banyak data tentang naskah tersebut yang bisa diungkapkan.

Kemudian, semasa pengasingannya di Bengkulu (1938 – 1942), Bung Karno juga menulis beberapa naskah, antara lain : *Rainbow* (Poetri Kentjana Boelan); *Hantoe Goenoeng Boengkoek*; *Si Ketjil* (Klein'duimpje); dan *Chungking Djakarta*.

Sayangnya, dari sekian banyak naskah tersebut, yang sampai pada penulis, hanya ada empat buah naskah, yaitu : *Dr. Sjaitan* ; *Chungking*

Djakarta; Koetkoetbi; dan Rainbow (Poteri Kentjana Boelan). Bahkan teks naskah Dr. Sjaitan sudah tidak lengkap – hanya ada dua *bedrijf* (babak) saja – semestinya, lengkapnya terdiri atas enam babak (Lambert Giebels, 1999: 201).

Namun demikian, melalui beberapa narasumber yang pernah diceriterakan kepada penulis, kandungan ceritera beberapa naskah seperti *Hantoe Goenoeng Boengkoek, Dr. Sjaitan*, maupun *Si Ketjil* (Klein'duimpje) masih dapat direkonstruksi.

Pesan Moral Bung Karno

Apa yang ditulis oleh Bung Karno adalah buah pikirannya. Dan buah pikirannya sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya, serta semangat jiwa zamannya. Jelasnya, Bung Karno hidup dalam suasana zaman pergerakan melawan kolonialis, dan sebagai tokoh sentral dalam pergerakan kaum nasionalis yang sedang mengobarkan api semangat nasionalismenya, meskipun dalam kondisi fisik terkurung – jiwa – semangat tak terbendung.

Buah tulisannya sangat sarat dengan amanat – pesan moral perjuangan yang disampaikan kepada masyarakat – bangsa Indonesia ditengah pergolakan hidup dari alam penjajahan menuju alam kemerdekaan. Pesan moral tentang arti pentingnya sebuah kesadaran sosial, berbudaya, politik, jatidiri – prinsip hidup bermartabat, berjiwa satria, kegotong-royongan – solidaritas - kebersamaan lintas kultural, kesadaran berketuhanan, hampir semua tercakup didalam isi kandungan kumpulan naskahnya.

Nilai-nilai moral – etika, musyawarah, serta kepemimpinan nampak menonjol pada beberapa naskah karya Bung Karno, terlebih pada naskah *Chungking Djakarta*. Nilai-nilai tersebut nampaknya seperti menjadi salah satu kecenderungan dalam tradisi penulisan naskah – seperti yang terdapat juga

pada kandungan naskah *Tantu Panggelaran* (Depdikbud : 1999), maupun Babat Lombok I (Depdikbud : 1999).

Pesan – amanat Bung Karno sebagai seorang nasionalis - patriotis yang tulen cukup jelas pada isi kandungan naskah *Chungking Djakarta*. Dalam naskah ini, Bung Karno mengingatkan bahwa setiap langkah perjuangan tentu saja banyak rintangannya. Dan rintangan terberat yang sering menghadangnya adalah sebuah pengkhianatan dalam seperjuangan. Atau lebih tegasnya lagi "musuh dalam selimut". Namun pada akhirnya kebenaran selalu membuahkan kemenangan.

Tokoh Tjen Djit Tjioe dan Zakir Djohan dalam naskah Chungking Djakarta menggambarkan karakter dua orang pejuang yang gigih, ulet dalam mengemban misi perjuangannya dengan tulus, serta menjunjung semangat moralitas yang tinggi. Disisi lain, kedua tokoh ini menggambarkan solidaritas – kebersamaan lintas kultural. Konsep – wawasan nasionalisme – wawasan kebangsaan yang ingin dibangun oleh Bung Karno bukanlah konsep nasionalisme – kebangsaan yang sempit (chauvinistis). Nampaknya terbaca jelas melalui kedua tokoh Tjen dan Zakir yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda namun bersatu dalam semangat kesadaran nasionalisme – nasionalisme bangsa Asia melawan bangsa kolonial. Disamping itu, apa yang pernah dicita-citakan oleh Bung Karno dalam konsep pembangunan politiknya yang disebut dengan istilah -"membangun poros Jakarta – Peking" bisa jadi naskah Chungking Djakarta ini bagian dari perjalanan sebuah proses penuangan konsep dalam bentuk lain Sebaliknya, tokoh Jo Ho Sioe dan tokoh Abu vang disamarkan. menggambarkan karakter – sifat antagonistis, pengkhianatan terhadap bangsanya, haus kekuasaan - kebendaan, keserakahan - kebathilan, yang Sementara tokoh Miss Liliwoe mewakili sifat berujung pada kebinasaan. watak patriotik yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Demikian juga dengan gambaran tokoh Saminah dalam naskah Chungking Djakarta ini. Saminah digambarkan sebagai seorang yang teguh mempertahankan prinsip – jatidiri kebudayaannya – tak terpengaruh oleh silaunya dunia yang serba kebendaan. Pesan moral yang cukup mendalam tentang nafsu, keserakahan, kekuasaan yang tidak selamanya membawa kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan, sebaliknya membuat orang lupa diri yang berujung pada kebinasaan – seperti yang dicontohkan pada tokoh Abu dalam Chungking Djakarta.

Dan pada ujung ceritanya, Bung Karno memberikan pesan moral, bahwa pemberian penghargaan terhadap para pahlawan – pejuang sangat penting guna mengingatkan atas jasa-jasa perjuangan dalam membela tanah airnya. Seperti yang dicontohkan dalam akhir cerita ini, dimana Tjen Djit Tjioe dan Zakir Djohan mendapat tanda jasa perhargaan sebagai pejuang.

Sementara pada isi kandungan naskah *Koetkoetbi* yang ada kecenderungan kemiripan pola dengan isi kandungan dalam naskah *Dr. Sjaitan*, lebih banyak menonjolkan unsur magis – mistis – penuh horor sebagaimana kisah dalam cerita film *Frankenstein*. Dan ending dari cerita *Koetkoetbi* ini cukup menarik – seperti akhir cerita dalam judul sinetron "misteri Illahi" – atau "Dendam Siluman Buaya". Kekuatan Allah - Sang Pencipta – Penguasa isi jagad raya menjadi dasar – landasan tingkat kesadaran religius - keimanan si penulis naskah yang cukup kuat.

Naskah *Koetkoetbi* ini ceritanya juga hampir mirip dengan cerita rekaan Jaelangkung – menggambarkan seseorang - manusia yang mencoba bermainmain dengan menghidupkan jasad orang yang sudah mati ratusan ribu tahun – yang kemudian membawa malapetaka baginya. Pesan moral yang disampaikan dalam Koetkoetbi ini selain berkaitan dengan pelestarian benda-benda cagar budaya, juga bahayanya – resikonya bermain-main dengan dunia mistis tanpa landasan kesadaran keimanan yang kuat. Dan akhirnya, hanyalah kekuatan Illahi lah yang harus ditempatkan diatas segalanya. Tiada tempat pertolongan selain melalui Allah.

Selanjutnya, dalam naskah *Rainbow*, selain membawa pesan moral dalam membangun semangat patriotik - berjiwa ksatria, lebih banyak memberikan pengajaran arti pentingnya sebuah kesadaran sejarah sebagai entitas - bagian yang tak terpisahkan dalam kebudayaan masyarakatnya. Pesan moral Bung Karno tentang arti pentingnya kesadaran sejarah, diperjelas pada selebaran pamlet sebelum pementasan *Rainbow*. Bahkan dalam pamlet tersebut diterangkan tahun-tahun peristiwa sejarah Bengkulu.

Bung Karno sangat sadar, bahwa masyarakat – bangsa Indonesia perlu mempelajari sejarah agar memiliki masa depan. Tampaknya sejalan dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Michael Sturner, bahwa "Di negeri yang tanpa sejarah, masa depan masyarakatnya akan dikuasai oleh mereka yang menentukan isi ingatan, serta yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lampau" (Taufik Abdullah, 1995:35). Sejarawan Cicero pun pernah yang mengatakan, bahwa barang siapa tak kenal sejarahnya, akan tetap menjadi anak kecil" (Sartono Kartodirdjo, 1992:23). Dan jauh sebelumnya, orang Yunani Kuno pun sudah memperkenalkan apa yang disebut dengan "Historia Vitae Magistra" (sejarah adalah guru kehidupan). Bukankah Bung Karno juga sempat mengingatkan kita tentang "Jasmerah" (Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah).

Sebelum Memimpin Monte Carlo

Sebagai seorang interniran (orang buangan politik) yang baru saja menginjakkan kakinya di bumi "Rafflesia" Bengkulu, tidak memungkinkan pada tahun pertama (1938) Bung Karno menerjunkan diri dalam kelompok seni musik orkestra Monte Carlo. Dan itu bukanlah tujuan utama Bung Karno untuk menerjunkan diri sebagai seorang "seniman" – melainkan semata sebagai media untuk menumbuhkankembangkan sebuah kesadaran nasionalisme kepada masyarakat yang sedang tertindas dalam belenggu kolonial.

Pada tahun pertama, Bung Karno lebih banyak disibukkan oleh kegiatan yang bersifat sosial - kemasyarakatan. Bung Karno memerlukan sebuah proses sosialisasi dengan lingkungan barunya untuk memahami tipologi serta kultur masyarakat Bengkulu. Dan ternyata, dalam waktu yang relatif singkat Bung Karno mampu menjalin komunikasi – interaksi sosial dengan beberapa tokoh masyarakat kota Bengkulu – terutama dari kalangan terpelajar, cerdik-pandai, guru, pegawai, usahawan, termasuk juga tokoh-tokoh penting Muhammadiyah – maupun Taman Siswa.

Di mata para tokoh pergerakan Bengkulu, nama Bung Karno sebagai tokoh pejuang sentral – nasional, memang sudah tidak asing lagi, karena mereka sudah sering mendengar, dan membaca tulisan-tulisan Bung Karno lewat media. Seperti yang diceritakan oleh M. Ali Hanafiah, salah seorang pendiri Taman Siswa Bengkulu, yang mendapat kehormatan kunjungan pertama Bung Karno ketika pertama kali menginjakkan kakinya di Bengkulu (M. Ali Hanafiah, 2003: 25). Bahkan kemudian, pada suatu hari, Bung Karno dikunjungi oleh Hassan Din, Ketua Muhammadiyah setempat menjadi guru sekolah Muhammadiyah (Cindy Adams, 1966:188). Kunjungan Hassan Din bersama istri dan anaknya Fatima (Fatmawati), serta adik Hassan Din ke rumah Bung Karno dikisahkan oleh Fatmawati dalam buku Catatan Kecil Bersama Bung Karno (Fatmawati, 1985:32).

Sejak bergabung dengan para tokoh perkumpulan seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa setempat, Bung Karno semakin banyak pergaulan – sering

terjun ke lapangan – keliling kota Bengkulu. Bung Karno semakin aktif dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Dalam waktu yang relatif singkat, pengaruh Bung Karno di Bengkulu semakin besar, meski aktivitas Bung Karno Karno sepak terjang – gerak-gerik Bung Karno terus menerus diawasi oleh pemerintah Belanda melalui polisi intel.

Di Bengkulu, Bung Karno juga mempunyai banyak kawan dari kalangan orang Tionghoa, termasuk orang-orang Tionghoa yang bergerak dalam usaha perdagangan. Beberapa orang Tionghoa yang sering bergaul dan menjadi sahabat Bung Karno antara lain: Oey Tjeng Hien alias H.A. Abdoel Karim, Lie Tjoen Liem, Liem Bwe Seng, serta Tjan pemilik percetakan.

Rupanya Oey Tjeng Hien adalah kawan lamanya Bung Karno ketika sama-sama dengan duduk dalam Persyarikatan Islam – Persis di Bandung. Hien yang semula membuka usahanya di daerah Bintuhan (Bengkulu Selatan), lalu ditarik oleh Bung Karno untuk pindah ke kota Bengkulu. Hien akhirnya menuruti Bung Karno dan kemudian membuka usaha meubelnya di Suka Merindu bersama dengan Bung Karno sebagai arsiteknya. Di tempat itulah terpampang tulisan : Peroesahaan Meubel Soeka Merindoe dibawah pimpinan Ir. Soekarno. Hien bisa menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah di Bengkulu itu juga atas desakan Bung Karno (Lambert Giebels, 2001:219).

Sedangkan hubungan Bung Karno dengan Lie Tjoen Liem yang semula hanya sebatas hubungan bisnis ringan yang saling menguntungkan, tetapi kemudian berlanjut seperti sahabat dekat. Menurut penuturan Bu Lidia alias Lie Khioek Sien, salah satu anak perempuannya Lie Tjoen Liem, bahwa Bung Karno sering juga datang ke tokonya yang sekaligus rumahnya – kadang juga makan di rumahnya. Bahkan Bung Karno pernah ngebon sebuah arloji seharga f 6 di toko papanya. Sayang, surat tanda bonnya dibawa oleh adiknya yang bernama Lie Kim Nam – dan sekarang adiknya sudah meninggal dunia.

Lie Tjoen Liem, asal Tiongkok yang semula merantau ke Bantam dan berusaha di bidang leveransir beras, makanan, bahan bangunan, serta obatobatan. Kemudian setelah ke Bengkulu, membuka Toko yang diberi nama Sin Tjie Hoo – nama papanya asli orang Tiongkok (Cina totok), tetapi orang kemudian lebih mengenal toko itu dengan nama pemiliknya, yaitu Liem – maka

menjadi Toko Liem yang menjual berbagai macam makanan dan minuman, serta barang-barang besi bangunan "Provi'sien en Dranken, Ijzerwaren."

M.Ali Hanafiah sendiri dalam catatannya juga menceritakan, bahwa Bung Karno dan M.Ali Hanafiah sebelum melakukan perjalanan keliling kota, mampir dulu ke Toko Liem – kemudian Bung Karno mengambil makanan dua batang chocolate Van Houten atau Kwatta yang kemudian dibagi berdua. Bung Karno mengambil begitu saja tanpa membayar – rupanya ada hubungan bisnis kecil-kecilan, yaitu Bung Karno dengan menggunakan nama samaran sering menulis artikel pada lembar iklan tokonya (M. Ali Hanafiah, 2003:38).

Orang Tionghoa yang satunya lagi yang berhubungan dengan Bung Karno adalah Liem Bwe Seng, pemilik rumah di jalan Anggut Atas yang disewa oleh Bung Karno sebagai tempat tinggal selama di Bengkulu (1938-1942). Sayang tidak banyak keterangan seberapa jauh hubungan Bung Karno dengan pemilik rumah yang telah terjalin selama empat tahun.

Memang, kebanyakan yang membuka usaha bisnis berbagai macam perdagangan baik di bidang percetakan (drukkerij), makanan dan minuman, barang-barang bangunan (besi, seng, paku, semen, cat, dan lain-lain), dan lain-lain adalah orang-orang Tionghoa, termasuk pemilik Toko En yang bergerak dibidang jasa photograf. Sudah barang tentu Bung Karno sering berhubungan dengan mereka yang banyak menyediakan berbagai barang yang diperlukan dalam pertunjukan Monte Carlo.

Pemimpin Monte Carlo

Tak diketahui secara pasti kapan tepatnya, Bung Karno menjadi pemimpin Monte Carlo. Tetapi, paling tidak pada bulan ketika Bung Karno sudah mulai menulis naskah Dr. Sjaitan. Pada naskah Dr. Sjaitan tercantum kolofonnya, yaitu tanggal 24 Desember 1938. Artinya, Bung Karno terlibat secara aktif dalam sandiwara toneel Monte Carlo – bisa jadi sudah menjadi pucuk pimpinannya.

Pendek kata, Bung Karno sudah mempunyai pengaruh yang besar dikalangan para seniman, khususnya kelompok musik orkestra Monte Carlo yang rata-rata para anggotanya masih golongan muda-muda.

Bung Karno merasa perlu mendekati para anak muda yang tergabung dalam kelompok musik orkestra Monte Carlo itu. Bung Karno ingin memberikan pelajaran – gemblengan - semangat kepada para pemuda untuk menumbuhkan serta membangkitkan kecintaannya kepada tanah air, semangat patriotik,

sebagaimana semangat dan kobaran jiwa nasionalisme Bung Karno yang tak pernah padam. Meski segala gerak-gerik – sepak terjang Bung Karno tak pernah lepas dari pengawasan Politieke Inlichtingen Dienst (PID) – semacam polisi intel yang diberi tugas oleh pemerintah Belanda untuk mengawasi apa saja kegiatan Bung Karno di Bengkulu.

Setelah menjadi pimpinan Monte Carlo, Bung Karno segera melakukan formulasi baru dalam seni pertunjukannya. Monte Carlo yang semula hanya bergerak di bidang seni pertunjukan musik orkestra saja, oleh Bung Karno kemudian difusikan – dilebur dalam bentuk sebuah seni pertunjukan sandiwara toneel.

Tetapi belakangan, Bung Karno juga merekruit para anak muda – pelajar yang mempunyai minat di bidang olah raga. Oleh karenanya, Bung Karno kemudian membentuk kelompok Monte Carlo yang bergerak di bidang olah raga seperti Badminton (bulu tangkis), dan sepak bola - yang juga sedang ngetrend – populair seiring dengan pertumbuhan budaya masyarakat perkotaan Bengkulu pada waktu itu.

Dalam bidang olah raga sepak bola, mereka mempunyai kelompok tersendiri yang diberi nama " Elftal Monte Carlo" (kesebelasan Monte Carlo). Bung Karno sendiri sekali-kali pernah juga bermain bulu tangkis. Bahkan pernah mengajari Fatmawati bermain bulu tangkis (Cindy Adams, 1966:188).

Bagi Bung Karno yang sudah mempunyai modal pengalaman mendirikan grup sandiwara toneel Kelimutu ketika di Endeh (1934-1938) tentunya tidak terlalu sulit untuk memimpin sandiwara toneel Monte Carlo ini. Apalagi, di Bengkulu sudah ada fasilitas gedung pertunjukan seperti Royal Cinema. Disamping modal pengalaman dalam hal sandiwara, Bung Karno juga mempunyai banyak referensi kepustakaan tentang berbagai macam cabang ilmu pengetahuan – sehingga wawasan pengetahuan umumnya amat luar biasa. Pengalamannya melukis, menulis naskah, membuat tipuan suara-suara angin, guntur, hujan, hingga tipuan membangkitkan mayat hidup, ketika di Endeh menjadi modal dasar yang kuat untuk menggarap pertunjukan Monte Carlo.

Pada umumnya, perkumpulan sejenis sandiwara ini, seorang pimpinan seringkali merangkap berbagai peran sekaligus – baik sebagai penulis naskah, sutradara, produser, hingga manajer pemasarannya. Demikian, peran Bung Karno dalam perkumpulan sandiwara Kelimutu yang tidak sekedar penulis naskah, mencari dan memilih pemain, membuat layar gambar – lukis, tetapi juga berperan sebagai sutradara, manajer pemasaran, dan sekaligus produsernya. Kecuali pada naskah "Tahoen 1945", Bung Karno menawarkan peran sutradara kepada seorang warga Filipina yang bernama Nathan yang dikenalnya di Endeh (Lambert Giebels, 2001:200).

Sebagai pemimpin Monte Carlo, Bung Karno juga tidak sekedar berperan sebagai menulis naskah saja, tetapi juga sutradara, manajer pemasaran, dan sekaligus produsernya. Dan disamping itu juga masih melakukan berbagai macam pekerjaan seperti mencari – memilih para aktor – pelaku, membuat – setting panggung, merancang – melukis layar, dan lain-lain.

Barangkali ini salah satu hal yang membedakan antara ciri khas kelompok sandiwara jenis toneel - dengan kelompok teater modern. Pada kelompok teater modern, ada spesifikasi – peran khusus ditangani oleh masing-masing orang. Sementara, pada kelompok jenis sandiwara toneel, seorang pimpinan – produser, biasa merangkap sebagai penulis skrip, sutradara, serta menjadi manajer pemasaran dan keuangan.

Tetapi ada hal menarik tentang perbedaan yang cukup menonjol ketika Bung Karno memimpin sandiwara Kelimutu dengan ketika memimpin sandiwara Monte Carlo, terutama dalam penerapan naskah. Ketika di Endeh, Bung Karno menulis naskah-naskahnya hanya garis besarnya saja, kemudian disampaikan kepada kelompok pemain, lalu menetapkan siapa memegang peran apa – dan selanjutnya mereka disuruh menghafalkan dengan terus mengulang apa yang dikatakan oleh Bung Karno, serta menirukan contoh yang diberikannya (Lambert Giebels, 2001:200). Tetapi, ketika di Bengkulu, Bung Karno menyiapkan naskah secara lengkap seperti yang kita lihat pada teks naskah Rainbow, Chungking Djakarta, dan Koetkoetbi.

Meskipun Bung Karno dalam Monte Carlo menulis naskah secara lengkap, tetapi dalam pelaksanaannya tak jauh berbeda dengan ketika memimpin Kelimutu. Bung Karno tetap mendiktekan naskahnya kepada para pemain yang sudah dipilihnya dan disuruh menghafal terus menerus serta menirukan perkataan serta gerakan yang diberikannya.

Tampaknya, gaya sandiwara Monte Carlo pimpinan Bung Karno ini agak berbeda dengan gaya kelompok sandiwara komersial seperti Miss Riboet, Oreon, Dardanella, Komedi Bangsawan, Komedi Stamboel, dan sejenisnya, seperti yang digambarkan oleh Bakdi Soemanto sebagai kelompok yang mempertahankan jagad pikir kebudayaan oral. – karena cara bermain lebih loose, dan bebas dari segala patokan (Bakdi, 2001:266). Termasuk juga jenis sandiwara Ludrug gaya stamboel Jawi – sebagai kelanjutan dari bentuk Ludrug Besutan sebagaimana catatan Ki Soemadji A, yang pernah melacak sejarah kesenian Ludrug asal Jawa Timur (J.J. Ras, 1985: 311-318).

Juga ada perbedaan dalam hal gaya monolog. Dalam penulisan naskah karya Bung Karno, tidak terdapat monolog yang memberi peluang – ruang gerak pada pemain – aktor untuk berkominikasi – menyapa dengan audien – penontonnya seperti yang dilakukan gaya monolog dalam Ludrug, maupun Lenong Betawi. Gaya monolog dalam naskah – lakon Lenong Betawi diucapkan

pada permulaan adegan dengan tujuan memperkenalkan tokoh yang akan diperankan berikut situasi lingkungannya (Ninuk Kleden-Probonegoro, 1996:42).

Demikian juga dalam hal tema – lakon yang dipentaskan. Dalam Monte Carlo, Bung Karno mencoba menggabungkan – memasukkan unsur - konsep drama – teater modern dengan tetap menggunakan setting layar berdasarkan latar belakang tempat dan peristiwa kejadiannya. Berbeda dengan kosep dramateater modern yang menggunakan setting tak sekedar latar belakang, tetapi juga unsur yang membangun perkembangan sruktur dramatik lakon dari awal hingga akhir (Bakdi, 2001:268). Sementara, pada kelompoknya Miss Riboet yang bertahan hingga lima belas tahunan – dan Dardanella yang mampu bertahan hingga dua dekade, lebih mengedepankan gaya dalam bentuk nyanyian – lagulagu sindiran – sinis – dan penuh simbolik (Mohamad Nazri Ahmad, 2000:33).

Bung Karno dalam menggarap setting toneel – panggung, disamping menggunakan – menyiapkan berbagai macam layar gambar dan properti lainnya sesuai dengan latar belakang tempat dan peristiwa, juga menambahkan trik-trik – dengan teknik yang menyerupai peristiwa kejadiannya. Seperti teknik menggunakan lembaran zink (seng) – blik (kaleng), pasir, kerikil –batu-batuan, bubuk – zat peledak, dan lain-lain untuk menirukan suara gemuruh angin, hujan, petir, halilintar dan lain-lain. Bung Karno juga menggunakan peralatan electric dengan kabel-kabel stroom.

Dalam hal penulisan naskah, Bung Karno rupanya tidak mau sembarangan – asal-asalan saja. Bung Karno berusaha mempelajari berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sejarah, dan sastra – bahasa. Wawasan pengetahuan - referensi Bung Karno yang sangat luas itu juga menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dalam mengimplementasikan proses gagasangagasan - ide-ide kreatifnya.

Tanpa referensi, serta wawasan pengetahuan yang luas mungkin sulit bagi seorang Bung Karno dalam menciptakan ide-ide kreatif. Bagaimana Bung Karno mampu mengadaptasi – menginterpretasi film Franskenstein yang amat populer pada saat itu menjadi naskah Dr. Sjaitan – dan Koetkoetbi tanpa dukungan faktor empiris yang luas.

Demikian juga dengan naskah Rainbow (Poetri Kentjana Boelan). Tanpa wawasan pengetahuan sejarah, khususnya sejarah Bengkulu, sulitlah bagi Bung Karno mampu menuangkan cerita epik yang berbau historis dalam naskah tersebut. Mungkin saja, Bung Karno juga membaca Tambo Bangkahoeloe ketika akan menulis naskah Rainbow. Disamping itu, Bung Karno amat cerdas

menggiring alur cerita berbau roman sejarah yang penuh semangat patriotik – meskipun dalam cerita tokoh sentral yang romantis berakhir dengan tragis – "romantis membawa tragis" . Tetapi, bisa jadi, naskah Rainbow ini merupakan salah satu dari sekian naskah karya Bung Karno yang dapat dikategorisasikan kedalam karya sastra sejarah – atau tepatnya roman sejarah.

Dalam hal penyutradaraan, secara teoretis, seorang sutradara harus memiliki modal pengalaman, pengetahuan, berbakat pemimpin atau guru, kemampuan meyakinkan para aktor, serta pengetahuan psikologi. Demikian menurut catatan Kalam Hamidi, yang juga seorang aktor, penulis naskah, dan sekaligus sutradara drama dan teater (Kalam Hamidi, 2003: 40). Apa yang menjadi catatan tersebut, itu sudah dilakukan oleh seorang Bung Karno ketika menjadi sutradara dalam pementasan sandiwara Monte Carlo.

Sebagai sutradara, Bung Karno yang punya waktu luang banyak tentu saja akan melakukan pekerjaannya dengan serius. Dengan kata lain, Bung Karno jelas memberikan latihan – gemblengan terhadap para pemainnya. Dan tentu saja, sebelumnya Bung Karno telah melakukan seleksi para pemainnya untuk menentukan peran yang dengan tokohnya. Selanjutnya Bung Karno menyiapkan jadwal dan tempat latihannya, gladi resik, hingga persiapan pementasannya.

Bung Karno membutuhkan waktu latihan dua hingga tiga mingguan untuk melatih para pemainnya. Waktu latihan biasanya pada sore hari dan kadang malam hari. Tempat yang paling sering digunakan Bung Karno untuk melatih serta menggembleng para pemainnya adalah di rumah Manaf Sofiano, Kampoeng Djawa. Tetapi kadang-kadang Bung Karno menggunakan tempat latihan di rumah Demang Karim yang terletak di Berkas. Sedang untuk persiapan lakon Si Ketjil, Bung Karno melatihnya di rumahnya sendiri.

Bung Karno juga sangat teliti dalam urusan yang kecil-kecil, termasuk memeriksa kenyamanan dan keamanan lantai panggung yang akan digunakan oleh para pemain – seperti memeriksa kalau ada paku-paku yang membahayakan. Demikian cerita dari Pak Rustam Effendi meneruskan cerita dari ayahnya, Bachtiar Karim.

Kesuksesan pertunjukan Monte Carlo ternyata tidak hanya berimbas pada kesejahteran bagi para pemainnya saja, tetapi juga berimbas pada yang lainnya. Karena sebagian dari hasil pertunjukannya ternyata diamalkan untuk kepentingan sosial.

Sebagai pemimpin sandiwara toneel Monte Carlo yang sudah berpengalaman, Bung Karno menyadari, bahwa musik memegang peranan yang sangat penting. Tanpa illustrasi musik, pertunjukan seni jenis apapun takkan pernah berhasil – sukses. Oleh karenanya, dalam hal penataan musik, Bung Karno mempercayakan penuh kepada Manaf Sofiano yang memang piawai dalam memainkan alat musik piano maupun saxofon. Bahkan Manaf Sofiano dipercaya oleh Bung Karno sebagai bendaharanya.

Disamping itu, rupanya, Manaf Sofiano tidak hanya memegang jabatan sebagai bendahara dan penata musik saja, tetapi juga diberi peran utama oleh Bung Karno. Bahkan diantara para pemain Monte Carlo yang dianggap terbaik oleh Bung Karno adalah Manaf Sofiano. Dan Bung Karno dengan jujur telah memujinya sebagai seorang primadonna dalam pertunjukan Monte Carlo (Cindy Adams, 1966:206).

Kepiawaian Bung Karno sebagai produser – pimpinan sandiwara Monte Carlo boleh dibilang cukup mengagumkan – dan tentu saja membutuhkan pekerjaan yang rumit. Mulai dari merancang - menulis naskah - mencari pemain - menyeleksi pemain - membagi peran - merancang tonil - menyiapkan kain - melukis layar – menyiapkan properti - menyiapkan spanduk – penyebaran pamlet – percetakan - menyiapkan promosi dengan kendaraan keliling - menyiapkan tempat pentas - menyiapkan dana produksi – menyiapkan tiket – karcis - mengundang penonton - membuat jadual latihan - gladi resik hingga

jadual pementasan, dan lain-lain – semua berada dibawah tanggungjawab dan pengawasan Bung Karno.

Di Bengkulu, Inggit juga melakukan pekerjaan yang sam ketika di Endeh, yaitu sebagai penata rias. Bung Karno memilih Hanafi dan M. Zahari Thanie, serta Sjoufi, untuk memeran tokoh-tokoh perempuan dalam lakon-lakon pertunjukannya. Belakangan nama Hanafi ditambah dua huruf setelah bergabung dan menjadi orang dekat Bung Karno, sehingga namanya menjadi A.M. Hanafi – A.M adalah kepanjangan dari Anak Marhen. Bahkan setelah Bung Karno menjadi Presiden RI, A.M. Hanafi pun mendapat posisi yang tinggi, yaitu diangkat sebagai Duta Besar untuk Kuba. Resminya, A.M. Hanafi dilantik sebagai duta besar berkuasa penuh R.I untuk Republik Kuba di Havana pada tanggal 19 Desember 1963 (A.M. Hanafi, 1996: 22).

Sebagai sutradara, Bung Karno yang punya waktu luang banyak tentu saja akan melakukan pekerjaannya dengan serius. Dengan kata lain, Bung Karno jelas memberikan latihan – gemblengan terhadap para pemainnya. Dan tentu saja, sebelumnya Bung Karno telah melakukan seleksi para pemainnya untuk menentukan peran yang dengan tokohnya. Selanjutnya Bung Karno menyiapkan jadwal dan tempat latihannya, gladi resik, hingga persiapan pementasannya. Menurut narasumber, Bung Karno membutuhkan waktu latihan dua hingga tiga mingguan. Waktu latihan biasanya pada sore hari dan kadang malam hari.

Jauh hari sebelum pertunjukan, Bung Karno sudah menyebarkan pamflet yang promosinya sangat memikat para pembacanya. Isi pamfletnya selain mengundang rasa penasaran, juga memberikan informasi menarik serta menyertakan harga karcis – tiket tanda masuk.

Kemudian pada sore hari menjelang pertunjukannya, Bung Karno mengadakan programa keliling, yaitu mengarak para pemain yang akan tampil nanti malam - berkeliling kota Bengkulu dengan menyewa mobil.

Disamping, menyewa mobil untuk mengarak para pemain, Bung Karno juga menyewa gedung tempat pertunjukannya, yaitu gedung bioskop Royal Cinema dengan cara mengangsur (menyicil).

Sebagai seorang pemimpin yang memiliki proyeksi – pandangan jauh kedepan, Bung Karno juga amat menyadari arti pentingnya sebuah dokumen – arsip sebagai saksi bisu yang suatu saat akan bisa berbicara banyak tentang masa lampaunya. Oleh karenanya, Bung Karno menyimpan berbagai dokumen - arsip, terutama yang berkaitan dengan sandiwara toneel Monte Carlo. Beberapa

dokumen berupa gambar – photo yang tersisa sebagian masih dapat dilihat di Museum – Rumah Kediaman Bung Karno yang terletak di Anggut Atas Kota Bengkulu.

Pada acara pertunjukan, Bung Karno tidak menempatkan diri dibelakang layar, seperti halnya yang biasa dilakukan oleh para sutradara pada pertunjukan sandiwara Kethoprak maupun Ludrug. Sebaliknya, Bung Karno justru duduk di kursi barisan depan sejajar dengan para pembesar Belanda, elite pribumi, pengusaha – saudagar - orang-orang Tionghoa yang biasanya mengambil karcis *loge de luxe* (tempat duduk VIP).

DINAMIKA SEJARAH PELAYARAN ORANG BUTON KEPULAUAN TUKANG BESI

Ali Hadara

Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli sejarah maritim bahwa Buton merupakan salah satu dan enam etnik maritim yang paling dominan di Indonesia, di samping Bajau, Bugis, Makassar, Mandar, dan Madura (Hughes, 1984: 152; Southon, 1995: 5). Bahkan, Buton dikelompokkan sebagai salah satu' dan tiga kekuatan yang paling dinamis dan ekspansif dalam kegiatan pelayaran di Kawasan Timur Indonesia selain Bugis dan Makassar (James J. Fox dalam Southon, 1995: viii). Namun demikian jika ditelusuri lebih jauh dan mendalam ternyata mereka yang menjadi pelayar pelayar ulung di Buton terkonsentrasi di Kepulauan Tukang Besi yang kini telah menjadi Kabupaten Wakatobi (Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko).

Ligtvoet (1877) dalam Pim Schoorl (2003: 108) menjelaskan bahwa menurut Speelman, pada zamannya Pulau Binongko terkenal karena perahu yang dibuat disana yang disering dipersenjatai dengan sepasang lela dan beberapa senapan. Selanjutnya Schoorl (2003: 108-109) menjelaskan bahwa di dalam Militari Memori (1919) dilaporkan bahwa diperkirakan di Buton ada sekitar 300 perahu yang dipergunakan untuk pelayaran jarak jauh, 200 buah ada di Kepulauan Tukang Besi. Pada tahun 1967, di Tomia saja sudah terdapat 264 perahu, dan pada tahun 1981 di Wangi-Wangi tercatat 220 perahu. Laporan Kabupaten Buton Dalam Angka (1987: 273-274) bahwa pada tahun 1987 di Kepulauan Tukang Besi terdapat 593 buah perahu dan 1281 perahu lambo yang ada di Kabupaten Buton.

Jika program motorisasi telah mematikan dinamika pelayaran di Buton daratan, namun sebaliknya di Buton kepulauan (Kepulauan Tukang Besi) justru sebaliknya telah berhasil memacu dinamika pelayaran tradisional menjadi pelayaran modem. Kini semua perahu yang ada di Kepulauan Tukang Besi sudah diperlengkapi dengan mesin. Pada zaman Kesultanan Buton, semua kadie (desa) yang ada di Kepulauan Tukang Besi di jabatan Miantuu Mawi yang bertugas mengurus masalah kelautan, j niana tidak terdapat di kadie-kadie di Buton daratan.

Deskripsi di atas menunjukan bahwa sesungguhnya otak, tangan, dan kaki pelayaran di Buton terdapat di Kepulauan Tukang Besi. Karena itu julukan bahwa orang Buton sebagai pelayar-pelayar ulung hanya pantas diberikan kepada orang Kepulauan Tukang Besi. Dinamika pelayaran orang Kepulauan Tukang Besi telah berhasil memperkenalkan dan bahkan membesarkan nama Buton di dunia luar. Peranserta mereka di laut untuk kepentingan bangsa dan negara dapat ditelusuri terutama di masa-masa menjelang dan pasca kemerdekaan. Dinamika itu terbentuk karena factor letak geografi kepulauannya yang berada di antara Maluku di bagian timur dan Jawa di bagian barat, kondisi geologisnya yang tandus dan berbatu batu, ideologi gau satoto yang mengajarkan satunya kata dan perbuatan yang mengandung lima prinsip tara (tahan derita), turu (penurut, tidak suka melawan), toro (teguh pendirian), taha (berani), dan toto (jujur). Mereka berprinsip bahwa laut sebagai sumber kehidupan dan darat hanya sekedar tempat tinggal sementara. Semua factor tersebut berakumulasi menjadi satu kekuatan yang kemudian melahirkan dinamika pelayaran mereka.

DARI OMMELANNDEN BATAVIA KE PINGGIRAN JAKARTA: MONETISASI DAN INDIVIDUALISASI DALAM PERTANIAN BUAH DI WILAYAH JAGAKARSA 1930-1966

Asep Suryana

Jagakarsa, Lenteng Agung, dan Srengseng Sawah, yang pada awal abad ke-20 merupakan tiga kelurahan di Kecamatan Jagakarsa, pada tahun 1930-1966 adalah wilayah Pasar Minggu (onderdistrik pada era Hindia Belanda dan kecamatan setelah kemerdekaan). Seperti halnya Pasar Minggu, ketiga areal tersebut dikenal sebagai penghasil buah-buahan, jenis pertanian yang secara massal digeluti penduduk setempat sejak tahun 1950-an. Berbeda dengan areal di sekitar stasiun Pasar Minggu yang telah mengusahakan pertanian buah sejak awal abad ke-20, ketiga wilayah tadi justru berkembang setelah areal stasiun Pasar Minggu beralih fungsi, terkait dengan berubahnya fungsi penyangga kawasan ini terhadap pusat kota Jakarta (setelah liberalisasi ekonomi 1968). Bahkan, sampai akhir tahun 1980-an pun, tatkala kawasan sekitar stasiun Pasar Minggu telah kehilangan kebun buah-buahan, Srengseng, Jagakarsa, dan Lenteng Agung masih memproduksi jenis tanaman komersial ini.

Makalah ini berisikan sejarah sosial ekonomi pinggiran kota, dan dimaksudkan mengisi kosongnya studi sejarah kota yang selama ini selalu identik dengan pendekatan pusat kota. Wajar bila dengan dominannya pendekatan ini corak sejarah kota lebih bersifat monolitik dan kehilangan aspek dinamisnya. Ketegangan dan rekonsiliasi antar wilayah, utarnanya antara pusat dan pinggiran kota, cenderung diabaikan.

Makalah ini juga menawarkan pendekatan spesifik tentang pinggiran kota. Pinggiran kota se!ayaknya tidak dilihat sebagai entitas yang mandiri melainkan dipertalikan dengan pusat kota. Pusat kota dikonseptualisasikan memiliki pengaruh yang kuat terhadap dinamika pinggiran kota.

Sebaliknya, pinggiran kota pun ditempatkan sebagai penyangga atau pemasok pusat kota. Selanjutnya. pola hubungan pinggiran pusat kota yang terbentuk dan bersifat khas tersebut dipertalikan dengan konteks yang lebih luas. Akhirnya, agar diperoieh deskripsi detil yang lebih tajam dan lebih bermakna, gejala yang terjadi di pinggiran kota tadi dilihat sebagai konsekuensi integrasi secara bertahap wilayah ini terhadap pusat kota, penetrasi ekonorni pasar, dan sebagal dampak dan periferalisasi (transformasi menjadi wilayah periferi dan satu *center* tertentu).

POL!T!K ETIS DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT JAWA PADA AWAL ABAD XX

Baha'uddin, SS. M.Hum

Paper ini menjelaskan mengenai kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Kesehatan masyarakat merupakan sebuah aspek yang sangat kompleks karena tidak hanya berhubungan dengan faktor medis tetapi juga Iingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan po!itik. Oleh karena itu dalam menerapkan sebuah kebijakan kesehatan harus memperhatikan faktor-faktor itu. Apa yang terjadi pada abad ke-19 terhadap kesehatan masyarakat Jawa mencerminkan ketidakpahaman pemerintah Hindia Belanda terhadap permasalahan ini dan juga merupakan cerrnin dari politik diskriminasinya. Akibatnya, kebijakan itu hanya bersifat responsif terhadap penyebaran penyakit yang luar biasa di masyarakat serta hariya mementingken kelompok masyarakat minoritas. Fenomena mi menggambarkan bahwa sebenarnya ilmu kedokteran modern yang dibawa oleh bangsa Barat ml hanya untuk kepentingan militer mereka dan sehagai upaya untuk membentengi din dan penularan penyakit yang ada da masyarakat pniburni.

Pada awal ahad ke-20 mulai terdapat perubahan dalam kebijakan kesehatan kolonial terhadap kesehatan masyarakat Jawa. Perubahan itu terlihat pada munculnya lembaga pernerintah yang mengurusi masalah kesehatan masyarakat sehingga tindakantindakan dalam penanganan masalah kesehatan mulai "sistematis". Perubahan lainnya adalah upaya untuk memperluas akses masyarakat pnibumi untuk mendapatkan perawatan kuratif dari rumah sakit-rumah sakit. Oleh karena itulah, berhubungan dengan kebijakan politik etis, kemudian diterapkan kebijakan subsidi kesehatan yang pada awalnya berorientasi pada kuantitas rumah sakit.

Dämpak politik etis terhadap bidang ekonomi dan pendidikan telah banyak dilakukan oteh sejarawan baik dalam maupun luar negeni, namun dalam bidang kesehatan masyarakat belum banyak sejarawan yang mengkajinya. Furnivall dan juga Boomgaard dengan jelas rnengakui bahwa terdapat perhatian yang lebih serius dan pemerintah kolonial Belanda terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya di Jawa, mulai awal abad ke-20. Kasus-kasus epidemi penyakit menular mematikan seperti kolera dan malaria yang terjadi dihampir semua wilayah di Pulau Jawa jelas mengindikasikan bahwa terdapat hal yang salah dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Mungkin atas dasar itu Furnivall menyatakan bahwa perhatian terhadap kesehatan masyarakat tersebut merupakan salah satu dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Pada awal tahun 1920-an, kebijakan perluasan ini dipandang tidak membantu akses masyarakat kebanyakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Akhirnya kebijakan subsidi pada periode ini diubah metodenya dan tujuannya. Kebijakan subsidi pada peniode ini berorientasi kepada pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin.

DARI DEKOLONISASI KE NEO KOLONIALISME; KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN MIGAS NEGARA SEJAK MASA KOLONIAL HINGGA REFORMASI.

Dr. Bambang Sulistyo

Sejak dasa warsa pertama abad 20 hingga Reformasi kebijakan negara atas tenaga kerja mengalami perubahan yang kontradiktif. Pada masa kolonial negara memihak pengusaha pertambangan, setelah kemerdekaan bersikap mendukung pekerja, tetapi setelah rezim Orde Baru, negara kembali memihak pengusaha pertambangan migas asing. Pada masa kolonial pekerja tambang diberi kebebasan berserikat, hingga masa Orde Lama. Masa ini merupakan periode de kolonisasi. Gerakan pekerja dengan serikat sekerjanya dengan dukungan negara berjuang melakukan berbagai upaya nasionalisasi pertambangan asing. Jadi pekerja dan negara menolak globalisasi atau bersifat anti Asing/Barat. Hasilnya gerakan buruh dapat menekan Bataafsche Petroleum Maskapij/Sheel menjual asetnya kepada Indonesia dengan harga murah, berdirilah Pertamina Akan tetapi setelah Orde Baru gerakan pekerja (buruh) dilarang oleh negara, perusahaan tambang Asing masuk kembali ke Indonesia sehingga berkembang kembali kolonialisme dalam bentuk baru (neo kolonialisme).

Sejak masa Orde Baru pekerja Indonesia terbagi atas dua lapisan yakni karyawan yang merupakan pekerja tetap bersikap loyal kepada majikannya yang berada di lnggris, Amerika, Australia dan lain-lain. Dengan kata lain buruh tetap/karyawan Indonesia telah kehilangan nasionalisme. Namun sebagian besar buruh Indonesia pada kelas bawah hidup sebagai buruh kontraktor, yang diciptakan pemerintah Orde Baru. Buruh ini selalu gelisah dan merasa di eksploitasi tanpa perlakuan yang adil. Hal ini merupakan kondisi yang irronis, karena pada masa kolonial sistem kontrak telah dilarang, karena sangat merugikan buruh, tetapi dikembangkan secara meluas oleh negara pada masa Reformasi.

Menurunnya peranan politik buruh itu disertal dengan merosotnya nasionalisme dan penguasaan produk minyak oleh negara (Indonesia) Apabila pada masa kolonial hanya 10 % produk minyak yang dipasarkan di dalam negeri, setelah masa kemerdekaan hanya sekitar 10 % yang dikuasai negara, dan pada awal Orde Baru hampir 80 % produk minyak di kuasai negara, tetapi setelah itu produk migas yang dikuasai negara merosot tajam. Sebagian besar produk migas Indonesia dinikmati luar negeri. dengan pembagian 60 % Indonesia dan 40 % Asing, pada masa Reformasi Pertamina hanya menguasai sumur-sumur tua.

Artikel ini akan memfokuskan perhatian pada kondisi kehidupan buruh dan politik buruh terutama pada Bataafsche Petroleum Maatschappij/Sheel yang kemudian menjadi PERTAMINA. Pembahasan diawali sejak masa kolonial hingga reformasi. Buruh minyak pada umumnya adalah migran sehingga memiliki karakter khas, tidak terkait langsung dengan komunitas asalnya.

Sumber yang digunakan adalah sumber primer, sekunder dan wawancara.

KARAKTERISTIK ETNIK DAN HUBUNGAN ANTAR ETNIK: KASUS DI KABUPATEN SUMENEP MADURA

Drs. Bambang Samsu B, M.Si

Gambaran tentang karakteristik etnik orang Madura, seperti yang lazim dikemukakan oleh kelompok etnik lain banyak dipengaruhi oleh pandangan stereotip, yakni bertempramen keras, emosional, suka bersaing, bangga dan sebagainya seperti halnya disimbolkan oleh sapi jantan yang menjadi kegemaran orang Madura untuk memeliharanya (De Jonge, 1990: 29). Berdasarkan realitas sering gambaran suatu kelompok dan luar kelompoknya itu dipengaruhi oleh pandangan etnosentrisme, sehingga bersifat stereotip yang negatif. Sebagai misal, orang Madura selama ini dikenal sebagai orang yang keras, mudah tersinggung, suka membunuh, carok, pendendam, tidak bertolerasi terhadap orang lain serta fanatis terhadap agama.

Dalam kehidupan kolektif, terutama ketika orang Madura bertempat tinggai di daerah lain, seperti di Sampit, Sambas, Ambon, atau bahkan di kota-kota besar lain di Indonesia, senngkali dianggap menjadi biang keributan. Dan berbagai peiistiwa konflik honsontal di berbagai daerah tersebut yang pada dekade terakhir mi senngkafi mencuat ke permukaan, selalu dikaitkan dengan sifat "kekerasan" yang melekat pada din orang Madura.

Gambaran ini tentunya jauh berbeda dari pandangan atau citra diri mereka sendici. Menurut orang Madura, mereka lebth mementingkan aspek kesopanan, kehormatan dan nilai-nilai keislaman sebagai landasan dalam berpikir dan bertingkah laku. Harmonisasi sos yang dibangun berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks m titik tekan dan tulisan ml adalah mengungkapkan dan sisi yang berbeda, yakni bagaimana orang Madura dengan berbagai karakteristiknya itu berhubungan dengan kelompok etnik lain di wilayah kebudayaannya (cultur area) sendin, di Madura.

Sebagai kelompok mayoritas yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumenep, orang Madura juga beninteraksi dengan etnik-etnik lain seperti orang Jawa, orang Arab maupun orang China. Hubungan sosial yang teqalin secara terus menerus, membentuk berbagai dimensi struktural dalam kehidupan masyarakat. Walaupun masyarakat itu terbagi ke dalam beberapa kesatuan yang terpisah namun hidup secara bersama. Dalam kehidupan bersama ini beberapa identitas yang khas dan dimensi kultural itu tetap tampak sesuai dengan identitas masing-masing kelompok etnik yang saling melakukan hubungan terlibat.

Hubungan antara orang Madura dengan orang Jawa di Kabupaten Sumenep tampak harmonis, karena selama ini tidak pernah terjadi konflik sosial diantara keduanya. Etos budaya orang Jawa yang lentur dan lemah lembut (halus) temyata dapat beradaptasi, menyatu dan diterima oieh masyarakat Madura yang sebenarnya dalam banyak hal berbeda dengan orang Jawa. Kemudian hubungan antara orang Madura dengan orang Arab juga harmonis. Orang Arab mendapat kedudukan sosial yang lebih tinggi di mata orang Madura karena dianggap keturunan langsung dan Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga pantas untuk dihormati. Sedangkan hubungan orang Madura dengan orang China lebih dilandasi oleh latar belakang histons bahwa ketika masa kerajaan orang China selalu mendapatkan kedudukan elite dalam pemenntahan kerajaan. Bahkan masjid

Agung di kota Sumenep, arsitektur dan ornamentasinya bergaya klenteng. Selain itu, komunitas China dalam kehidupan sehari han dapat menyesuaikan diri secara total dengan orang Madura balk da)am berbahasa maupun beragama. Seperti yang terdapat di kecamatan Dongkek, orang China di sana sehari-hari berbahasa Madura dan mayoritas muslim.

Dan apa yang telah terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnys adaptasi budaya adalah merupakan kunci atas terwujudnya harmonisasi sosial. Terjadinya disharmonisasi hubungan antar etnik sehingga menimbulkan konflik sosial di berbagai tempat dapat dijelaskan dengan pendekatan budaya. Penggunaan pendekatan budaya dalam mengkaji hubungan antara orang Madura dengan kelompok etnik lain ini, selanjutnya dapat dijadikan model dalam mengkaji pola-pola hubungan antar etnik yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PUSAT - DAERAH DALAM PERBENTURAN POLITIK DAN EKONOMI (KONFLIK ETNIK DAN FORMASI IDENTITAS ORANG PAKPAK, DAIRI, SUMATERA UTARA DI TAHUN 1950-AN)

Budi Agustono

Suku Pakpak adalah salah satu kelompok etnik yang ada di Sumatera Utara. Suku Pakpak mengklaim din sebagai penduduk ash dan pemilik tanah ulayat di wilayah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sejak awal abad ke dua puluh Darn menjadi wilayah ekspansi pendatang yang kemudian menghegemoni kehidupan politik, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Hegemoni politik, ekonomi, dan budaya pendatang mi menyebabkan melemahnya identitas kesukuan orang Pakpak. Di tahun 1958 meletus pemberontakan daerah. Pemberontakan daerah merupakan pembangkangan daerah atas kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat yang mengabaikan kepentingan daerah. Di Sumatera Utara, pemimpin pemberontakan daerah adalah Maludin Simbolon. Jika di aras nasional pemberontakan daerah ditafsir sebagai letupan ketidaksenangan daerah atas kebijakan politik dan ekonomi pusat, maka dalam perpektif lokal Dairi, pemberontakan daerah dibaca sebagai gerakan loyal dan tidak loyal terhadap Republik. Orang Pakpak tidak memberikan dukungan kepada pemberontak dan melihat pemimpin pemberontakan di Sumatera Utara, Kolonel Maludin Simbolon, sebagai representasi suku Batak Toba yang mendominasi berbagai aspek kehidupan di Dairi. Mengetahui pemimpin pemberontak daerah di Sumatera Utara seorang Batak Toba, suku Pakpak menolak memberi dukungan terhadap Maludin Simbolon. Sementara itu, kaum pemberontak, meski secara sembunyi sembunyi, mendapat dukungan dan simpati dan suku pendatang Dairi, mengetahui orang Pakpak tidak memberi dukungan terhadap pemberontakan dan menambatkan kesetiannya kepada Republik, melancarkan ancaman dan teror, di bahkan tengah berkecamuknya pemberontakan daerah di tahun 1958 itu pecah konflik etnik antara etnik pendatang dan suku Pakpak. Konflik etnik itu berujung denganjatuhnya korban jiwa di pihak suku Pakpak.

Sewaktu meletus pemberontakan di Dairi sebagai akibat dan benturan politik dan ekonomi antara pusat daerah itu, orang Pakpak mulai melakukan konsolidasi dan merekonstruksi identitas etniknya. Para elite etnik mulai menyoal apa artinya menjadi Pakpak dan mengapa Pakpak kehilangan identitas etniknya. Bersamaan dengan itu, tanpa diduga elite Pakpak mendapat kekuasaan yang merupakan blessing in disguise dan pemberontakan daerah itu, mulai memobilisasi sentimen kesukuan, melakukan konsolidasi dan memperkuat identitas kelompok, membangkitkan kesadaran kesukuan, dan melawan hegemom politik, ekonomi, dan budaya pendatang di tahun 1950-an. Inilah awal formasi identitas kesukuan orang Pakpak. Sampai saat mi pun orang Pakpak masih terus memperkuat identitas etmknya dan terus menerus memperkuat dan menmgkatkan kesadaran kesukuannya di tengah mengakarnya dominasi budaya pendatang di wilayah ulayatnya sendini, Dairi.

GENDER DAN PERUBAHAN EKONOMI : PERANAN PEREMPUAN DALAM INDUSTRI BATIK DI YOGYAKARTA 1900-1965

Chusnul Hayati

Pada awalnya pembuatan batik dilaksanakan oleh putri-putri kraton sebagai pengisi waktu luang. Putri kraton melakukan pekerjaan membatik dengan cara menutup permukaan kain yang sudah diberi pola dengan lilin, sedang proses pewarnaan dan fininshing dilakukan oleh abdi dalem. Ketrampilan membatik yang dirnihiki oleh putri bangsawan dan para abdi dalem kemudian melahirkan potensi ekonorni yang mengubah sifat batik dan ekspresi seni menjadi sumber ekonomi masyarakat. Membatik berkembang menjadi kegiatan industri rurnah tangga yang dikelola oleh keluarga kraton dan abdi dalem. Perusahaan batik kemudian berkembang di dalarn kota seperti di kampung Kauman, Prawirataman, Karangkajen, Brantakusuman, Mantrijeron, Tugu, maupun di luar kota seperti di Miangi, Kota Gede, Bantul, dan Kulon Progo.

Kemunduran kesejahteraan masyarakat yang dialami oleh masyarakat bumi putera sejak awal abad ke-19, baik di kalangan bangsawan maupun rakyat kebanyakan, mendorong perempuan untuk menekuni kerajinan batik menjadi sumber penghasilan. Bahkan pada akhir abad ke-18, Gusti Kanjeng Ratu Ageng (1735-1803) tejah aktif dalam perdagangan, khususnya beras dan kain batik. Ia adalah permaisuri Sultan Hamengkubuwana I dan nenek P. Diponegoro yang bertempat tinggal di Tegalreja.

Intervensi politik dan ekonomi Belanda yang semakin intensif pada abad ke-19 telah mengakibatkan kondisi ekonomi rakyat semakin buruk. Di kalangan kaum bangsawan, kesulitan ekonomi dan besamya pengeluaran mengakibatkan warga istana Surakarta dan Yogyakarta terhibat hutang dalam jurnlah sangat banyak. Di Yogyakarta situasi keuangan para bangsawan jauh lebih sulit dan pada di Surakarta, antara lain karena dampak negatif Perang Diponegoro (1825-1830). Banyak bangsawan terjebak hutang, baik kepada pemerintah maupun Cina. Kondisi ini mendorong perempuan memanfaatkan peluang dan ketrampilan yang dimiliki dengan mengembangkan industri dan perdagangan batik. Ketika kaum laki-laki menghadapi kesuhitan ekonomi, perempuan tampil menyelamatkan ekonomi keluarga sernentara laki-laki menegakkan status sosialnya. Hal ini disebabkan adanya nilai yang menganggap pekerjaan sebagai pengusaha pedagang lebih rendah derajadnya dan pada sebagai pejabat kerajaan, sehingga laki-laki bangsawan tidak akan terjun ke dunia bisnis, tetapi istri merekalah yang melakukan dengan cara yang terhormat.

Peralihan ke bentuk industri rnengakibatkan batik mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Perempuan menjadi sumberdaya ekonomi yang sangat berarti dalam industri dan perdagangan batik. Setelah batik berkembang menjadi hasil industri yang diperdagangkan, batik menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

Dinamika gender dalam perubahan ekonomi, khusunya daham industri batik, yang terjadi sejak sekitar 1900-an menarik untuk dikaji. Pada Perang Dunia I terjadi penurunan produksi batik, tetapi sesudah perang usai situasi perdagangan batik mengahami perbaikan. Di jahan-jalan, stasiun, di dalam kereta api atau bis-bis di Yogyakarta ditemui banyak perempuan yang membawa batik. Selama pendudukan Jepang dan revolusi terjadi penurunan tetapi setejah berdininya Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada tahun 1949 berkembang pesat. Pada sekitar tahun 1960-an batik tidak terbatas hanya menjadi bahan sandang saja, tetapi dalam fungsi yang lebih luas.

PEREBUTAN PULAU DAN LAUT: PEREBUTAN HEGEMONI POLITIK DAN EKONOMI ANTARA KEKUATAN PORTUGIS, BELANDA DAN KEKUASAAN PRIBUMI DI LAUT SAWU ABAD XVII-XIX

Didik Pradjoko, M.Hum

Perkembangan dinamika politik dan ekonomi di Nusantara sejak abad XVI Masehi diwarnai oleh penetrasi bangsa Barat/Eropa, akibat kedatangan bangsa Portugis pada awal abad XVI, kemudian disusul oleh kedatangan armada Belanda dan Inggris yang dating pada akhir abad ke-16. Kedatangan armada dagang bangsa Barat mi telah membuat perubahan peta politik dan ekonomi di Nusantara, ketika dengan alasan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, mereka merebut pelabuhan pelabuhan penting di Nusantara sebagai batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara.

Proses perebutan hegemoni politik dan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda mi tidak berhenti bahkan sampai abad ke-19. sebagai dampak penetrasi colonial ini menimbulkan resistensi/perlawanan dan para penguasa pribumi mulai dan Kesultanan Aceh, 'Kerajaan mataram Islam, Kesultanan Gowa, Ternate, Tidore dan para penguasa local di Bali, Lombok dan wilayah Nusa Tenggara Timur. Upaya perlawanan dan para penguasa pribumi kadangkala dapat mengalahkan kekuatan Eropa untuk sementara waktu, namun pada akhimya kekuatan pribumi menghadapi kekalahan melawan kekuatan Eropa terutama Belanda.

Di antara wilayah yang dijadikan arena perebutan hegemoni politik dan ekonomi oleh Bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda adalah pulau-pulau yang terletak di kawasan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-17 sampai abad ke-19. Daerah ini seringkali pada masa kolonial sampai saat ini selalu diposisikan sebagai daerah pinggiran (pheriphery) yang tidak berkembang dan tidak dianggap penting. Pada saat yang sama banyak kajian sejarah yang juga kurang memperhatikan dinamika masvarakat di sekitar Laut Sawu pada masa lalu. Wilayah yang dilingkupi oleh Laut Sawu mi terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Sawu, Roti, Timor, Solor, Adonara, Lembata, Alor dan pulau-pulau kecil lainnya. Sepertinya wilayah tersebut kurang berkembang dan dinamika politik dan ekonominya dianggap tidak terlalu penting dibandingkan dengan wiiayah Jawa atau Sumatera.

Dari hasil rekonstruksi sejarah yang penulis lakukan dalam penelitian awal in temyata sudah sejak abad ke-16 wilayah sekitar Laut Sawu ini telah menjadi ajang perebutan hegemoni antara Portugis, Belanda dan kekuatan pribumi yang berakhir dengan kekalahan penguasa pribumi dan juga kekalahan bagi Portugis yang terpaksa tersingkir ke bagian timur Pulau Timor. Namun fakta sejarah juga menunjukkan bahwa sampai abad ke- 19, Belanda belum mampu mengontrol keseluruhan wiiayah tersebut. Perjanjian transfer kekuasaan dan penguasa Portugis di Dili, Timor bagian timur kepada Belanda tahun 1854 atas pulau-puiau di laut Sawu (Fiores, Adonara, Solor, Lembata, Pantar, Alor dan Timor Barat) bukaniah tanda bahwa Portugis teiah menguasai wilayah tersebut, melainkan upayanya untuk mengatasi perlawanan kerajaan Larantuka atau orang Larantuquieros (Portugis Hitam) dan para penguasa lokal di Timor Barat yang nyatanyata masih merdeka atas wilayah kekuasaannya.

Selain itu penjualan wilayah ini senilai 200.000 Guilders oleh Gubernur Portugis di Dili pada pertengahan abad ke-19 kepada Pemerintah Belanda, yang barn dibayar 80.000 Guilders oleh Belanda dimaksudkan agar Belanda tidak melalukan ekspansinya sampai Timor bagian timur. Penjualan wilayah ini merupakan tindakan sewenangwenang Portugis yang memang tidak pemah mampu menguasai wilayah di sekitar Laut Sawu.

STRATEGI PERTAHANAN NAPOLEON BONAPARTE DI JAWA (1810 – 1811)

Djoko Marihandono

Napoleon Bonaparte memberikan instruksi kepada Herman Willem Daendels sebelum ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Jawa, yakni: Mempertahankan pulau Jawa selama mungkin dan serangan Inggris dan memperbaiki sistem administrasi pemerintahan. Untuk menjalankan kedua instruksi itu, Daendels menerima 4 surat keputusan, yang disampaikan oleh Raja Belanda Louis, setelah berkonsultasi dengan kakaknya Napoleon Bonaparte di Paris.

Dalam menjalankan instruksi yang pertama. Daendels membangun dua pangkalari armada laut di ujung barat pu]au Jawa, yaitu di Teluk Meeuwen (Ujung Kulon) dan di Timur , yaitu di Surabaya. Namun, strategi pertahanan laut yang direncanakan oleh Daendels gagal dilakukan, karena pangkalan armada lau di Teluk Meeuwen telah dihancurkan oleb inggris sebelum pangkalan itu selesai dibangun, dan beherapa sisa armada perang yang dibawa oleh Laksamana Buyskess dan Belanda dirampas oleh kapal perang Inggris.

Selanjutnya, untuk mempertahankan pulau Jawa, Daendeis menguhah strateginya dengan melakukan strategi pertahanan darat, khususnya setelab- ia mendengar kabar bahwa Kolonci Filz, Komandan Militer di Ambon menyerah tanpa syarat kepada Inggris (Kapten Tucker) pada tanggal 18 Februari 1810.

Untuk memperkuat pertahanan di Jawa, Daendels membangun beberapa benteng pertahanan dan menerapkan sistem pertahanan berlapis. Hal mi terutama setelah perintah dan Napoleon tiba di Batavia bahwa diperkirakan pasukan Inggris akan mendarat di pantai Cilincing yang berjarak 2 lieu (1 lieu 4 kiometer). Perintah mi dikeluarkan oleh Napoleon setelah kaisar Prancis mi menerima laporan ternang kondisi pertahanan Batavia dan perhitungan strategi militernya yang menduga bahwa d paling mungkin didarati adalah pantai Cilincing. Oleh karena itu Daendels memutuskan untuk mengisolir pantai mi agar musuh yang bisa mendarat tidak mampu bergerak lebih lanjut.

Setelah isolasi Cilincing, pertahanan lapis pertarna adalah pertahanan di Weltevreden. Lapis kedua berada di benteng Meester Cornelis, dan lapis ketiga berada di Buitenzorg. Struktur militer di Jawa disesuaikan dengan struktur Grande Arniée Prancis, seperti dilaporkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Brigadir Jenderal von Gutzlaw, yang diangl sejak tanggal 11 Maret 1811.

Bagaimana Daendels menerapkan strategi pertahanan darat Napoleon Bonaparte akan dibahas dalam makalah ini. Makalah ini juga akan membahas tentang fungsi benteng di Weltevreden, Meester Cornelis, dan Buitenzorg, bersama kesatuan pasukan yang mempertahankannya.

MENJADI KOTA DAN KEBUDAYAAN INDONESIA BARU

Djoko Suryo

Sebagai pusat komunitas sosial dan kultural kota menempati kedudukan penting dalam dinamika kebudayaan di Indonesia. Hubungan interaktif dan dinamis antara keduanya pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Dinamika kehidupan kota pada hakekatnya mempengaruhi dinamika kehidupan kehudayaan dan demikian juga ehaliknya. Peijalanan sejarab di Indonesia menunjukkaji hahwa semenjak da masa ..jwal kelahiran kota-kota maritim dan agraris atau kota-kota perdagangan dan kota-kota istana pada masa Indonesia lama, sampai dengan masa terbentuknya kota-kota kolonial dan kota-kota modern pada masa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan, kota-kota di Indonesia secara dinamis telah mernegang peran terkemuka dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja sebagai pusat politik dan administrasi pemerintahan, perekonomian dan kehidupan masyarakat kota, tetapi juga sebagai pusat berlangsungnya proses Konvergensi transformasi dan konfigurasi berbagai unsur kebudayaan luar dan local di ndoncsia. Dengan melacak tiga fase peruhahan dan perkembangan kota di Indonesia tersebut karangan singkat ini bermaksud ingin menyimak proses transformasi dan konfigurasi kebudayaan masyarakat Indonesia lama ke kebudayaan masyarakat Indonesia baru yang berlangsung secara dinamis dan integratif di pusat-pusat perkotaan !udonesia Selain itu, ingin disimak pula tentang bagaimanakah peran kota-kota Indonesia pada masa kini dalam dinamika kebudayaan mutakhir dan global di Indonesia, dengan berbagai bentuk ekspresi, akiualisasi, dan simbolisasi kulturalnya, yang dapat di pandang sehagai salah satu ciri penting da kota dan kehudayaan Indonesia baru.

Diharapkan dengan melacak beberapa segi dinamika kota-kota di Indonesia dan kebudayaannya dari perspektif sejarah akan dapat dipahami tentang dinamika nasyarakat dan kebudayaan Indonesia pada masa kini

PERANAN INGATAN DI DALAM PENGENALAN PERISTIWA-PERISTIWA SEJARAH

Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti

Sebagian dari kita dikaruniai dengan daya ingatan yang kuat - semacam photographic memory – tentang bermacam peristiwa yang kita jalani selama hidup kita. Unsur inilah yang dimanfaatkan di dalam kegiatan pengungkapan fakta-fakta sejarah yang dilakukan di bawah kategori oral history. Pada sebagian kecil dari kelompok ini dijumpai mereka yang mampu membuka kenangan sejarah sampai ke masa balita, terutama periode pra-TK. Berlimpahnya bahan-bahan rekaman sejarah moderen yaitu di dalam bentuk: foto-foto, surat-surat, dokumen-dokumen resmi, rekaman lagu-lagu, dan buku-buku, turut memperkaya kemampuan perorangan tadi. Tapi pada akhirnya, yang paling bermanfaat di dalam pengungkapan fakta-fakta sejarah pada tingkatan perorangan ini adalah bakat yang khas untuk bersikap observant terhadap macam-macam fakta di sekeliling kita. Pengalaman saya pribadi mengungkapkan, bagaimana sikap observant ini berlaku bukan hanya buat hal-hal yang mengejutkan, tapi juga hal-hal yang menyenangkan; bahkan hal-hal yang kecil-kecil tapi menarik. Yang lain lagi: sikap observant tersebut sangat dibantu oleh kegemaran kita untuk ngobrol, karena kegiatan ini merupakan olah pikir pertama dari pengamatan kita. Apa yang saya temui ini akan saya tuliskan di dalam sebuah uraian pribadi, yang dimulai dari sekitar tahun 1943, yang meliputi beberapa peristiwa sejarah yang saya nilai penting di dalam mengenali pengalaman sejarah Indonesia.

KAIN KEBAYA DAN ROK: PEREMPUAN DI YOGYAKARTA PADA AWAL ABAD XX

Dwi Ratna Nurhajarini, M. Hum

Pakaian sebagai kebutuhan dasar manusia sudah dikenal masyarakat sejak jaman dahulu. Dengan begitu, pakaian mempunyai sejarah yang panjang. Berpakaian sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis untuk melindingi tubuh dari udara panas, dingin, dan gigitan serangga. Namun berpakaian juga terkait dengan adat istiadat, pandangan hidup, status dan juga identitas diri atau kelompok. Pakaian dengan demikian merupakan salah satu penampilan lahiriah yang jelas untuk membedakan penduduk satu-satu kelompok dengan lainnya atau untuk menyamakan diri dengan kelompok lain (Jennifer Craik, 1995:5).

Terkait dengan itu tulisan ini membahas tentang perubahan gaya pakaian perempuan di kotaYogyakarta pada awal abad XX. Permasalahan pokok yang diangkat adalah sejauh manakah perubahan yang terjadi di Yogyakarta berpengaruh terhadap gaya berpakaian perempuan di Yogyakarta, dan seperti apakah tampilan pakaian itu?.

Perubahan sosial politik yang terjadi di Yogyakarta awal abad XX mendorong perempuan untuk maju dan tampil di depan umum. Pendidikan modern bagi perempuan yang diperkenalkan secara luas sejak abad XX memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perempuan, khususnya perempuan golongan menengah ke atas. Melalui pendidikan, perempuan dapat berperan dalam pergerakan nasional dan perjuangan bangsa. Priyayi intelektual yang lahir dari lembaga pendidikan Barat, muncul sebagai tokoh yang membawa ide-ide kemajuan. Dalam memainkan peranan tersebut mereka menjadi orang baru, yang memerlukan identitas dan simbol-simbol baru untuk mengekspresikan dirinya. Identitas dan simbol yang mereka pakai tercermin dalam gaya hidupnya, antara lain melalui cara berpakaian termasuk atribut yang menyertainya seperti sepatu, kaos kaki, gaya rambut, dan tas.

Penerimaan pakaian Barat sebagai baju sekolah untuk para perempuan dimulai dari gadis-gadis (puteri) keraton. Kemudian diikuti perempuan atau gadis-gadis pribumi di luar tembok keraton atau di luar rumah bangsawan. Perempuan dewasa yang memakai rok Barat untuk acara di luar "dunia sekolah" baru mulai pada tahun 1940-an. Rok Barat dipakai para suster terkait dengan tugas keagamaan yang diembannya.Dan model pakaian yang tadinya dianggap tabu dikenakan oleh para perempuan, namun pada masa perjuangan kemerdekaan model itu tampil dengan gagahnya, yakni celana panjang. Masa itu juga ditandai dengan demam seragam di kalangan kaum muda.

Dengan demikian perubahan kostum tidak hanya berkaitan dengan dunia mode semata, karena kostum atau pakaian juga menggambarkan transisi dalam memahami diri, masyarakat dan juga bangsa. Pakaian dengan demikian disamping berperan dalam menentukan identitas dan citra seseorang, juga mencerminkan status, hierarkhi, jender, dan merupakan ekspresi cara hidup tertentu. Pakaian juga mencerminkan sejarah, hubungan kekuasaan, perbedaan pandangan politik, religi, serta menunjukkan penyebaran komoditi dagang dan ide-idenya.

KESENIAN SEBAGAI PANTULAN PERUBAHAN SOSIAL

Edi Sedyawati

Hubungan antara wujud ekspresi seni dan kondisi serta dinamika sosial sebenarnya dapat dilihat dalam keterkaitan yang saling mempengaruhi. Berbagai kajian sejarah kesenian dengan ancangan atau pendekatan ilmu sosial menunjukkan hal itu. Yang paling menonjol dalam studi-studi seperti itu adalah pemaparan fakta mengenai terjadinya perubahan arah perkembangan atupun selera terhadap gaya seni yang disebabkan oleh tampilnya kelompok masyarakat tertentu sebagai penguasa yang antara lain menggerakan perubahan budaya. Disamping itu juga terdapat kajian tentang keaneka-ragaman kelompok sosial yang masing-masing punya selera dan orientasinya tersendiri dalam membina kesenian. Kelompok masyarakat itu dapat hidup berdampingan, dan dengan demikian aneka gaya dan fungsi seni dapat pula saling berdampingan di dalam suatu masyarakat besar.

Kajian yang lebih langka adalah yang ditinjau dari arah sebaliknya, yaitu bagaimana suatu gaya seni yang sudah ada memberi pengaruh kepada manusia dalam kelompok yang berbeda-beda. Ada satu aspek dari arah penglihatan ini, yang lebih sering tampil dalam kajian, yaitu tentang bagaimana suatu inovasi individual kemudian menanamkan pengaruh kepada kelompok-kelompok yang mengambilnya sebagai salah satu identitas kelompoknya.

Dengan kata lain, karya-karya seni dapat dilihat sebagai pantulan kondisi atau perubahan sosial, namun juga karya kesenian-pun dapat mempengaruhi atau mendukung perubahan sosial.

SEJARAH, SASTRA, DAN IMAJINASI SEBUAH DEKONSTRUKSI

Drs. Fadlillah. M.Si.

Dapatkah sejarah hadir di masa sekarang dan masa depan tanpa imajinasi dan teks? Seandainya sejarah sebagai teks dalam pikiran, kehidupan, dan kebudayaan bagaimana kehadirannya (bagaimana kekuasaan terhadap sejarah). Fakta dan data adalah sejarah, akan tetapi ketika ia tuliskan (dihadirkan) mungkinkah Ia akan dapat melepaskan diri dari fiksi. Benarkah fakta (baca: sejarah) yang dihadirkan adalah murni fakta, sebaliknya benarkah fiksi (baca: sastra) yang dihadirkan adalah murni fiksi?

Agaknya mungkin perlu didekonstruksi epistemologi sejarah, yang tampaknya tidak dapat dihindari pada masa post-modern ini. Kalau sejarah merupakan teks maka pada sisi yang bersamaan ia merupakan tanda, simbol, ikon, dan indeksikal dalam padangan semiotik. Sebagai teks, bagaimana ia berhubungan dalam interteks yang tidak linear. Dalam hal ini akan dapat dipahami bagaimana pentingnya sastra sebagai teks dalam melawan lupa sejarah. Dengan demikian, pada perubahan paradigma ilmu pengetahuan pada hari ini, agaknya perlu dipertanyakan kembali paradigma kualitatif positivisme dalam bias orientalistik.

Kata kunci : fakta, fiksi dan teks

PERTUMBUHAN KOTA JEMBER DAN MUNCULNYA BUDAYA PANDHALUNGAN

Drs. Edy Burhan Arifin SU

Di antara kota-kota di karesidenan Besuki pada desenia ke tujuh abad XIX sampai awal abad XX, kota yang paling menarik pertumbuhannya adalah kota Jember. Kota ini semula sebagai kota kecil yang sepi dan terisolir dan statusnya sebagai salah satu distrik dari regentshap Bondowoso. Dalam waktu yang relatif singkat kota Jember menjadi kota yang paling besar dibanding dengan kabupaten-kabupaten di Karesidenan Besuki. Adapun penyebab pertumbuhan kota Jember erat kaitannya dengan penetrasi sistem kapitalisme yang berwujud perkebunan partikelir. Adapun yang merintis usaha perkebunan tembakau di Jember ialah George Birnie yang pada tanggal 21 Oktober 1859 bersama Mr. C. Sandenberg Matthiesen dan Van Gennep mendirikan NV LMOD (Landbouw Maatscappij Oud Djember) yang semula bergerak di bidang perkebunan tembakau. Kehadiran sistem perkebunan ini membawa perubahan-perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat dan yang terpenting terjadinya perubahan status kota pada tanggal 9 Januari 1883, Jember menjadi regentschap sendiri terpisah dan Bondowoso. Sehubungan dengan berubahnya status kota Jember, maka pemerintah pusat mengadakan perombakan struktur pemerintahan dan pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan dan yang terpenting dibukanya jalur kereta api dan Surabaya menuju Probolingga dan terus ke Jember, serta dan Jember menuju Panarukan yang berfungsi sebagai pelabuhan untuk mengangkut produk komoditi eksport pada desenia ke sembilan abad XIX.

Dengan hadirnya ondereming-onderneming di Jember maka terjadilah gelombang migrasi besar-besaran dan daerah Madura dan Jawa ke daerah ini. Para migran tersebut membawa dan mengembangkan budaya asalnya ke daerah yang baru. Menariknya di daerah Jember terjadi prose akulturasi budaya sehingga di daerah Jember muncul budaya "pandhalungan" yang merupakan percampuran dua kebudayaan dan menjadi budaya barn yang khas.

Beranjak dan hal di atas timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara detail yakni *pertama*, bagaimanakah pengaruh sistem perkebunan swasta terhadap perkembangan kota Jember? *Kedua*, dengan berkembangnya perkebunan swasta di daerah ini menimbulkan gelombang migrasi ke daerah Jember, dan bagaimana dampak migrasi terhadap dinamika budaya sehingga terjadi proses akultunasi dan menghasilkan budaya barn yang disebut sebagai budaya"pandhalungan"?

DARI PRIVACY KE VULGAR PERILAKU SEKS DI JAWA AWAL ABAD KE-20

Gayung Kusuma SS.

Tujuan penulisan makalah ini mencermati perubahan-perubahan perilaku seksual di Jawa awal abad ke-20 berkaitan dengan transisi sosial dan kultural masyarakat. Melihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya berbagai kasus tersebut di lingkungan masyarakat Jawa. Memahami dinamika seks di Jawa serta dapat mengetahui hubungan antara masyarakat yang sedang berubah dengan fenomena seks yang terjadi. Untuk melacak permasalahan itu, publikasi dalam surat kabar yang terbit di Jawa awal abad ke-20 menjadi sumber utama, juga tulisan-tulisan dan terbitan buku periode yang sama dengan fokus penulisan.

Dunia seks di Jawa awal abad ke-20 menunjukkan, bahwa terjadi perubahan perilaku seks pada masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu; dinamika penduduk, ekonomi, industrialisasi, dan apresiasi masyarakat melalui iklan obat kuat dalam surat kabar. Hasil penelitian memberikan gambaran pengaruh iklan obat kuat menstimulasi persepsi masyarakat terhadap seks, selain beberapa faktor tadi.

Secara riil, dunia seks di perkotaan Jawa pada satu sisi berkembang melampaui batas-batas normatif, ditandai dengan munculnya prostitusi di Surabaya, Batavia, Jawa Tengah dan kota lainnya. Pada sisi lain, aborsi dan penyakit kelamin juga mewarnai kehidupan masyarakat Jawa masa itu, yang kesemuanya membuktikan seks semakin terbuka menjelang akhir kolonial Belanda di Jawa. Bentuk dan perilaku prostitusi menurut berbagai pendapat meningkat drastis pada abad ke-19 terutama setelah 1870 sampai menjelang awal abad ke-20 ketika ekonomi kolonial dibuka untuk modal swasta.

Selanjutnya, penerapan sistem pendidikan Barat yang telah merebak di perkotaan semakin mempercepat lajunya proses modernisasi yang merubah secara strukturai lapisan sosial tertentu di masyarakat Jawa awal abad ke tentu saja hal ini membawa implikasi secara tidak langsung pada gaya hidup, termasuk perubahan perilaku seksualitas. Kenyataannya rangkaian proses perubahan perubahan yang berkembang telah mereduksi struktur masyarakat agraris, feodalisme, tradisional menuju masyarakat perkotaan yang bersifat modern.

TRADISIONAL DAN RITUAL SUNGAI MASYARAKAT KOTO PANJANG SEJARAH SOSIAL SEBUAH NEGERI YANG DITENGGELAMKAN DI PERBATASAN SUMATERA BARAT – RIAU

Gusti Asnan

Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Koto Panjang telah ikut membantu memecahkan masalah kekurangan energi listrik di daerah Sumatera Barat dan Riau. Seiring dengan adanya keuntungan ekonomis dari keberadaan PLTA tersebut, pembangunan dam atau danau buatannya juga menyebabkan terjadinya bencana besar bagi kehidupan sosial budaya masyarakat Koto Panjang dan sekitarnya. Pembangunan dan keberadaan dam serta PLTA tersebut telah mengubah masyarakat setempat dari masyarakat sungai menggantungkan sebagian besar hidupnya pada aktivitas sungai menjadi masyarakat bukit yang mau tidak mau harus mengolah dan melakukan banyak aktifitas di tanah kering (pertanian) untuk kelangsungan hidup mereka. Sejalan dengan berbagai tradisi yang berhubungan dengan dunia sungai. Tanpa mengurangi makna kerugian lingkungan yang banyak disorot selama ini, hilangnya bebagai tradisi masyarakat setempat adalah juga sebuah kerugian yang tidak ternilai harganya, apalagi berbagai tradisi yang hilang itu tidak akan pernah hadir dan tidak akan bisa diciptakan kembali. Makalah ini merekonstruksi berbagai tradisi masyarakat Koto Panjang yang berhubungan dengan dunia sungai yang telah hilang dan tidak mungkin hadir serta diciptakan kembali. Penelusuran dan pengumpulan sumber untuk penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah lisan. Disamping itu juga dipergunakan beberapa sumber tertulis berupa tambo (histografi tradisional) dan karya - karya tangan kedua lainnya.

PENINGGALAN SEJARAH DAN KESADARAN SEJARAH

Hari Untoro Dradjat

Peninggalan sejarah merupakan warisan budaya bersifat benda (tanggible) yang benilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Oleh karenanya peninggalan sejarah perlu dilestarikan agar dapat dikaji dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Peninggalan sejarah dalam bentuk benda cagar budaya, situs dan kawasan perlu disajikan dalam bentuk penulisan sejarah, yang sangat berguna bagi pendidikan dan dapat pula dijadikan sebagai wahana penting dalam memupuk rasa kesadaran sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat manusia.

Kesadaran sejarah sangat penting bagi kehidupan bemegara dan berbangsa, apabila nilai sejarah direfleksikan dan ditulis kembali dalam bentuk nilai-nilai yang dapat diapresiasi sehingga merupakan kekuatan yang memiliki pengaruh kuat dan hams diperhitungkan sebagai upaya membentuk jatidiri dalam bingkai negara kesatuan. Dunia terus berubah dan perubahan berlangsung semakin cepat, yang berimbas bagi kita sebagai bangsa mendapat tantangan yang sangat berat. Untuk mengantisipasi penlu dikembangkan nilai sejarah yang disajikan secara objektive, dinamis, progresif, modern, tanpa terlepas dan jatidiri Indonesia yang telah diwarisi oleh para pendahulu kita.

Peninggalan Sejarah dan Kesadaran Sejarah menjadi strategis karena diikat oleh benang merah yang tegas. Indonesia dapat menjadi bangsa besar yang maju dan sejahtera jika manusia Indonesia yang beraneka ragam budaya "multi culture" dapat berekspresi dengan baik dan berada dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua ini perlu didukung serta ditunjang oleh hasil kajian sejarah. Kesadaran sejarah sebagai sesuatu yang sangat mendasar harus mampu memaparkan issu yang bersifat humanis secara objektif tidak benpihak pada kepentingan tententu, agar opini publik yang terbentuk sesuai dan selaras dengan budaya bangsa Indonesia.

Dalam memperkaya pembentukan kesadaran sejarah perlu dikedepankan nilainilai yang lebih berorientasi pada anggapan bahwa sejarah merupakan jembatan sebagai penghubung generasi, tanpa batas waktu baik dari masa lalu, masa kini sampai masa yang akan datang. Ranah nilai sejarah tidak memiliki keberpihakan karena bersifat netral tanpa praduga bahwa tinggalan sejarah tidak lebih tinggi dan budaya lain atau sebaliknya.

Oleh karena itu kita perlu senantiasa meningkatkan internalisasi sejarah. Melalui peninggalan sejarah ditumbuhkan kesadaran tentang keragaman budaya yang berakar pada khasanah budaya Indonesia.

GORONTALO ABAD XVII: DAERAH KONFLIK YANG TERLUPAKAN

Harto Juwono

Gorontalo merupakan sebuah daerah yang memiliki latar belakang sejarah cukup panjang. Sepanjang sejarahnya, daerah Gorontalo mengalami konflik yang terus-menerus dan melibatkan banyak kepentingan politik luar. Puncak konflik di Gorontalo terjadi selama abad XVII. Pada periode itu, bukan hanya konflik intern yang dihadapi oleh Gorontalo yaitu dengan sesama anggota Limolo Pohalaa, tetapi juga dengan pihak-pihak luar seperti Ternate, Goa dan VOC.

Setelah penyebaran Islam di Gorontalo pada abad XVI, daerah ini terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang berdiri sendiri tetapi terikat oleh kekerabatan dari masing masing penguasanya. Setiap kerajaan ini memiliki kepentingan sendiri dan saling berkonflik. Konflik antar kerajaan di Gorontalo melibatkan campur tangan kerajaan lain di luar Gorontalo yang datang untuk membantu setiap pihak yang berkonflik. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Goa merupakan dua kerajaan besar abad XVII di kawasan itu yang memiliki kepentingan di Gorontalo. Kedua kerajaan ini terus-menerus saling berhadapan dengan sekutu masing-masing, yaitu Limboto dan Gorontalo dan menciptakan perimbangan kekuatan (balance of power) di sana.

Perubahan kondisi mi terjadi setelah adanya Perjanjian Bongaya tahun 1667 yang menurunkan status Goa sebagai kekuatan besar dan munculnya VOC di wilayah itu. Atas kesepakatan VOC dan Ternate, Gorontalo menjadi daerah yang terbuka bagi intervensi VOC disana. Kontak politik secara resmi antara Gorontalo dan VOC terjadi pada masa pemerintahan Raja Biya tahun 1679 di Gorontalo. Karena tekanan kepentingan VOC, Raja Biya menentangnya dan Gubemur VOC di Manado, R. Padtbrugge mengirimkan pasukan untuk menangkapnya. Peperangan berkobar kembali di Gorontalo dan berakhir dengan penangkapan Raja Biya pada tahun 1681 dan dibuang ke Ceylon. Dengan demikian sejak tahun 1681 secara resmi VOC menegakan pengaruhnya di Gorontalo.

DARI PEMILU "BADUNSANAK" HINGGA "BASIARAK": STUDI TENTANG RADIKALISASI POLITIK DALAM PILKADA PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT 2005

Hary Efendi Iskandar

Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau yang kemudian disebut dengan Pilkadal secara serentak dilaksanakan tanggal 27 Juni 2005, mulai dan propinsi dan sebelas kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dan sebelas kabupaten/kota itu salah satunya Kabupaten Padang Pariaman. Dalam Pilkadal di Sumatera Barat pada umumnya dan di Kabupaten Padang Pariaman khususnya memakai motto "se/en ggarakan Pemilu secara badunsanak" (bersaudara). Namun yang terjadi adalah Pilkadal yang "basiarak" (bermusuhan). Terutama yang terjadi di Kabupaten Padang Paniaman.

Pilkadal Padang Pariaman nyanis saja ditunda. Pasangan lqbal Alan Abdullah-Yulius Danil yang dicalonkan Partai Golkar dan PKS menggugat KPUD Padang Paniaman. Kelompok massa pendukung pasangan ml tidak menerima kebijakan KPUD yang tidak meloloskan calon mereka, sehingga mereka melakukan aksi demonstrasi beberapa han, menduduki kantor KPUD selama tiga hail, melakukan penyegelan kantor KPU dengan kayu dan menteror anggota KPUD Padang Pariaman, balk melalui telepon, handpont dan pesan-pesan melalui massa pendukungnya. Berbagal cara dan intrik politik mereka lakukan agar Pilkadal Padang Paniaman ditunda dan meminta Anggota KPUD diganti. Kegaduhan Pilkadal terus berlanjut menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bahkan sampai sekarang pertarungan itu masih berlanjut. Mereka mendesak Gubernur Sumatera Barat M. Thamnin dan Mendagri M. Ma'ruf untuk menunda pelaksanaan Pilkadal Padang Paniaman. Loby loby politik tingkat elite terus mereka lakukan. Hal itu amat memungkinkan karena Partai Golkar menang mutlak dalam Pemilu legislatif 2004, baik di propinsi maupun di tingkat Kabupaten di Sumatera Barat. Namun demikian, Pilkadal tetap saja dilaksanakan sesuai rencana. Mendagri M. Ma'ruf memutuskan tidak ada penundaan Pilkadal Padang Pariaman.

Dalam suasana hiruk-pikuk di tingkat elite politik Pilkadal tetap dilaksanakan. Pasangan Muslim Kasim-Ali Mukhni terpihh menjadi Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2005-2010. Pertarungan politik terus berlanjut menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bulan Agustus 2005. Proses gugat menggugat di

pengadilan mewarnal dinamika politik setelah penghitungan suara dan menjelang pelantikan. Aksi boikot terhadap hasil Pilkadal di DPRD Padang Pariaman pun tidak dapat dihindarkan, karena Yulius Danil sebagai calon kepala daerah yang tersingkir adalah Ketua DPRD Padang Pariaman. Akan tetapi dalam kondisi hingar-bingar politik, Muslim Kasim-Ali Mukhni tetap saja dilantik oleh Mendagri melalul Gubemur Sumatera Barat Gamawan Fauzi yang juga baru terpilih dalam Pilkadal di tingkat Propinsi.

MENGHADAPI PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN PADA BULAN SEPTEMBER 1948

Himawan Sutanto, M. Hum

Tahun 1948, tahun ketiga perjuangan mempertahankan kemerdekaan merupakan tahun yang paling berat bagi Republik Indonesia. Diterimanya persetujuan Renville oleh Republik Indonesia menimbulkan banyak kerugian baginya. Wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit, pasukan-pasukan gerilya Indonesia yang belum dapat dikalahkan oleh Belanda harus dipindahkan dari "kantong-kantong" gerilyanya ke daerah Republik yang semakin sempit. Pengunduran pasukan bukan disebabkan karena telah dikalahkan secara militer di dalam medan pertempuran, tetapi disebabkan keputusan yang disepakati bersama di dalam meja perundingan, suatu "negotiated retreat". Tetapi Belanda melakukan pelanggaran demi pelanggaran persetujuan Renville, menolak diadakannya peblisit, menunda-nunda diadakannya perundingan lanjutan pasca Renville dan lain-lain. Renville menimbulkan hubungan Indonesia dan dan Belanda suatu suasana perdamaian yang semu, suatu "state of uneasy peace". Belanda tetap memelihara kekuatan militernya, tidak menguranginya setelah Renville. Jumlah kekuatan 120.000, tetap dipertahankannya, suatu kekuatan yang terbesar yang ditugaskan ke Indonesia di dalam sejarah Kerajaan Belanda. Kenyataan ini bagi Republik Indonesia merupakan indikasi bahwa Belanda sewaktu-waktu akan menggunakan keunggulan kekuatan militernya untuk melakukan suatu agresi militer, memaksakan kehendaknya apabila perrundingan-perundingan pasca Renville tidak menghasilkan keputusan politik yang memuaskan baginya. Mengalirnya pengungsi di dalam jumlah besar dan pasukan Republik yang ber "hijrah" dari daerah-daerah yang diduduki Belanda ke wilayah Republik Indonesia yang semakin sempit, menimbulkan problema ekonomi dan sosial yang besar, kesulitan diperbesar dengan adanya blokade ekonomi yang ketat oleh fihak Belanda.

Akibat diterimanya persetujuan Renville juga menimbulkan krisis parlementer Republik Indonesia. Perdana Menteri Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya setelah kabinet "Sayap Kirinya" tidak mendapat dukungan dari Masyumi dan Partai Nasional Indonesia. Presiden Soekarno menunjuk Wakil Perdana Menteri Mohammad Hatta sebagai formatur kabinet, dan berhasil membentuk kabinet baru pada tanggal 30 Januari 1948. Namun ketidak berhasilan Hatta untuk mengangkat seorang menteri dari Sayap Kiri menimbulkan malapetaka yang cukup besar. Sayap Kiri yang telah mengkonsolidasi kan dirinya menjadi Front Demokrasi Rakyat, suatu kekuatan politik dan mempunyai sayap militer, melakukan oposisi yang semakin radikal. Pertentangan antara kekuatan kanan dan kiri semakin meningkat di bulan-bulan setelah perjanjian Renville.

Pada tanggal 11 Agustus 1948 Muso, seorang tokoh komunis Indonesia kembali dari Moskow setelah menetap belasan tahun di sana. Ketika bertemu dengan Presiden Sukarno, ia menyatakan tujuan kedatangannya adalah untuk menertibkan keadaan (*Ik kom hier om de orde scheppen* – Saya datang untuk menertibkan keadaan). Tidak dapat diketahui dengan pasti apa tujuan kedatangan kembali ke Indonesia, tetapi yang jelas, sebagai penganut komunis internasional ortodoks membawapemikiran garis keras 'Zhadanov'. Keyakinan politik itulah yang diterapkan olehnya untuk mengembangkan

Partai Komunis Indonesia. Sejak itulah PKI menjadi semakin radikal. Satu bulan kemudian pada tanggal 18 September 1948, Soemarsono, seorang pemimpin pemuda yang berhaluan kiri, menjadi Gubernur Militer Madiun, memaklumkan pembentukan pemerintah Front Nasional yang didukung penuh kekuatan militer PKI, seperti kesatuan Brigade XXIX, eks kesatuan Pesindo, pimpinan Letnan Kolonel Dachlan. Tindakan Muso dan Sumarsono sudah termasuk kategori *coup d'etat* perebutan kekuasaan terhadap Pemerintah RI. Untuk itu Pemerintah Pusat RI langsung memerintahkan Angkatan Perang RI untuk menumpasnya.

Belanda melihat terjadinya pemberontakan PKI di daerah Republik Indonesia sebagai suatu "strategic opportunity" peluang strategis untuk melancarkan percepatan gerak ofensif militernya menyerbu wilayah Republik Indonesia. Rencana militernya ini dinamakan percepatan dari rencana Operasi Kraai yang telah disiapkan untuk sewaktuwaktu menyerbu wilayah Republik Indonesia. Kecepatan gerakan Angkatan Perang RI dengan bantuan rakyat berhasil merebut Madiun pada tanggal 30 September 1948 dan daerah-daerah lainnya yang telah dikuasai PKI, sekaligus mengurungkan niat Belanda untuk melancarkan gerak ofensif militernya.

Republik Indonesia berhasil untuk menumpas pemberontakan PKI di dalam waktu yang relatif pendek pada awal Desember 1948, tetapi tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan konsolidasi, karena pada tanggal 19 Desember 1949, Angkatan Perang Belanda dengan segala keunggulannya melancarkan agresi militernya menyerang Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta dan daerah-daerah Republik lainnya di pulau Jawa yang belum dikuasainya.

PENINGGALAN SEJARAH DAN KESADARAN SEJARAH DI ACEH: SUATU TANTANGAN MASA DEPAN

Drs. Husaini Ibrahim, MA

Sebagai peninggalan sejarah seumpama: mesjid kuno, makam, naskah dan bangunan lama merupakan benda-benda yang cukup banyak di Aceh. Kehadirannya adalah tidak terlepas dari perjalanan yang panjang suatu masa kejayaan beberapa kerajaan yang ada di Aceh seperti: Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam.

Seiring dengan perjalanan waktu yang terus berputar, maka jejak-jejak sejarah pun turut bergulir mengikutinya Berbagai perubahan terjadi yang memang tidak bisa dielakkan. Berkaitan dengan hasil sejarah. manusia sebagai mahkluk yang menyejarah dihadapkan pada suatu tantangan menyelematkan peninggalan sejarah atau membiarkan saja mengikuti arus sesuai dengan perkembangan zaman.

Berbagai peninggalan sejarah yang ada di Aceh mengalami kehancuran oleh berbagai faktor baik disengaja ataupun tidak. Cungkup banyak mesjid kuno yang dibangun pada abad ke-17 dihancurkan lalu diganti atau dibangun mesjid yang baru. Makam dengan berbagai jenis tipe nisan kubur mulai abad ke-13 hingga akhir kerajaan Aceh abad ke 19 banyak terbengkalai, sebagian dijadikan batu pengasah oleh masyarakat setempat.

Demikian juga Aceh yang dikenal sebagai gudang naskah di Nusantara, kini sangat sulit untuk mendapatkannya apalagi ketika tsunami yang melanda Aceh tanggal 26 Desember 2004 kebanyakan naskah kuno di Aceh telah lenyap ditelan bersamanya. Bukan itu saja contoh lain adalah bangunan-bangunan bersejarah seperti: Balai Teuku Umar, Rumah Tempat Tinggal C. Snouck Hurgronje dan Hotel Aceh yang memiliki nilai sejarah semuanya sudah tidak ada lagi. Bangunan sudah berubah menjadi toko atau bentuk lainnya.

Dari contoh di atas apakah ini suatu pertanda bahwa kesadaran sejarah orang Aceh sangat tipis atau ada faktor lain yang memungkinkan hal ini terjadi, seperti kurangnya komitmen pemerintah terhadap peninggalan sejarah di Aceh atau pengetahuan masyarakat tentang peninggalan sejarah amat dangkal, mungkin juga faktor sanksi hukum yang tidak pemah diperlakukan bagi orang-orang yang merusak benda cagar budaya atau alasan lain seperti konflik Aceh yang belarut-larut sehingga penanganan masalah peninggalan sejarah di Aceh terabaikan.

KEDUDUKAN WANITA MENAK DALAM STRUKIUR MASYARAKAT SUNDA

Dr. Hj. Ietje Martina. D.M.Si

Penelitian mengungkap gambaran tentang kedudukan wanita keturunan menaic dalam struktur masyarakat Sunda. Masalah yang dikaji berupa aspek-aspek wanita keturunan menak yang berkeluarga terhadap aktivitas kerja di sektor dornestik dan di sektor publik, tanggapan suami terhadap 1 yang bekerja. dan sikap lingkungan sosial Sunda terhadap kedudukan dan aktivitas wanita Tujuannya ialah untuk melihat upaya wanita Sunda keturunan menak dalam mempertahankan status mereka di lingkungan sosialnya.

Teori dalam penelitian mengacu pada strukturalisme, transformasi, teori status teori peran, dan pendekatan gender.

Metode penetitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan status kelompok manusia, sebagai sebuah obyek dalam peristiwa yang sedang berlangsung. Pendekatan kualitatif menekankan pada prosedur penelitian dengan menggunakan data kualitatif dengan kajian etnografi. Kajian untuk memahami kehidupan masyarakat berdasarkan sudut pandang masyarakat bersangkutan. Dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk memahami wanita-wanita Sunda keturunan menak yang diteliti secara personal dan memandang mereka dajam rnengungkapkan pandangan dunianya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita keturunan menak dan suami mereka memiliki tanggapan positif terhadap aktivitas wanita yang bekerja baik dalam peran domestik maupun peran publik. Pekecjaan mereka ditujukan untuk mencapai kesejajaran suami-istri, saling menghargai diantara sesarnanya, mencapai kesejahteraan keluarga, dan mendapat dukungan dari lingkungan sosialnva. Struktur masyarakat Sunda sekarang tidak membedakan kedudukan antara suami dan istri dalarn rumah tangga. Kesejajaran linendapat dukungan yang berarti, baik dari lingkungan keluarga & lingkungan kerja, maupun lingkungan sosialnya.

Artinya,diferensiasi peran dan kedudukan dalam keluarga terintegrasi dengan proporsi peran wanita di sektor domestik dan publik sama besamya. Dimensi interaksi antara istri suami dan anak dalam keluarga teratasi sehingga kesejajaran struktur secara fungsional tercapai

Kata kunci: Kedudukan wanita, gender, dan transformasi

PERSEPSI KULTURAL DAN KEPUTUSAN POLITIK ABAD XIX IMPLIKASI DALAM SISTIM DESA DI BALI

I Gde Parimartha

Telah dikenal bahwa di Bali berlaku sistem ganda dalam pemerintahan desa. Kini muncul tarik menarik antara dua sistem itu (adat dan dinas), dan sering menimbulkan polemik bahkan konflik di masyarakat. Ada pendapat bahwa itu warisan feodal, atau budaya lama masyarakat, .dan ada juga pendapat bahwa itu warisan kolonial. Mana yang pantas didengar? Rupanya hal itu memerlukan penjelasan yang memadai berdasarkan kajian yang lebih jauh.

Beberapa kajian, penelitian tentang desa telah dilakukan, baik oleh peneliti dalam maupun peneliti asing. Seperti misalnya Beberapa bahan tertulis yang dapat dipakai acuan antara lain: Hobart. M, 1975. "Orators and Patrons" *Two Types of Political Leader in Balinese Village Society*"; M. Boch, *Political, language and Oratory in Traditional Society*, London/New York: Academic Press. Korn, V.E, 1932. Het Adatrecht van Bali. S'Gravenhage: G.Naeff. Raka Dherana, Tjokorda, 1975. *Pokok-pokok Organisasi kemasyarakatan Adat di Bali*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. Carol A.Warren, *Adat and Dinas: Village And State in Contemporary Bali* (1990).

Namun demikian, sejauh ini - pandangan penulis- kita belum mendapat penjelasan historis yang cukup tentang kedaan desa seperti di atas. Tulisan ini bertujuan, mencari penjelasan historis, mengapa sistem pemerintahan di Bali demikian? Adakah persepsi, atau faktor kolonial penting di dalamnya? Bagaimana faktor lokal dan implikasi politiknya terhadap sistem desa dulu dan sekarang?

Dengan mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan di atas, diharapkan menemukan pemahaman tentang sistem desa di Bali, dan berharap bermanfaat dalam kajian-kajian sistem politik terkait dengan sikap budaya masyarakat, dan berguna bagi pengambil keputusan, atau kebijakan dalam pembangunan bangsa ke depan.

MASALAH PERBATASAN DI ASIA TENGGARA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

PENGALAMAN INDONESIA DI KALIMANTAN TIMUR

I Ketut Ardhana

Abstrak

Tiap – tiap negara masih mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mengelola wilayah perbatasannya terutama paska – kemerdekaan negara – negara di Asia Tenggara. Di satu pihak masih ada yang menganggap bahwa perbatasan adalah daerah yang tertinggal dan jauh dari pengaruh modernisasi. Di pihak yang lain ada anggapan bahwa mereka perlu mengubah pandangan itu dengan menjadikannya sebagai daerah pintu depan yang harus dikelola dengan sebaik – baiknya. Hal ini tidak dapat terlepas dari persoalan masa lalu yang melihat bahwa pusat penting dari daerah pinggiran.

Akan tetapi, wacana yang berkembang akhir – akhir ini nampaknya mengalami perubahan. Ini dapat dilihat dari perubahan pendekatan pertahanan dan keamanan menuju pada pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana pentingnya persoalan perbatasan ini tidak hanya dari sudut pandang kedaulatan negara dan formasi negara bangsa, tetapi juga dari perspektif peningkatan ekonomi lokal dan regional. Serta masalah globalisasi yang sedang berlangsung.

DIVERSIFIKASI USAHA DELI SPOORWEG MAATSCHAPPIJ: STUDI SEJARAH PERUSAHAAN DI SUMATERA TIMUR (1883-1940)

Drs. Indera M.Hum

Sejarah perusahaan selalu berpijak melalui suatu asumsi bahwa bila orang suka kebebasan berkehendak maka akan mempengaruhi jalannya kejadian-kejadian sejarah. Dalam rangka menjawab tantangan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Timur, maka Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) sebagai suatu perusahaan berhasil mengekploitasi komoditi ekspor yang tumbuh pesat. Deli Spoorweg Maatschappij sebagai perusahaan kereta api terbukti mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi perkebunan swasta. Hal mi didukung dan berbagai pendapat, seperti **Jacobus Weisfelt** menyatakan DSM ternyata telah menyumbangkan dasar pembangunan ekonomi wilayah pantai timur Sumatera. **Thee Kian Wie** menyatakan keberhasilan kegiatan industri perkebunan di Sumatera Timur berlandaskan pada pembangunan sistem jalan kereta api. **Tsuyoshi Kato** menyatakan salah satu aspek perubahan kehidupan suatu masyarakat karena pembangunan sistem transportasi kereta api, sehingga terbukti memiliki akses terhadap industri perkebunan, pertambangan, perdagangan dan hubungan m kota dan desa.

Menurut Edith T.Penrose dim buku *The Theory of the Growth of the Firm* (1980:1-9) bahwa suatu perusahaan akan tumbuh dan berkembang karena mengarah kepada kekuatan monopoli, kerjasama vertikal, diversifikasi usaha dan sistem merger yang dilakukan dengan keseimbangan yang terus menerus. Berdasarkan penelitian dengan pengukuran empiris kuantitatif, maka dapat diuji bahwa kekuatan sistem monopoli merupakan cara yang sangat menguntungkan bagi perusahaan yang tidak ada persaingan. Secara hipotesa menunjukkan adanya peningkatan dan perkembangan setelah sistem monopoli yang hanya dinikmati Deli Spoorweg Maatschappij. Kebebasan untuk melakukan ekspansi (perluasan) lebih besar karena pemberian hak dan konsesi memiliki kekuatan hukum yang jelas sehingga peluang menanamkan modal dapat dilalui tanpa menanggung resiko yang berarti. Keputusan yang diambil dengan melakukan diversifikasi usaha merupakan tindakan yang tepat dalam pengelolaan manajemen dengan meningkatkan modal usaha pada sektor-sektor lain, seperti telepon, perumahan dan sewa gudang. Sektor ini memberi arti tersendiri dalam usaha pengembangan sistem laporan keuangan, eksploitasi angkutan barang dan penumpang secara periodik.

Diversifikasi usaha Deli Spoorweg Maatschappij merupakan tindakan yang tepat dalam sistem manajemen perusahaan melalui pengelolaan jaringan telepon, pembangunan fasilitas perumahan dan sistem sewa gudang. Struktur pasar yang ada rnernungkinkan DSM melakukan diversifikasi usaha karena fasilitasnya saling terkait satu sama lain dan memang tersedia. Pembangunan jaringan telepon dilakukan seiring dengan jalur sepanjang rel kereta api, dan perumahan dibangun untuk direksi perkebunan dan pejabat-pejabat pemerintahan, serta sewa gudang untuk tempat penyimpanan barang – barang hasil perkebunan yang akan diekspor keluar negeri sebelum dipindahkan ke pelabuhan Belawan.

Sumber studi ini diperoleh dari arsip dan dokumen yang diterbitkan dalam bentuk laporan tahunan (Jaarverslagen) seperti AVROS (Algemenee Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra), DPV (Deli Planters Vereeniging), dan Verslage Nopen het Beher de Haven Belawan. Laporan tahunan ini akan banyak menyinggung eksistensi DSM mengenai data-data kuantitatifnya. Oleh sebab itu, DSM sebagai suatu perusahaan sangat tepat menjadi inspirasi studi sejarah perusahaan di Sumatera Timur (1883 – 1940) dengan titik focus pada kebijakan Diversifikasi Usaha.

POLITIK GENDER ORDE BARU DAN KETERPINGGIRAN PEREMPUAN BALI DALAM KANCAH POLITIK

I Nyoman Sukiada

Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan momentum yang sangat strategis bagi kaum perempuan di Indonesia khususnya di Bali untuk terjun dalam kancah politik. Demokratisasi dalam kehidupan politik telah terbuka lebar bagi kaum perempuan karena dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tahun 2004 pada pasal 65 ayat 1 dinyatakan "setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen". Dalam realitasnya hasil pemilihan umum legislatif tahun 2004 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Legislatif Propinsi Bali hanya 7 persen atau 4 kursi dari 55 jatah kursi, untuk legislatif tingkat Kabupaten/Kota seluruh Bali hanya 4 persen atau 13 kursi dari 330 jatah kursi (Anak Agung Gede Rai, 2004)

Di lingkungan eksekutif khususnya jabatan yang menentukan keputusan yang bersifat politis posisi perempuan masih langka. Dari 55 orang camat yang terdapat di Propinsi Bali hanya ada seorang camat perempuan; dari 64 orang lurah baru ada seorang lurah perempuan, dan dari 606 orang kepala desa hanya ada 2 orang kepala desa perempuan. Jabatan setingkat bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota yang ada di propinsi Bali belum ada dari kaum perempuan.

Kondisi seperti ini tidak lepas dari pengaruh politik gender yang diterapkan selama pemerintahan Orde Baru (Orba) yang berlangsung selama lebih dari 3 dasawarsa. Pada saat awal berkuasa Orba menggunakan Partai Komunis Indonesia sebagai musuh utama yang harus ditumpas. Keberhasilan kampanye anti komunis tidak lepas dari kejelian rejim Orba memasukkan aspek gender dalam propaganda tersebut yang menyatakan bahwa anggota-anggota Gerwani terlibat dalam pembunuhan di Lubang Buaya. Dari pernyataan tersebut tergambar bahwa perempuan-perempuan anggota Gerwani merupakan perempuan tidak bermoral dan biadab. Ini menunjukkan Orba berusaha mengaitkan komunisme dengan kebiadaban kaum perempuan dan bertindak di luar kodratnya. Oleh karena itu kaum perempuan harus dikembalikan kepada masa-masa selanjutnya. Melalui politik anti Gerwani Orba mengkonstruksi politik gender yang secara mendasar mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik.

Dalam usaha memperkuat politik gender pemerintah Orba merevitalisasi dan mengelompokkan oraganisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan pemerintah pada tahun 1974. Pengelompokan pertama adalah Dharma Wanita sebagai organisasi yang menghimpun para istri pegawai negeri. Untuk para isteri yang suaminya bekerja sebagai ABRI dan Kepolisian dikelompokkan dalam organisasi kelompok kedua yang disebut Dharma Pertiwi. Pengelompokan ketiga adalah organisasi perempuan yang diberi nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu perempuan Indonesia baik yang ada di pedesaan maupun yang ada di perkotaan. Melalui ketiga organisasi inilah rejim Orde Baru mengontrol perempuan Indonesia dalam posisi sebagai subordinat laki-laki.

Di tingkat propinsi, ketua penggerak PKK biasanya dijabat oleh istri gubernur yang sekaligus menjabat sebagai ketua Dharma Wanita. Program yang sudah dicanangkan dari pusat dijabarkan melalui tim penggerak PKK propinsi melalui tim penggerak PKK kabupaten terus mengalir ke tim penggerak PKK kecamatan, tingkat desa, dan muaranya tingkat banjar. Semua perempuan di desa yang sudah berkeluarga secara otomatis menjadi anggota PKK. Segala program yang dicanangkan dari pusat dengan cepat mengalir ke bawah melalui birokrasi sistem pemerintahan, seperti, program program Panca Dharma Wanita: wanita menjadi pendamping setia suami, ibu pendidik anak dan pembina generasi muda penerus bangsa, pengelola rumah angga, pekerja untuk menambah penghasilan keluarga, anggota masyarakat yang berguna. Dominannya pengaruh organisasi perempuan yang dibentuk oleh pemerintah mengakibatkan tidak muncul organisasi kaum perempuan yang independen dalam memperjuangkan kaumnya. Kuatnya pengaruh pemerintah dalam mengontrol prilaku politik kaum perempuan dan ketiadaan organisasi perempuan yang independen mengakibatkan keterpinggiran perempuan Bali dalam kancah politik.

Metode Poker Suatu Alternatif Pengembangan Daya Tarik Mata Pelajaran Sejarah

Oleh: Idrus A. Rore, S. Pd*

Pendidikan sejarah pada jenjang SMA/MA dikategorikan sebagai mata pelajaran inti sehingga semua siswa tanpa memandang jurusan diharuskan menerima mata pelajaran sejarah. Menempatkan sejarah sebagai mata pelajaran inti sangat tepat mengingat misi positif mata pelajaran bersifat universal dan elementer yakni sejarah sebagai pengawal ideologi bangsa, menanamkan nilai nasionalisme, dan patriotisme.

Nilai nasionalisme dan patriotisme dapat ditanamkan pada peserta didik secara efektif dan efisien apabila mata pelajaran sejarah memiliki daya tarik. Namun kondisi obyektif menunjukkan pengajaran sejarah diberbagai wilayah masih mengesenkan sebagai mata pelajaran yang kurang bahkan tidak diminati siswa, tidak menarik, dan membosankan. Kondisi ini bila dibiarkan terus berlangsung maka bukan saja dapat menghambat upaya menanmkan nasionalisma dan patriotisme pada peserta didik tetapi juga dalam jangka pendek peserta didik sulit mencapai prestasi maksimal dalam mata pelajaran sejarah.

Guru sejarah dituntut mengembangkan daya tarik pelajaran sejarah dengan terlebih dahulu mendiagnostik penyebab kekurangmenarikan mata pelajaran sejarah. Analisis faktor penyebab menegaskan bahwa kurangnya minat siswa pada mata pelajaran sejarah, tidak menarik, dan membosankan lebih disebabkan oleh oleh *cara mengajar* guru sejarah yang selama ini terlalu terpaku pada metode tunggal ceramahatau dibumbui sedikit dengan istilah ceramah bervariasi akibatnya proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang " teacher centered " padahal paradikma pembelajaran modern bersifat " student centered ".

Mengembangkan daya tarik pelajaran sejarah dapat dilakukan dengan menggeser paradigma "teacher centered "menjadi "student centered ". Hal ini menuntut kreatifitas dan inovasi guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode yang variatif. Salah satu metode inovatif yang dapat dilakukan adalah menerapkan metode poker. Istilah poker diadopsi dari olah raga bridge (poker) yang kemudian diinovasi dalam pembelajaran sejarah. Kartu poker didesain berisi masalah / pertanyaan, jawaban, dan pertanyaan dengan latar belakang gambar yang sesuai dengan makna pertanyaan, jawaban, dan pertanyaan.

Bermain poker sejarah sama dengan bermain bridge bedanya pada isi kartu dan tindak lanjut. Metode poker sejarah tidak hanya sampai pada tingkat bermain poker melainkan dikembangkan kearah eksplanasi dan presentasi. Uji coba metode poker dalam bentuk PTK menunjukkan bahwa metode poker menarik, diminati, dan menyenangkan siswa. Selain itu retensi peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari lebih tahan lama. Kelebihan paling mendasar metode poker adalah kemampuan mensinergikan pendekatan individual (persaingan) dengan kooperatif.

Kata kunci: Metode poker, Daya Tarik Pelajaran sejarah

^{*} Guru Sejarah SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu - Sulawesi Tengah

"AGAMA, KEMAJUAN SOSIAL DAN PENGGUNAAN RUANG": KOTA MANADO, 1919 - 1972

Ilham

Fokus utama tema ini adalah menyelidiki perkembangan kota dengan mengamati dinamika keagamaan yang berlangsung di dalamnya, serta kaitannya dengan perkembangan sosial dan penggunaan ruang, khususnya antara tahun 1919 — 1972. Penelitian ini sangat strategis artinya jika dihubungkan dengan kondisi kekinian kota Manado. Dimana aspek keagamaan sangat dominan dalam realitas kota, baik dan sudut aktifitas keagamaan, simbol-simbol agama, penggunaan ruang, maupun hubungan antar agama.

Kajian ini, mulai dari pelacakan sumber hingga tahap penulisan akhir, sepenuhnya menggunakan metode penelitian sejarah. Sumber utama penelitian ini adalah berbagai surat kabar dan majalah, khususnya terbitan Manado, di samping sumber arsip dan wawancara. Kesemuanya diperoleh di Yogyakarta, Jakarta, Makassar, dan Manado.

Beberapa temuan pokok penelitian ini, adalah; Pertama, kota Manado sepenuhnya mengalami proses "pengkotaan" dengan kehadiran bangsa Barat. Sejak era kolonial hingga pascakolonial, pembangunan infrastruktur kota berlangsung, tapi "pengaturan" terhadap ruang keagamaan tidak terlihat. Disinilah peran institusi agama dalam pertumbuhan ruang-ruang agarna. Kedua, dinamika keagamaan menjadi bagian penting atas perkembangan masyarakat dan kota Manado. Jika pada periode kolonial, kristenisasi berlangsung dan pengaruhnya yang paling penting adalah kemajuan sosial yang dialami oleh orang-orang Minahasa. Pendidikan, gaya hidup, persuratkabaran berkembang dengan sangat majunya. Sedangkan pada paskakolonial, dinamika keagarnaan "tervisualisasi" secara kuat dalam penggunaan ruang-ruang kota. Prosesi agama dan rumah ibadah memakai ruang secara mencolok. Ini semua adalah gambaran 'meriahnya' aktifitas keagamaan pascakolonial yang diakibatkan beberapa hal, diantaranya; berkembangnya denominasi, perluasan kegiatan kekristenan baik Protestan maupun Katolik, hingga semakin kuatnya 'pengaruh' Islam. Simbol-simbol agama dan kuatnya identitas agama pada akhirnya menjelma sebagai identitas kota Manado hirigga hari ini.

Kata Kunci: Dinamika, Kota, Agama dan Penggunaan Ruang.

"HISTORIOGRAFI PESANTREN : PERSPEKTIF METODOLOGIS" ANTARA ADA DAN TIADA

Drs Joko Sayono, M.Pd. M.Hum

Dalam khasanah historiografi tradisional, situasi dan kondisi pesantren telah mendapat tempat yang cukup dalam berbagai karya. Pesantren telah diangkat menjadi bahan tulisan walaupun belum berbentuk sebuah unit kajian yang berdiri sendiri. Ampeldenta sebagai prototype pesantren "tertua" dijadikan titik awal perjalanan sejarah panjang pesantren, sekaligus menjadi dasar bingkai jastifikasitentang sosok pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan. Sebagai intitusi pendidikan keagamaan, pesantren hanya digambarkan sebagai tempat pendidikan yang menjadi rujukan mengembangkan nilai-nilai kesalehan, saleh iman dan saleh sosial. Dalam perkembangannya pesantren juga dipandang sebagai penyeimbang kekuasaan politik dan kekuasaan tradisional.

Dalam historiografi kolonial Belanda, disamping keagamaan, pesantren dipandang sebagai symbol terhadap perlawanan kolonialisnie. Fenomena tersebut menguat terutama setelah perang jawa usai. Berkembangnya pesantren sangat pesat di pedalaman pada abad 19, dan semakin menguat pada awal abad 20. satu sisi dianggap pula sebagai reaksi terhadap kebijakan pendidikan kolonial yang kurang memberikan peluang pendidikan pada rakyat kecil. Bagi rakyat biasa yang secara akonomis mampu, pesantren merupakan solusi positif untuk meningkatkan martabat. Historiografi kolonial tentang pesantren belum mampu memberikan gambaran menyeluruh, dan lebih menekankan pada pemetaan tentang keberadaan pesantren.

Dari masa kemerdekaan hingga sekarang, historiografi pesantren mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lima unsur pesantren telah dikaji secara terpisah menjadi unit kajian tersendiri. Bentuk historiografi pesantren muncul dalam berbagai bentuk, profil pesantren, biografi Kyai, Kajian Kitab Kuning, Perkembangan tarekat, pemikiran santri, dinamika kelembagaan, pola pendidikan pesantren, dan ada juga yang berbentuk direktori. Tantangan bagi sejarawan adalah merumuskan metodologi yang lebih jelas dan aplikatif bagi perkembangan historiografi pesantren. Historiografi pesantren akan sangat bermanfaat jika didukung oleh sebuah pemahaman metodologi yang memadai. Makalah ini akan mencermati bingkai metodologi penulisan sejarah pesantren, dan bahan diskusi tentang historiografi pesantren masa mendatang. Kemampuan untuk tetap eksis dan peran yang dimainkan semenjak abad 15 merupakan fenomena yang cukup pantas untuk dijadikan obyek penulisan sejarah.

KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI LABOLATORIUM LEGAL PLURALISM

Kasus : Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat

.**Jumhari**

Kawasan perbatasan tidak hanya dipahami sebagai kawasan persinggungan dalam arti teritorial dan administratif semata, akan tetapi juga bisa dipahami pula sebagai kawasan persinggungan antara dua budaya yang berbeda. Dalam kasus Nagari Tarung tarung tersebut di atas, nagari ini secara geografis merupakan wilayah adminstratif Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Selain itu, Nagari Tarung-tarung sebagaimana daerah Sumatera Barat lainnya (kecuali Mentawai) merupakan daerah wilayah suku Minangkabau (Matrilinea/) yang bersinggungan langsung dengan kelompok sub etnik Batak Mandailing yang Paternalistik (Sumatera Utara).

Meskipun mereka berbeda budaya dan latar belakang asal usulnya, dua kelompok suku bangsa ini bisa hidup berdampingan secara damai di Nagari Tarung-tarung. Bahkan dibeberapa kampung yang ada di nagari ini memunculkan identitas baru yang khas yakni budaya orang Rao, yang membedakan dengan cirri budaya Minangkabau dan Batak Mandailing. Agama Islam merupakan salah satu pengikat diantara meraka, me!alui proses Sejarah Islamisasi yang dilakukan kelompok Padri (Minangkabau) sub etnik Batak Mandailing akhirnya menjadi masyarakat Islam yang taat seperti orang Minangkabau.

Perbedaan budaya yang kontras diantara dua kelompok ini, tentu saja akan berpengaruh pula dalam konteks sosial masyarakat seperti dalam persoalan perkawinan. Di tempat ini dikenal adat perkawinan *sumando serikat*, sebagai bentuk kompromi budaya yang mengatur adat perkawinan campur antara orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Persoalan akan muncul dan bersifat konpleks apabila menyangkut beberapa kasus perkawinan yang bermasalah (perceraian), karena berimplikasi pula pada persoalan pembagian harta gono-gini, pewaris serta aturan adat mana yang dipergunakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian dalam batas mana intervensi hukum nasional bisa dijalankan dan diterima oleh kedua komunitas tersebut.

Dan bagaimana implikasi dan sangsi yang diputuskan oleh hukum nasional (pengadilan negeri) bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Makalah mi mencoba menggambarkan bagaimana titik persinggungan antara hukum adat komunitas yang berbeda (Minangkabau dan Batak Mandailing) dengan hukum nasiona! berlangsung dalam kasus perkawinan yang bermasalah dalam perspektif sosio-historis.

PENGALAMAN DAN PERISTIWA DALAM INGATAN KELUARGA SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Oleh: Ny. K. Soepardjo Roestam

Bawasanya keluarga merupakan unit yang terkecil namun mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam Ketahanan Nasional, hal ini kiranya tidak kita ragukan lagi. Sehubungan dengan ini Gerakan PKK yang diawali di Jawa Tengah dapat berkembang dan mencakup seluruh propinsi di Indonesia, karena tujuan dan cara-cara kerjanya dapat diterima masyarakat. Saya mengangkat PKK sebagai topik utama tulisan ini, karena gerakan ini patut diangkat dalam sejarah perkembangan bangsa.

Pengalaman saya mengeni PKK adalah sejak saya sebagai istri Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Tengah diangkat sebagai Ketua gerakan PKK. Kegiatan program PKK yang pada waktu itu sudah, sedang, atau akan dilaksanakan, saya lanjutkan dan intensifkan yang disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan dan kemampuan yang ada.

Tujuan Gerakan PKK secara ringkas adalah" Membantu keluarga dan masyarakat sekitarnya agar mereka mampu dan mau mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan hidupnya atas kesadaran dan kemampuannya sendiri".

Susunan kepengurusan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) dan sistem kerjanya adalah unik, yaitu Ketua TP-PKK secara fungsional adalah isteri Kepala Daerah setempat, dan bertindak selaku fasilitator, sedangkan para anggotanya adalah para relawan, anggota masyarakat yang mau mengabdikan diri melalui PKK. Pendekatan kepada masyarakat memanfaatkan jalur komunikasi langsung, dengan memperhatikan cara pendekatan **edukatif, nilai sosial budaya, dan agama setempat, serta tingkat ekonomi masyarakat.** Dengam demikian penggerakan partisipasi keluarga dan masyarakat sekitarnya dapat terwujud. Program yang dilaksanakan adalah 10 Program Pokok PKK, yang pelaksanaannya didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan lokal.

Apresiasi masyarakat terutama di pedesaan terhadap kinerja PKK cukup signifikan dan mereka juga merasa terbantu dengan diadakannya pelayanan kesehatan melalui pengadaan POSYANDU, yang dikelola oleh kader-kader POSYANDU dari masyarakat setempat. Prinsip PKK dengan motto "bekerja bersama masyarakat", telah membangkitkan rasa bahwa mereka juga dihargai sebagai manusia, dan "melu handarbeni" (merasa turut memiliki). Yang sangat menonjol dalam hal ini adalah tertanamnya sikap gotong royong dan tanggung-jawab bersama khususnya dalam pengadaan pendanaan yang diperoleh melalui antara lain jimpitan. Dibentuknya DASA WISMA yang sangat membantu upaya untuk memperoleh informasi langsung tentang keluarga-keluarga.

Apresiasi ini diperoleh juga dari lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi luar negeri seperti WHO, UNICEF, UNESCO, yang memberikan penghargaan kepada gerakan PKK atas partisipasinya dalam pelaksanaan program mereka. Sebagai Lembaga Masyarakat yang telah tertanam akarnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka "Gerakan PKK telah memiliki kelenturan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dinamika kerjanya memungkinkan PKK memperluas wawasan dalam mewujudkan komitmen dalam melaksanakan keputusan-keputusan nasional dan internasional.

POLITIK DAN KELANGSUNGAN EKONOMI KOTA BAU-BAU 1945 — 1960AN

La Ode Rabani

Makalah INi mendeskripsikan nuansa dan peruhahan politik yang terjadi di kota Bau-bau sebelum dan sesudah Pemilu 1955 di Kota, Sulawesi Tenggara. Periode pascakemerdekaan sampai 1960an dipilih dengan maksud agar nuansa dan berbagai perubahan yang terjadi selama periode itu dapat dideskripsikan secara jelas. Kelangsungan ekonomi kota Bau-Bau penting dibahas karena kota Bau-bau mengalami perubahan status administratif, yakni tidak lagi menjadi ibukota kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1960an. Sepanjang periode kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, Jepang, dan Indonesia (haca: Sulawesi Selatan), sejarah kota itu selalu menjadi center of network bagi daerah-daerah Kendari, Muna, dan wilayah sekitarnya, baik secara administratif, ekonomi, maupun secara politik.

Perkembangan kota Bau-bau ketika tidak berhasil memposisikan diri sebagai center of network dalam arti politik, tidak menjadikan kota ini terbelakang dalam center of network' pada ekonomi. Ramainya pasar di kota itu dan masih berfungsinya kota Baubau sehagai kota pelahuhan utama yang memiliki jaringan maritim yang luas mendorong kota ini terus herkembang seperti kota-kota lainnya di Indonesia. Para pedagang dan beberapa etnis di Makassar datang berdagang ke Bau-bau pada penode tahun 1950an sampai 1960an.

PROSTITUSI DI JAKARTA DALAM TIGA KEKUASAAN, 1930 - 1959 SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Lamijo

Pelacuran merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dan berkembang di setiap putaran roda zaman dan keadaan. Keberadaan pelacuran tidak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan. Walaupun demikian, dunia pelacuran setidaknya bisa mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan kelamin dan mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi juga pihakpihak yang secara sembunyi-sernbunyi ikut menikmati dan mengambil keuntungan dan keberadaan pelacuran.

Jakarta (pada masa kolonial bernama Batavia) merupakan pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yang sekaligus berperan juga sebagai kota pelabuhan, kota perdagangan, serta menjadi salah satu titik awal lintasan kereta api di Jawa. Dengan kedudukan dan posisinya yang penting dan cukup strategis, Batavia berkembang dengan pesat dan dinamis, baik dan segi pemerintahan maupun ekonomi. Perkembangan perekonomian yang pesat di Batavia, terutama karena ditunjang oleh peran pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan perdagangan internasional, tempat untuk mengekspor hasil-hasil tanaman ekspor Hindia Belanda seperti gula, kopi. dan sebagainya yang semakin meningkat sejak diterapkannya UU Agraria 1870. telah menimbulkan pula akibat sampingan, yaitu semakin suburnya pertumbuhan prostitusi.

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1930 berdampak begitu besar di Hindia Belanda. Akibat krisis ekonomi tersebut, sebagian besar aktifitas perekonomian mengalarni gangguan yang serius. Kondisi demikian tentu berpengaruh pada lapangan pekerjaan. Akibatnya, muncul berbagai persoalan menyangkut upaya untuk tetap mendapatkan penghasilan agar tetap dapat survive dalam kondisi perekonomian yang serba sulit itu. Salah satu gejala yang kemudian tampak cenderung meningkat adalah berkembangnya aktivitas prostitusi sentra-sentra perekonomian yang sedang goyah, termasuk di Batavia sebagal pusat pernerintahan Hindia Belanda.

Pendudukan Jepang yang singkat meninggalkan kenangan yang cukup pahit bagi masyarakat Indonesia umumnya dan Jakarta khususnya, sehingga tidak heran jika situasi sosial dan ekonomi sejak kemerdekaan hingga memasuki akhir tahun 1950an masih memprihatinkan, yang ditandai dengan banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Sejak tahun I 950an mulai terjadi arus urbanisasi ke Jakarta secara besar-besaran seiring dengan perkembangan kota Jakarta dan adanya proses nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan mi pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan di Jakarta, di antaranya masalah prostitusi.

Paper ini berusaha mengkaji sejarah dan perkembangan prostitusi di Jakarta seiring dengan perkembangan dan berbagai perubahan yang terjadi di Jakarta pada kurun 1930-1959. Analisis paper ini lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan yang melatarbelakangi perkembangan prostitusi, bentuk-bentuk prostitusi, aktor atau pihak pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, akibat yang ditimbulkan oleh aktifitas prostitusi, dan berbagai upaya untuk menanggulangi prostitusi.

Kata kunci: prostitusi, urbanisasi, kemiskinan, perkembangan kota, krisis ekonomi.

KETIKA NEGARA BERHUTANG KEPADA RAKYATNYA: PINJAMAN NASIONAL 1946

Langgeng Sulistyowati

Cita-cita membebaskan diri dari penjajahan merupakan cita-cita yang mulia. Lepas dari penjajahan merupakan titik awal membangun kemandirian. Demikian pula yang terjadi pada Republik Indonesia (RI), yang pada tanggal 17 Agustus 1945 memprokiarnasikan kemerdekaannya. Berita kemerdekaan itu disambut gembira oleh rakyat Indonesia.

Kegembiraan seluruh bangsa Indonesia bukan tanpa tantangan. Pihak Belanda masih merasa berhak atas wilayah yang dahulunya mereka kenal dengan Hindia Belanda. Bersama dengan Sekutu, yang akan menyelesaikan tugas akhir Perang Dunia (PD) II di kawasan Asia Tenggara, Belanda dengan NICA-nya mernpersiapkan din menata birokrasi dan kekuasaannya di Indonesia.

Pertentangan antara Indonesia dan Belanda pada peniode 1945-1949 terus tenjadi. Bahkan, pertentangan itu sampai pada konflik senjata. Reaksi dunia bermunculan. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ikut campur dalam masalah konflik Indonesia Belanda.

Konflik politik dan senjata yang herkepanjangan antara Indonesia-Belanda telah menambah beban RI dalam upaya membangun negerinya. Republik baru menghadapi masalah berat. Kemampuan finansialnya tidak terfokus pada upaya pembangunan saja. Sebagian besar keuangannya dipakai untuk mempertahankan kemerdekaan.

Di antara beban berat itu, muncul ide untuk melibatkan rakyat secara aktif pada proses pembangunan dan perjuangan bangsa. Partisipasi financial rakyat benar-benar dibutuhkan. Pada tahun 1946 pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 4 tahun 1946, yang kernudian diubah melalui UU No. 9 tahun 1946, tentang pinjarnan dalam negeri dengan tanggungan negara. Konon, proyeksi pinjarnan itu sebesar f. 1.000.000.000,— (seribu juta rupiah Jepang), dengan bunga 4 % setahun.

Dari kasus di atas, menarik untuk dikaji partisipasi rakyat Indonesia dalam dua proses bersejarah bangsa ini, yaitu: proses menegakkan kemerdekaan dan pembangunan. solidaritas dan nasionalisme rnungkin akan tercermin dalam pinjaman negara 1946. Di sisi lain, kita juga akan mengkaji melalui sumber-sumber arsip, bagairnana negara mengelola solidaritas, nasionalisme, sekaligus mengelola dana yang terkumpul dari rakyatnya, termasuk di dalamnya konsistensi sikap untuk mempertanggungjawabkan dan mengembalikannya.

MIGRASI TAHUN 1870-1942: KAJIAN MIGRASI WANITA PRIBUMI ANTAR WILAYAH DI DALAM PULAU JAWA.

Lucia Yuningsih

Migrasi, merupakan salah satu kegiatan penduduk Jawa yang telah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum kedatangan bangsa Barat. Pelaku migrasi tidak hanya kaum laki-laki tetapi juga kaum wanita. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi, tidak hanya menarik perhatian kaum pria saja, tetapi juga menarik perhatian kaum wanita. Pada tahun 1870an, ketika pemerintah Hindia Belanda melaksanakan liberalisasi ekonomi, migrasi wanita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan proses produksi kapitalisme agraris Barat. Perkebunan, pertambangan dan pabrik, membutuhkan buruh yang jumlahnya cukup banyak, dan buruh wanita merupakan tenaga kerja yang murah, sehingga memberikan keuntungan yang besar pada para pemilik modal. Perubahan yang berkaitan dengan kebijakan politik-ekonomi yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. monetisasi yang merupakan bagian dan sistem ekonomi kapitalistik, menyebabkan penduduk menjadi sangat tergantung pada uang. Penduduk membutuhkan uang untuk membayar pajak, untuk membeli barang-barang kebutuhan hidup termasuk kebutuhan kebutuhan yang menjadi bagian dan gaya hidup. Kebutuhan ekonomi dan juga kebutuhan sosial yang relatif besar, dipikul bersama oleh seluruh keluarga. Dalam pengertian ini, bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab kaum laki laki saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab wanita. Di pedesaan Jawa, wanita mempunyai peran yang besar dalam lalu lintas ekonomi. Wanita tidak hanya mengerjakan pekerjaan domestik tetapi juga full patner suami di sawah. Di samping itu, ada pula yang berdagang dan bekerja di luar rumah, bahkan ke tempat yang relatf jauh dari keluarga dan tempat tinggalnya. Dalam konteks ini nampak bahwa budaya yang berlaku relatif tidak menghambat kegiatan ekonomi wanita. Bahkan lewat budaya, wanita tereksploitasi tenaganya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

Migrasi wanita sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, kelangkaan pekerjaan di wilayahnya dan perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan wilayah di luar wilayah tempat tinggalnya. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai beberapa persoalan, yakni mengapa wanita pribumi Jawa tertarik untuk migrasi. Dalam konteks in akan dijelaskan faktor-faktor perubahan sosial ekonomi di Jawa sebagai dampak dan kolonialisme dan pelaksanaan sistem ekonomi kapitalisme Barat, perkembangan sistem transportasi, dan budaya Jawa yang melingkupi gerak wanita, yang menjadi faktor pendorong. Di samping itu, perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan wilayah tujuan migrasi, upah buruh, fasilitas kerja, menjadi faktor yang menarik wanita untuk bermigrasi perlu untuk dijelaskan. Berkaitan dengan faktor budaya Jawa, sejauh mana budaya Jawa yang patriakis mengakomodasi kepentingan wanita? apakah ada benturan-benturan budaya dengan kepentingan ekonomi. Bagaimana proses rekruitmen, kelompok-kelompok sosial wanita yang mana yang aktif bermigrasi?, bagaimana arah gerak dan pola atau model migrasi wanita pribumi Jawa dan waktu ke waktu. Pada tahun 1930an terjadi depresi ekonomi dunia. Apa pengaruh depresi ekonomi

bagi kegiatan migrasi? Apakah dengan adanya depresi ekonomi arus migrasi berhenti ataukah malah bertambah besar?

Tahun 1 870an, menjadi batas awal kajian ini dengan alasan bahwa pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan liberalisasi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja. Batas akhir dan kajian ini adalah tahun 1942, yakni waktu berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Dalam kurun waktu antara tahun 870 sampai tahun 1942, satu periode yang relatif panjang yakni 72 tahun, yang diselingi dengan periode depresi ekonomi, akan dapat dilihat perubahan dan perkembangan migrasi baik gerak maupun modelnya. Pulau Jawa dipilih sebagai batasan spasialnya karena berpenduduk paling padat apabila dibandingkan pulau-pulau lain seperti Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, dll, di samping itu menjadi wilayah yang penting untuk kegiatan eksploitasi ekonomi dan tenaga kerja.

Rekonstruksi masa lampau yang ada, bercorak androcentric yakni sejarah yang berpusat pada kegiatan kaum laki-laki saja, sedangkan rekonstruksi masa lampau yang bercorak gynocentric atau sejarah yang berpusat pada wanita belum banyak ditulis. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa wanita mempunyai sejarahnya sendiri dan memainkan peranan yang penting dalam perjalanan bangsanya. Namun demikian, gerak wanita tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya, artinya bahwa wanita dapat memainkan peranan penting dalam kehidupan berbangsa tidak dapat dilepaskan juga dari dunia kaum laki-laki. Tulisan ini dimaksudkan juga untuk memberi ruang bagi wanita sebagai "wong cilik" dalam sejarah bangsa Indonesia.

GABOENGAN ROMUSHA NGAMOEK (GARONG) DI KAKI PEGUNUNGAN DIENG BANJARNEGARA, TAHUN 1942 — 1957

M. ALie Humaedi

Kehadiran balatentara Jepang tidak hanya berdampak pada perubahan politik kekuasaan, tetapi juga mempengaruhi kondisi dan sistem sosial mas arakat secara cepat. Keterkejutan atas zaman alih kekuasaan kedua menyebabkan masvarakat Indonesia belum siap dan belum terkoordinasi dalam ikatan-ikatan sosial. Keadaan semacam mi berlangsung sampai tahun 1960an. Di beberapa lokal tertentu. konflik antar beberapa kelompok keagamaan, ras. dan kepentingan ekonomi-politik kerap muncul dengan penyebab ketidakadilan dan ketidaksejahteraan. Satuan-satuan militer desertier dan gerombolan-gerombolan liar semakin memperkeruh suasana zaman itu.

Salah satu pengaruh langsung dan kehadiran Jepang adalah penvebaran dan pemetaan kader-kader pemuda yang dilatih secara militer dalam pengorganisasian PETA (Pembela Tanah Air) dan Seinendan. Tak terkecuali usaha Jepang dalam merekrut tenaga-tenaga rakyat untuk kepentingan mit iter, seperti program romusha. Program terakhir mi rnemba\va pengaruh besar bagi fenomena sosial khususnva di wilayah Pegunungan Dieng Banjamegara di tahun 1942-1957. Mantan-mantan romusha secara sadar membentuk ikatan-ikatan 'normatif' baik dan jahat, salah satunya adalah Gaboengan Romusha Ngamoek atau biasa disingkat Garong.

Dalam makna berbeda, menggarong yang dilakukan gerombolan mantan romusha kerap dianggap sebagai bentuk lain dan perjuangan mempertahankan dan membela kemerdekaan negeri. Kelompok garong Maling suci Tjondro Soeroso, misalnya dimitologisasikan sebagai 'pahlawan rakyat semesta' yang membela hak-hak rakyat, menumpas kebatilan dan kejahatan yang dilakukan para pengkhianat bangsa. Maling suci ditakuti oleh orang-orang Cina jahat dan pamong praja bejat, tetapi dielu-elukan kehadirannya oleh masyarakat biasa dan masyarakat pejuang di pegunungan Dieng. Perbuatan menggarongnya dianggap bagian dan ibadah, pengganti ibadah sakral seperti shalat.

Konsepsi ini yang mendekatkan Tjondro dengan laskar Hizbullah Kasim Nachrowi di Banjarnegara. Mitologisasi "pahlawan rakyat semesta" biasanya hadir bersama dengan mitologisasi "penjahat rakvat semesta" Posisi yang terakhir ditempati oleh gerombolan Orang Jobong pimpinan Sudarto cs dan kelompok Bengseng Suci pimpinan Suhadi. Rangkaian pergulatannya kemudian menjadi *oral history* dan identitas yang dibakukan terus menerus dan mengharumkan nama Tjondro Soeroso dan Maling Sucinya dalam sejarah lokal di kawasan ini.

PERADABAN LAUT DAN PERMASALAHAN TOPONIMI PULAU-PULAU DI SEKITAR SUMATERA

Dr. M. Nur, M.S.

Masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga telah dibicarakan pemerintah sejak awal kemerdekaan, tepatnya 17 Februari 1969, ketika Pemerintahan Soekarno mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Negara Republik Indonesia. Persoalan landas kontinen tidak pernah selesai karena rumitnya letak suatu pulau-pulau dalam bentuk taburan yang besar. Sebahagian pulau-pulau milik Indonesia umumnya dan di sekitar Pulau Sumatera khususnya belum punya nama. Kondisi ini sangat beresiko bagi Indonesia karena bisa menjadi pemicu munculnya pengklaiman pulau yang tidak jelas oleh negara tetangga. Sekitar 17.000 pulau yang dimiliki Indonesia hanya 5.000 pulau yang telah diberi nama. Jumlah inipun belum valid karena luasnya perairan Indonesia dan banyaknya taburan pulau-pulau yang belum mempunyai nama.

Penyelesaian permasalahan toponimi dimulai pada tingkat kecamatan, kabupaten ataupun propinsi secara bertahap. Penggunaan kata untuk pemberian nama sebuah pulau haruslah mencerminkan kekhasan pulau itu, seperti : hasil bumi, hasil hutan, tipe ikan, bahan tambang, peran sejarah, kultural, sosial, jenis tanah atau pasir, tumbuhan khas, dan sebagainya yang terdapat di pulau-pulau sekitar Sumatera. Sebagian besar dari pulau-pulau kecil yang berada di sekitar Pulau Sumatera telah memiliki peradaban laut sejak masa klasik, tetapi belum memiliki nama. Pulau-pulau ini tersebar di Propinsi Kepulauan Riau (lebih kurang 156 pulau di Kabupaten Bintan, dan ratusan pulau di kabupaten lainnya), Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Sumatera Barat, dan Propinsi Sumatera Utara. Sebagian besar dari pulau yang belum bernama tersebut telah dikenal oleh masyarakat setempat, terutama oleh para nelayan. Mereka menyebut pulau yang didarati sesuai dengan kekhasan peradaban di pulau itu, namun belum tercatat dalam peta Indonesia.

Pulau-pulau yang belum memiliki nama secara nasional sudah seyogyanya dimunculkan dalam peta Indonesia dan dunia, karena dengan tercantumnya nama tersebut dapat menambah kekuatan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Wawasan Nusantara hanya dapat terwujud jika tidak ada lagi permasalahan Toponimi Indonesia. Sistem pertahanan tetap rawan apabila bangsa Indonesia tidak mengenal pulau-pulau yang dimilikinya. Kebutuhan yang sangat urgen bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah teritorial adalah memberi nama pulau yang belum bernama supaya dikenal oleh masyarakat dunia

PUSAT, DAERAH DAN PERBENTURAN POLITIK, MILITER DAN EKONOMI SENTRALISME DAN PERLAWANAN DAERAH (1945-2005)

Prof. Dr. Mestika Zed

Apakah Indoensia yang dibayangkan oleh The Founding fathers Republic di masa lalu masih akan tetap bertahan sebagaimana yang dirisaukan oleh generasi anak bangsa akhirakhir ini?. Adakah suatu kontinuitas benang merah yang dapat dipelajari dari pelbagai macam bentuk perlawanan daerah selama 60 tahun Indonesia merdeka, sehingga dapat diidentifikasi pola-pola penyebabnya maupun akibatnya?. Makalah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan sejarah (Historical Explanation) terhadap isu-isu kontemporer mengenai "gagal Negara" dalam kerangka NKRI yang berkembang dewasa ini. Dalam makalah ini akan ditunjukkan, bahwa pengalaman Indonesia dalam berbangsa dan bernegara dari masa ke masa senantiasa menyisakan luka sejarah yang tak tersembuhkan. Timbulnya gerakan separatis di pelbagai daerah sepanjang periode Indonesia merdeka, sampai tingkat tertentu, justru disebabkan oleh sikap-sikap sektarian pusat dalam menakhodai NKRI. Lebih dari itu variasi gerakan perlawanan daerah sesungguhnya jauh lebih rumit dari pada sekedar Varian Separatisme. Apabila kita melihat lebih jauh ke belakang, mulai dari yang terkini sejak Era Reformasi akhir-akhir ini, dan seterusnya Orde Baru, Orde Lama tahun 1950-an, bahkan dalam era revolusi nasional, maka terbukti bahwa kepentingan-kepentingan sektarian pusat di bidang politik, militer, dan ekonomi berkontribusi besar terhadap kemumculan gerakan-gerakan perlawanan daerah, terutama perbenturan-perbenturan kepentingan antara Jawa v.s. Luar Jawa, dimana hegemoni politik, militer dan ekonomi pusat tampak menonjol ke permukaan.

KOTA KENDARI DAN DINAMIKA KEBUDAYAAN : SUATU KAJIAN PERSPEKTIF SEJARAH

Muhammad Said D.

Pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32, menumbuhkan berbagai kajian tentang sejarah kota (lokal) di Indonesia. Dewasa ini historiografi kota bermunculan dan menjadi kajian sejarawan dan para ilmuwan sosial. Dinamika kota dan kebinekaan suku bangsa dalam berbagai aspek kehidupan melahirkan berbagai masalah sosial. Kajian tentang kota-kota lama dan kota-kota baru pasca kemerdekaan adalah penting, karena keunikan setiap kota dapat mewakili zamannya yang menyimpan ciri khas budaya tersendiri.

Ada sejumlah permasalahan yang tersimpan dalam problema sosial kekotaan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kota sebagai akibat dari perkembangan kota dan dinamika kebudayaannya. Permasalahan tersebut, seperti tergusurnya warisan budaya masa lampau yang bernilai sejarah, dirusaknya bangunan bersejarah dan peninggalan-peninggalan lainnya, karena tuntutan pembangunan dan/atau merosotnya pemahaman budaya sebagai dampak modernisasi yang mengglobal. Pelestarian warisan budaya yang ditambah dengan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap warisan sejarah menyebabkan ciri khas kota tradisional, kawasan kota kolonial dan ciri kota budaya kehilangan makna dan nilai sejarahnya.

Kota Kendari dan pada umumnya kota-kota lain di Indonesia memiliki ciri-ciri yang sekaligus menunjukkan sejarah kota, misalnya (1)kawasan kota tradisional dengan pembagian spasial berdasarkan status sosialnya; (2) kawasan kota pelabuhan dan perdagangan dengan gaya bangunan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya; (3) kawasan kota kolonial dengan ciri bangunan kastil, benteng, perkantoran dan rumah ibadah; (4) kawasan pribumi yang mengelompok pada kawasan tertentu, dan (5) kawasan komunitas pendatang yang terdiri dari migran dan urban (Kuntowijoyo, 1994). Ciri kesejarahan kota tersebut, dewasa ini sudah banyak yang rusak dan dirusak oleh berbagai kebijakan pemerintah untuk kepentingan pragmatis pembangunan. Penduduk kota yang terdiri dari pertemuan berbagai suku bangsa yang multikultur ini memunculkan berbagai gejolak, jika tidak disertai dengan pemahaman pendidikan multikulturalisme bagi warga masyarakatnya akan menimbulkan ancaman bagi warisan sejarah dan budaya.

Kendari sebagai kota pelabuhan dan perdagangan sudah memainkan peran sebagai bandar transito yang berlangsung sejak paroh kedua abad XIX. Sebagai ibu kota Kerajaan Laiwoi mengalami perkembangan pesat setelah masuknya Belanda dan atas jasa J.N. Vosmaer pada 9 Mei 1831 membangun loji dan istana Raja Tebau di Teluk Kendari, merupakan titik awal berdirinya Kota Kendari. Pemindahan ibu kota kerajaan dari pedalaman (Unaaha) ke pesisir pantai (Ranomeeto) menyebabkan timbulnya konflik antar elit politik. Belanda memanfaatkan konflik ini dengan membantu elit Ranomeeto mendirikan Kerajaan Laiwoi. Kota Kendari bila diamati dari fungsinya, maka dapat disebut sebagai kota pelabuhan, kota dagang, dan kota pusat pemerintah dan ibu kota (Widja, 1989)

Pemerintah kota sebagai simbol kekuasaan melahirkan kekerasan, penggususran dan penghancuran bangunan-bangunan bernilai sejarah. Penduduknya terdiri dari multi etnis dan dengan merefleksikan budayanya masing-masing, sehingga melahirkan konflik-konflik sosial. Perlu sedini mungkin pendidikan multikulturalisme agar generasi muda dan warga kota saling memahami perbedaan budaya masing-masing etnis. Tentu kita tidak menginginkan terjadinya kembali konflik dan kerusuhan sosial antar etnis, seperti peristiwa Ambon, Palu, Sampit dan daerah lainnya di Indonesia.

Kini perlu dipertanyakan kembali, mengapa pada masa lampau Kota Kendari ketika itu masyarakatnya yang bhineka dalam aspek etnis dan budaya, namun hidup damai, berdampingan saling membantu dan tolong menolong. Adakah nilai-nilai yang telah bergeser dalam masyarakat atau masyarakat sudah tidak mengenali lagi akar budaya leluhurnya, karena terpaan globalisasi pada era modernisasi sekarang. Atau kita telah tercabut dari akar budaya, bahkan telah kehilangan nilai-nilai budaya warisan masa lampau bangsa yang paling berharga.

MIGRASI ORANG SASAK SEBAGAI TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN PROSES GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN ORANG SASAK DI PULAU LOMBOK NTB

Mursini Zahiban

Menurut Mukhtar Naim suku bangsa yang ada di Indonesia dilihat dari dinamikanya, digolongkan menjadi suku bangsa perantau dan suku bangsa bukan perantau (Mukhtar Naim), 1984:12)

Orang Sasak (suku bangsa Sasak) yang mendiami pulau Lombok NTB, tergolong ke dalam suku bangsa bukan perantau. Walaupun demikian menurut data terakhir dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang tercatat(legal) di luar negeri, ternyata di Malaysia yang berasal dari NTB (Lombok) menduduki urutan 5 besar, tepat diurutan kedua setelah urutan pertama yang berasal dari Jawa Timur (Harian Lombok Post tanggal 25 Agustus 2006 dan Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB tahun 2006). Belum termasuk TKI ilegal yang berada di Malaysia.

Mengapa mereka berimigrasi sebagai TKI? Bagaimana perkembangan migrasi orang Sasak dari sejak awal hingga akhir tahun 2006? Bagaimana pengaruh migrasi mereka terhadap proses globalisasi dalam kehidupan orang Sasak di Pulau Lombok? Ketiga pertanyaan itulah yang akan dijawab oleh deskripsi makalah ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka deskripsi makalah ini akan berkisar pada:

- a. Keadaan geografis dan demografis Pulau Lombok, Sosial Ekonomi masyarakat Sasak di Pulau Lombok dan daya tertarik bekerja sebagai buruh migran (TKI) di luar negeri sebagai faktor yang mempengaruhi mereka berimigrasi sebagai TKI.
- b. Perkembangan migrasi orang Sasak luar negeri dari sejak awal mulanya orang Sasak bermigrasi ke luar negeri sebagai TKI hingga kini (2006), terutama dilihat dari jumlah, latar belakang pendidikan (berkualitas SDM), lapangan kerja yang dipilih, jalur pemberangkatan dan proses pemberangkatan dan proses perekrutan mereka.
- c. Dampak migrasi orang Sasak ke luar negeri sebagai TKI, terhadap proses globalisasi dalam kehidupan orang Sasak di Pulau Lombok, yang meliputi bidang: sosial ekonomi dan keuangan, sosial budaya, transportasi dan komunikasi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari deskripsi ketiga hal di atas adalah sebagai berikut: migrasi orang Sasak sebagai tenaga kerja ke luar negeri dipengaruhi oleh faktor interen orang Sasak dan Pulau Lombok serta daya tarik faktor sosial ekonomi disamping faktor sosial budaya yang ada di luar negeri.

Migrasi orang Sasak berkembang (mengalami perubahan) dari sejak awal hingga kini 2006. Migrasi orang Sasak sebagai tenaga kerja ke luar negeri itu sangat mempengaruhi proses globalisasi dalam kehidupan orang Sasak di Pulau Lombok. Dalam sosial ekonomi keuangan sosial budaya, transportasi dan komunikasi.

H.M. ASHADIE: PENGUSAHA PRIBUMI ROKOK KRETEK KUDUS, 1894 – 1952

Muhammad Wasith Albar

Industri rokok kretek muncul di Kudus pada akhir abad ke-19 (1870). Pelopornya adalah Haji Djamhari dan kelompok priburni. Sedangkan pengusaha dan kelompok etnis Cina baru muncul awal abad ke-20, tepatnya tahun 1918 yaitu kelompok NV. Trio/Moeria dan Nojorono (1932). Dalam perkembangannya industri rokok kretek Kudus dan kelompok pribumi, tidak hanya rnendapatkan pesaing dan kelompok etnis Cina Kudus saja, tapi juga dari daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Batavia. Di mana daerah-daerah ini, yang semula sebagai daerah konsumen industri rokok kretek Kudus berganti menjadi daerah produsen rokok kretek.

H.M. Ashadie (1894—1952), sebagai salah satu pengusaha pribumi rokok kretek di Kudus menarik untuk dijadikan kajian. Mengingat H.M. Ashadie sebagai pengusaha dan kelompok priburni mengalami masa-masa sebelum dan sesudah keterlibatannya kelompok etnis Cina dalam industni rokok kretek, berubahnya daerah-daerah konsumen menjadi daerah produsen, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan dan masa revolusi. Pertanyaan yang ingin dijawab antara lain, bagairnana H.M. Ashadie dalam mengelola perusahaannya? Adakah konflik pengusaha-pengusaha pribumi dengan pengusaha dan kelompok etnis Cina dengan terjadinya konflik anti Cina (1918) di Kudus? Faktor-faktor apa saja yang menjadikan pengusaha pribumi dalam perkembangannya semakin kalah dengan pengusaha etnis Cina? Apakah dapat dikatakan bahwa pengusaha pnibumi yang memang pada awalnya sebagai 'promoters'' namun akhirnya menjadi "parasites". Sedangkan etnis Gina yang datang belakangan dan kelas "pariah" menjadi "paragon".

TAFSIR SEJARAH HURUF KECIL VS BESAR

Mudji Sutrisno

1. Sejarah mulai ditulis ketika kesadaran manusia sampai ke subyektivitas dirinya sebagai pribadi yang riwayat peristiwa dalam pemahaman waktu linier dengan tarikh tahun yang maju lurus ada awal (alpha) dan ada akhir (omega).

Kesadaran waktu linier merupakan pencerahan budi manusia akan keindividuannya sebagai makhluk rasional, bebas yang menolong konstruksi pandangan hidup siklis dimana ia hanya bagian dari siklus hidup yang berputar berlingkaran ada di bawah atau ada di atas dan lalu ke bawah lagi.

- 2. Sejarah ditulis untuk kepentingan legimitasi kuasa penguasa atau raja atau petinggi maka sang pujangga dititahkan untuk menulis sejarah huruf besar dengan isi jasa Sang penguasa dan keabsahannya menjadi penguasa. Silsilah genealogi pun demi legimitasi raja.
- 3. Ketika kesadaran pencerahan dan kritis yang menjadi sumbu api ilmu-ilmu humaniora meneliti apakah benar manusia adalah subyek penentu sejarahnya sendiri atau ia dibentuk oleh relasi-relasi sosial, ekonomis, strategis yang mengkonstruksi dirinya menjadi bagian saja dari sistem, struktur atau konstruksi (bentukan) mulai dari *epistemologis* (menyangkut hubungan makna benar); *sosiologis* (relasi kekuasaan); *politis* (hegemoni penguasaan kolonialisme) dan *ekonomis* (penguasaan penundukan basis-basis material kapital modal.

Di ranah pencerahan budi yang kritis, muncul lawan penentu sejarah besar yaitu sejarah huruf kecil dalam historiografi para penentu sejarah kelas akar rumput atau petani, buruh atau siapa saja berhak menulis sejarahnya sendiri karena hegemoni penentu kebenaran yang dipusatkan (*logosentrisme*) dan didukung kekuasaan penentu makna kebenaran tidak berlaku lagi lantaran edukasi merata telah menyadarkan keragaman rasionalitas tiap individu untuk menamai sendiri realitas (*homo significans*) dan menulis sejarahnya sendiri yang ia pandang, ia hayati, ia ziarahi dalam "laku hidup" sebagai benar!

4. Dari sejarah huruf besar ke kemajemukan sejarah-sejarah huruf kecil karena setiap individu adalah penafsir realitas hidupnya, ia adalah sang pemberi makna peristiwa-peristiwa hidupnya serta sekaligus penulis riwayat hidupnya sendiri.

Persoalan epistemologis disini adalah *pertama*, apakah setiap sejarah huruf kecil sama-sama dibaca sebagai sejarah yang "benar"? Apakah catatan harian gadis remaja Anne Frank yang dikejar-kejar Gestapo Nazi sejajar kebenarannya dengan otobiograf sejarah pengejarannya yaitu Hitler? Disini penentu kebenaran fakta dan peristiwa sebagai sejarah mengundang kriteria-kriteria penentu epistemologisnya.

Kedua, bila sejarah-sejarah yang ditulis dalam teks dan sebagai teks tertulis itu ditafsirkan, maka persoalan kebenaran menjadi lebih kompleks karena punya 2 metodenya yaitu wilayah hermeneutika (baca: penafsiran) teks di satu pihak dan di lain pihak harus ditanya kritis untuk kepentingan apa teks ditulis ? Siapa penulis teks ? Lalu apa makna (meaning) dan signifikansi teks itu untuk konteks jamannya dan konteks sekarang ?

Ketiga, ketika Michel Foucault meneliti genealogi pengetahuan dalam hubungan dengan kekuasaan dan sudah mulai terjadinya hegemoni tafsir makna sejak teks belum ditulis yaitu dalam diskursus atau wacana, maka tersingkaplah kajian-kajian hermeneutika pasca kolonialisme yang dirintis oleh Edward Said lalu Homy Bhaba dkk, yang intinya mau mengajak kita secara kritis *pertama-tama*, cara berpengetahuan, berselera seni, bergaya hidup dan berpikir serta berperilaku terlebih pada kedalaman-kedalaman mentalitas dari para korban penjajahan (kolonialisme) yaitu dunia-dunia ketiga bekas koloni-koloni; ternyata terus mengidap dan membawa konsep pikir; etika maupun mentalitas penjajahnya.

Berangkat dari sejarah-sejarah yang ditulis oleh para orientalis dengan tujuan kepentingan penaklukan di wilayah mentalitas dan pikiran, maka nada dasar teks-teks orientalis adalah mengabadikan hegemoni penjajahnya dalam kebijakan-kebijakan perbukuan, sekolah, pustaka serta wilayah strategi budaya dan seni. Di kita, bisa kita bandingkan tahap-tahap perkembangan kesadaran untuk "keluar" dari episteme dan mentalitas penjajah dalam Balai Pustaka bertahap tiga dan yang ketiga mau memberi bacaan demi Indonesia tercerahkan kalau dibahasakan versi kini.

Kedua, hermeneutika pasca kolonial jelas-jelas menaruh dalam pengkritisan posisi biner antara aku dan yang lain (the other). Tetapi "yang lain" ini selalu subordinatif di bawah ego penjajah dalam wacana; relasi sosial tuan dan hamba maupun dalam relasi-relasi yang lebih subtil berselera seni. Dengan kata lain, identitas diri menjadi identitas yang dikonstruksi atau dibentuk mulai dari cara melihat kenyataan di pikiran sampai ke selera berpakaian yang mengacu ke tuan penjajahnya.

Ketiga, atas penelitian-peneltian hipotetis tekstual di atas, saya menyusun dengan para mahasiswa buku hermeneutika postkolonial (Kanisius, Yogya, 2004) untuk mengundang penelitian teks-teks lebih lanjut sebagai berikut.

3.1 Tafsir tokoh Arok – Dedes dalam novel Pramoedya Ananta Toer; Perempuan Pantainya dan terutama tetralogi Buru : Bumi Manusia dengan "anak-anaknya" akan amat membuka kajian sejarah dalam tafsir postkolonial. Lalu membandingkan antara teks Roro Mendutnya J.B. Mangunwijaya (Trilogi Lindri, Genduk, Mendut) dengan teks Roro Mendutnya Ajip Rosidi? Penafsiran atau hermeneutika sejarah lewat teks menjadi tantangan besar.

Dalam uraian nanti khusus mengenai menafsir akan disajikan terutama kerja sebenarnya adalah kerja menafsir.

Menafsir teks sebagai teks menafsir dalam andaian ada dulu wacana tradisi lisan dan "sitz im Leben" sebelum proses ditulis lalu menafsir teks tertulis dengan kesadaran bahwa tulisan hanyalah salah satu perumusan lewat bahasa tulis apa, peristiwa, siapa dan kejadian yang masih lebih banyak tak tertulis tetapi dihayati dalam ritual; kearifan lokal melalui saga, mitos, semiotika kajian-kajian budaya (*cultural studies*).

LAUT TIMOR DAN SUNGAI BENANAIN DALAM PERSPEKTIF PERKERNBANGAN SOSIAL POLITIK DI TIMOR BARAT PADA ABAD KE 17

Munanjar Widiyatmika

Laut Timor dalam klasifikasi budaya Timor dianggap sebagai laut jantan karena gelombang dan angin yang ganas. Namun pelabuhan di Pantai Selatan Timor banyak dilayari dan disinggahi perahu dagang pengangkut cendana. Salah satu pelabuhan Cendana penting di Motadikin di muara sungai Benanain, Dataran Besikama di daerah hilir sungai Benariain merupakan dataran luas yang subur. Daerah hulu yang merupakan anak-anak sungai berada di perbukitan di pegunungan di wilayah Timor Tengah Utara dan Tirnor Tengah Selatan merupakan daerah pertumbuhan alamiah kayu cendana. Sungai Benanain seperti sungai di pulau Timor pada umumnva pada musim kemarau airnya hampir kering, tepian kiri kanan sungai dijadikan jalan lalu lintas para pengangkut cendana dari hulu ke hilir. Para pengungsi dari Malaka yang dikenal dengan istilah Sinan Mutin Malaka datang berombongan melalui jalan dagang sampai di muara sungai Benanam. Rombongan 4 bersaudara kemudian mendirikan 4 kerajaan bersaudara kerajaan Wewiku, Wehali, Fatuaruin dan Likusaen. Kerajaan Wewiku Wehali tumbuh dan berkembang sebagai kerajan terbesar yang menguasai sebagian besar wilayah Tirnor Barat. Strategi monopoli penguasaan daerah hulu dan hilir sungai Benanain menjadi penopang utarna keberhasilan kerajaan Wewiku Wehali menjadi kerajaan terbesar di Tirnor. Untuk menjamin pasokan kayu cendana penguasaan daerah pertumbuhan alamiah cendana di hulu sungai Benanain yang herupa anak-anak sungai di pegunungan menjadi penting. Untuk maksud tersebut diatur strategi rnengirirnkan para pernuda bangsawan dari Belu Selatan mernudiki sungai Benanain sarnpai ke anak sungai untuk menguasai daerah pertumbuhan alamiah kayu Cendana. Agar penguasaan wilavah lebih berhasil ditempuh politik perkawinan antara para pernuda dari Belu Selatan, di pusat Kerajaan Wewiku Wehali dengan putri-putri bangsawan lokal. Lahirlah keturunan campuran darah Tetun (Bein) dengan Atoni Melo yang tumbub menjadi para penguasa lokal yang disebut usif.

Keturunan inilah yang menjadi peletak dasar sosial potitik di Timor Barat. Me lalui sungai Benanain dan anak sungai tidak saja diangkut kayu cendana dari hulu ke hilir, tetapi juga harang dagangan yang dibawa para pedagang berupa: gading, manikmanik, kain sutra, keramik, peralatan besi. .Masuknya harang-barang tersebut mernperkaya khasanah budaya di Timor Barat. Untuk mempedancar pengangkutan cendana dirnasukkan kuda yang di Timor disebut Bijae Kase (kerbau asing) Masuknya kuda tidak saja niemperlancar pengangkutan 'cendana tetapi juga meningkatkan daya jelajah pasukan-tradisional di wilayah pertumbuhan cendana. Melalui laut Timor para pedagang menjadi leluhur pendiri kerajaan penting Amanantun.Larnakanen dan Wewiku Wehali. Para leluhur pendiri kerajaan menyusun rurnah adat dengan bentuk perahu terbalik sehagai monumen kedatangan mereka. Melalui laut Timor para pendatang memperkenalkan tradisi perang dengan pengayauan.

MENELUSURI JEJAK SANG PUTRI: DINAMIKA PEMILIHAN "PUTRI" INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

Mutiah Amini, S.S., M.Hum.

Tulisan ini merupakan bagian dari studi gender yang bertujuan untuk mencermati dinamika pemilihan putri Indonesia pada masa Orde Baru. Bagi kajian sejarah Indonesia, masa Orde Baru merupakan sebuah masa yang sangat penting. Dalam periode inilah berbagai kebijakan pemerintahan disusun, berbagai kemajuan masyarakat diraih, tetapi dalam periode ini pula berbagai permasalahan sosial muncul. Berdasarkan hal itu, melalui studi ini penulis ingin melihat bagaimanakah sebenarnya kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap masyarakatnya, baik laki laki maupun perempuan, melalui sebuah fenomena sosial yang sangat penting, khususnya dalam even pemilihan putri.

Tema mengenai pemilihan putri sengaja diambil karena melalui tema inilah dapat dicermati banyak hal. Pertama, dalam ajang pemilihan perempuan menjadi individu yang ditampilkan dan dinilai di sebuah arena publik. Di sinilah kriteria bagi perempuan dibuat. Munculnya kriteria tentu saja merupakan penanda bahwa menjadi putri Indonesia haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria ini kemudian menjadi alat analisis yang penting dalam studi ini. Oleh karena itu, penting untuk dilihat kriteria pemenang itu seperti apa serta siapa yang mengatur dan merumuskan kriteria pemilihan putri tersebut.

Kedua, dan kajian historis. Kurun waktu terjadinya pemilihan putri Indonesia yang dijadikan batasan bagi studi ini. Pada masa Orde Baru pemilihan putri Indonesia muncul dalam berbagai bentuk dan nama, mulai dan miss, queen, putri, ratu, dan sebagainya. Namun, ketika pemenang even tersebut menjadi duta untuk mengikuti kontes serupa di tingkat internasional, tentangan bahkan halangan dilontarkan pemerintahan Orde Baru dalam hal ini Menteri Urusan Wanita — yang kemudian berbagai pelarangan dikeluarkan. Meskipun di tengah kontroversi, ajang pemilihan dan kontes perempuan di tingkat internasional tetap diikuti, mulai dan pengiriman Sylvia Taliwango (1968), Mani Hardjo (1969), Irma Hadisurya (1970), hingga Titi Dwijayati (1982).

Selanjutnya, menarik untuk dilihat aspek sosial dan ajang pemilihan dan pengiriman putri ini. Kajian lokal juga tidak dapat dipisahkan dan kajian global yang melingkupi kondisi tersebut. Untuk itu, hal ketiga yang sangat penting dalam studi pemilihan putri Indonesia adalah mengaitkan pemilihan tersebut dengan kepentingan ekonomi-sosial-politik yang lebih besar. Artinya, dalam hal ini melihat keterkaitan antara pemilihan putri di tingkat lokal (Indonesia) dan kepentingan ekonomi sosial-politik di tingkat yang lebih besar (kepentingan internasional), dengan melihat bagaimanakah posisi pemilihan putri Indonesia ini bagi kepentingan lokal dan global.

Agar dapat menyajikan fakta sesuai yang diharapkan, berbagai data dipergunakan dalam tulisan ini. Data-data tersebut adalah dokumen, data visual, dan rekaman hasil wawancara. Dokumen untuk kajian mi didapat dan surat-surat keputusan pemerintah yang relevan dengan tema utama, selain juga publikasi sezaman, baik yang termuat dalam surat kabar, majalah, maupun internet.

Data visual didapatkan dan foto-foto yang menvisualkan penyelenggaraan pemilihan tersebut. Terakhir, hasil rekaman wawancara digunakan dalam tulisan mi sebagai pembanding bagi data-data lainnya yang sudah terkumpul. Dengan kritik yang tajam terhadap data-data yang terkumpul diharapkan tulisan ini dapat menyajikan fakta sesuai yang diharapkan.

MENULIS SEJARAH KELOMPOK MINORITAS: UNTUK SIAPA? "CINA MEDAN' DALAM KAJIAN 1930-1960

Nasrul Hamdani

Sebagaimana kelompok minoritas asing bukan bumiputera lainnya, orang 'Cina Medan' dan dahulu hingga saat mi hidup dalam lingkungan eksklusif dengan sesamanya, terpisah secara sosial dan masyarakat bumiputera. Orang bisa beralasan; 'keadaan itu sudah lama terjadi dan Belanda-lah yang membuatnya'. Namun bukan itu substansinya, membeda bedakan adalah kebijakan umum kaum kolonial di muka bumi mi. Substansi sebenarnya adalah bagaimana dampak dan kebijakan sosial yang diskrimantif dan segregatif itu di kemudian han? 'Sejarah' adalah satu dan sekian hal yang merasakan dampak dan peristiwa historis di masa lalu itu. Historiografi kontemporer Indonesia cenderung tidak memberi ruang untuk sejarah masyarakat Cina. Begitu pula sebaliknya, masyarakat Cina pun terkesan tidak ingin menampilkan cerita sejarahnya secara terbuka. Sedikit sejarahwan yang bukan Cina tetapi ingin mengetahui sejarah orang Cina mengalami banyak kendala. Selain kendala teknis yang relatif dapat diatasi, kendala psikologis yang mengesankan warga senior Cina enggan mengingat sebagian atau seluruh babak sejarah dalam hidupnya, tidak lain disebabkan oleh sifat sejarah itu sendiri. Pada satu masa historiografi Indonesia terkesan mengakomodasi orang Cina sebagai saudara, tetapi pada periode berikutnya orang Cina menjadi musuh bersama. 'Secara empiris' inilah yang mendorong orang Cina suka mengamalkan politik mengingat dan melupakan. Tulisan mi mencoba mengulas perkembangan masyarakat Cina di Medan yang dianggap 'lain' pada tahun 1930-1960, masa paling dinamis dalam sejarah Indonesia. Stabilitas, ada perang, revolusi sampai mencoba-coba demokrasi. Perkembangan itu ke manapun arahnya jelas berpengaruh bagi siapa saja termasuk pada masyarakat Cina. Selain ulasan, tulisan mi akan memaparkan beberapa catatan pengalaman menulis sejarah orang Cina di Medan.

REINTERPRETASI KASUS LEBAK

Prof. Dr. Nina Herlina M. S

Keturunan Bupati Lebak, RTA. Karta Nata Negara dan keturunan Demang Parungkujang, Raden Wira Kusumah, hingga sekarang harus menanggung beban sejarah yang berat. Mereka dicap sebagai keturunan penguasa yang dianggap melakukan kejahatan pemerasan dan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hal ini dapat diketahui dalam kesempatan penelitian yang penulis lakukan beberapa bulan lalu.

Judgement ini harus mereka tanggungkan sebagai akibat terbitnya buku Max Havelaar yang diterbitkan pada tahun 1859 oleh Asisten Residen Lebak, Douwes Dekker alias Multatuli, yang telah diterjemahkan dan mengalami cetak ulang berkali-kali beredar luas di Eropa dan tentu di Indonesia. Dalam buku ini Douwes Dekker membeberkan tindakan sewenang-wenang Bupati Lebak dan menantunya (Demang Parungkujang) terhadap rakyatnya. Namun, perlu dijelaskan juga bahwa tindakan Douwes Dekker untuk mengungkap "kejahatan"kedua pejabat pribumi itu tidak disetujui oleh Residen Banten bahkan oleh Gubernur Jenderal sehingga Douwes Dekker hanya empat bulan saja menjadi Asisten Residen Lebak dan dia dipulangkan ke negrinya.

Betapa hebatnya visi Multatuli mempengaruhi masyarakat luas hingga citra negatif tentang kedua pejabat itu melekat turun temurun. Tentu ini dirasakan sebagai ketidakadilan terutama oleh keturunan keluarga Bupati Lebak tersebut di atas, sehingga penulis tergugah dan mencoba untuk melakukan reinterpretasi atas kasus tersebut dengan pendekatan hermeneutis dalam tradisi Weberian.

Kata kunci: Reinterpretasi, pendekatan hermeneutis, konsep Weber.

RUTINISASI KARISMA: KAJIAN ATAS DATA PRASASTI-PRASASTI DI ASIA TENGGARA PADA ABAD XI-XIV MASEHI

Ninie Susanti

Konsep kepeminipinan tradisional akan senantiasa terkait dengan pengertian rnengenai kekuasaan tradisional, karisma, wewenang dan legitiminasi. Keempat aspek tersebut harus diakui sebagai awal dan daya kekuatan yang harus dimiliki seorang pemimpin di dalam inemegang tapuk pernerintahan kerajaannya. Karisma dipaharni dengan kaitannya dengan kualitas yang luar biasa dan suatu pribadi sesuai dengan pandangan orang - orang yang rnenilainya.

Karisma pada masa Jawa Kuno merupakan prinsip organisasi kerajaan yang permanen dan rutin, karena itu sangat dimungkinkan karisma yang diciptakan dan menempel pada sosok seorang raja, diteruskan oleh raja-raja yang memerintah sesudahnya. Hal demikian ini disebut juga dengan rutinisasi karisma. Bentuk rutinisasi karisma ini sebagai contoh misalnya pernakaian cap kerajaan (lancana) atau penerapan pola pemerintahan yang meniru raja yang dianggap berkarisma tersebut.

Raja Airlangga adalah seorang raja besar yang pernah mernerintah Jawa pada abad XI Masehi (1019-1043 Masehi), berdasarkan isi prasasti yang dikeluarkan selama ia memerintah, dapat disimpulkan bahwa ia telah berhasil menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran dengan cara melakukan perbaikan di berhagai sektor kehidupan bernegara.

Berdasarkan penelitian atas prasasti-prasasti Jawa Kuno dan kajian terhadap prasasti di Asia Tenggara pada abad XI-XIV Masehi tenlihat terjadinya rutinisasi karisma. Diantaranya tergambar pada isi prasasti raja-raja Janggala dan Panjalu (abad XI-XIV Masehi), isi prasasti-prasasti raja Bali Jaya Sakti dan Jayapangus (abad XII Masehi),

Isi prasasti Phinieanakas dan raja Jayayarman VII (1181-1218 Masehi) di Khmer dan sisi prasasti Raja Karnhaeng (1283-1317 Masehi) di Thailand.

Kebesaran raja Airlangga dicatat sebagai bagian penting di dalam kerangka Sejarah Kuno Indonesia, khususnya Sejarah Kuno se-Asia Tenggara pada umumnya.

GERAKAN "KAWI PACT" DAN "HILANGNYA" TAN MALAKA

Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si

Tan Malaka, salah seorang pejuang menuju kemerdekaan RI yang kontroversial. Keberadaannya sering misterius, baik kemunculan dalam panggung Pergerakan Nasional, maupun akhir dan karir politik dan perjuangannya. Latar belakang mi yang menarik peneliti melakukan kajian kritis dan holistik terutama menyangkut masalah perjuangan GRN dalam bingkai "Kawi Pact" dan masa akhir hayat Tan Malaka.

Masa-masa krusial di seputar pergolakan politik nasional setelah merdeka, ditandai dengan upaya saling melenyapkan masing-masing kekuatan politik dalam merebut hegemoni sebagai pewaris sah Republik. Intrik yang terjadi menempatkan pergulatan antara kekuatan politik yang nyata-nyata berbeda ideologi, maupun sayap yang berbeda dan sebuah kekuatan politik yang sebenarnya seazas. Situasi itu yang menyebabkan Tan Malaka memimpin "Persatuan Perjuangan" yang beroposisi terhadap Kabinet Sjahrir, dan terakhir ketidak percayaannya terhadap Prokiamasi Soekarno-Hatta. Situasi itu yang melahirkan gerakan revolusioner di lereng Gunung Kawi, Malang Selatan.

Merekonstruksi peristiwa "Kawi Pact", dan terutama meningga!nya Tan Malaka tidak mudah, sebab nuansa politisnya yang sangat kental dan berlawanan dengan aspirasi umum pemegang kekuasaan. Data berupa arsip atau dokumen hasil masa itu hanya memberitakan ha! yang datar menyangkut situasi politik nasional pasca kemerdekaan. Situasi itu menyebabkan saya melakukan pendekatan penelitian kualitatif, dengan wawancara mendalam pada pelaku yang terlibat penanganan peristiwa itu dan Brigade IV, terutama menyangkut aspirasi dan perjalanan gerakan, serta "hilangnya" Tan Malaka. Uji kompilasi silang dilakukan terhadap seorang pimpinan Brigade (dan Kelasykaran) yang diakui sebagai bagian atau Slagorde gerakan itu.

Hasil kajian: secara umum dapat dikatakan bahwa Gerakan "Kawi Pact" dibentuk sebagai koreksi sekaligus resistensi terhadap Prokiamasi Soekarno-Hatta yang dianggap banyak penyimpangan. Gerakan mi mampu merangkul sebagian dan kesatuan organik Be IV yang bersimpati, serta beberapa kesatuan/kelasykaran lepas yang ada di Malang. Tan Malaka diculik dalam acara pertemuan di Nganjuk oleh kesatuan di bawah Be IV, dan dengan pertimbangan kepentingan menjaga stabilitas politik waktu itu benita ini tidak diekspos.

Kata-kata Kunci: Gerakan Politik, "Kawi Pact", Meninggalnya Tan Malaka.

PERDAGANGAN BUDAK DI NUSA TENGGARA SAMPAI ABAD KE-19

Nuryahman, SS

Kepulauan Nusa Tenggara yang letaknya di antara wilayah Imdonesia bagian barat (Jawa, Surnatera, Kalimantan) dan kepulauan bagian tirnur (Maluku dan Papua), merupakan penghubung dua wilayah tersebut, bahkan dengan kawasan Asia dan Australia Keterlibatan kawasan Nusa Tenggara dalam aktivitas perdagangan sudah lama terjadi baik itu lokal, regional maupun internasional dan berlangsung jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Informasi awal mengenai perdagangari di wilayah ini banyak diperoleh dari sumber-sumber Cina, juga berita dari Tom Pires. Jauh sebelum abad ke-19 telah terjalin hubungan dengan dunia luar baik sesam kerajaan di Nusantara maupun dengan kekuasaan Eropa terutama Inggris, Portugis dan Belanda.

Komoditas penting perdagangan di Nusa Tenggara antara lain kayu cendana, kuda, hasil hutan dan budak. Salah satu komoditas yang ramai diperdagangkan di Nusa Tenggara sehelum abad ke—20 adalah budak. Budak pada zamannya merupakan suatu kekayaan yang penting artinya karena berguna dapat membantu tuannya seperti bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan. Mereka dapat dijual, ditukar atau diperdagangkan seperti barang dagangan lainnya. Aktivitas perdagangan budak sudah nampak sebelum ahad 17 sebelum Belanda secara formal menguasai Makasar. Pada masa Belanda setelah secara formal menguasai Makasar tahun 1667 sudah mulai memerlukan tenaga manusia untuk beketja di galangan kapal, pertukangan, pelayaran rumah-rumah pegawai dan sebagai prajurit.

Di Batavia telah tercipta bagian kota bernama Manggarai (disamping Kampung Bali, Melayu, Makasar) merupakan bekas pemukiman/penampungan hamba sahaya (budak) asal Manggarai, Ndu'a (Ngada) kna, Pawo (Ende) dan Samba pada masa perdagangan budak dan hamba sahaya sejak tahun 1660-an. Pada awal abad ke- 19 perdagangan budak masih tetap berlangsung meskipun kekuasaan Eropa (Inggris, kemudian Belanda) melarangnya Ketika ada pelarangan keras, maka tidak ada lagi pencari budak dari Eropa Mauritius, Bourbon melainkan di lingkungan dalam yang bermain.

Mereka punya peranan penting dalam kegiatan ini adalah orang-orang Bugis, Makasar, Ernie, Bima dan orang—onng di pantai utara Mores ditambah orang-orang Cina. Meskipun ada pelarangan, perdagangan budak tetap berlangsung sampai sepanjang abad ke— 9 dan merupakan akivitas ekonomi penting pada saat itu

Studi ini menarik, mengingat wilayah Nusa Tenggara sampai sekarang merupakan (Daerah yang banyak juga mengirim Tenaga Kerja (TKI) ke luar negeri. Praktek pengiriman yang melalui percaloan mempunyai pola yang mirip dengan era perdagangan manusia pada masa lalu.

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAH SEJARAH DALAM TANTANGAN HARI ESOK

J.A. Pattikaihatu

Seperti diketahui, dewasa ini bangsa dan Negara Indonesia sedang memasuki Era Pembangunan Nasional dan globalisasi. Indonesia sedang memasuki era modernisasi dan IPTEK canggih, memasuki kehidupan baru, yang bagi dunia pendidikan khusunya pendidikan nilai moral merupakan kehidupan yang berat dan rawat. Sejumlah system nilai, system budaya, menyerbar menggerser dan memperlemah sejumlah lembaga, sistem serta fungsi yang ada dan dianggap sakral/luhur dalam keluarga maupun kehidupan. Pola komunikasi yang kian canggih dan terbuka memacu laju globalisasi yang makin deras, mempercepat proses dehumanisasi serta lompatan perubahan tanpa persiapan dan kesiapan diri yang memadai. Oleh karenanya misi dan peranan pendidikan dan pendidik akan kian penting dan berat. Para pendidik dan pemikir pendidikan, para pemuka masyarakat dan pemerintah hendaknya memikirkan hari esok perndidikannya. Hari esok dunia pendidikan harus lebih peduli terhadap diri dan kehidupan agar apa yang menjadi cita-cita idil agama, bangsa, Negara, dan sila-sila Pancasila khususnya akan lebih nampak serta terwujudkan.

Khusus mengenai bidang sejarah dan pengajarannya, terutama bagaimana pengajaran sejarah itu diberikan disekolah-sekolah, maka kesimpulannya tidak bisa lain bahwa sebagai bangsa kita perlu sekali memahami pengajaran sejarah, dan khusunya sejarah bangsa secara lebih baik, memadai, dan sungguh-sungguh, yang terkait erat dengan kesadaran sejarah dan penjernihan sejarah. Disini tanggungjawab sejarawan sebagai guru dan sebagai peneliti sangat besar, terutama peranan guru sejarah dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam makalah ini akan ditinjau terlebih dahulu tantangan-tantangan di hari esok dan selanjutnya pembahasan mengenai sejarah sebagai ilmu dan tanggungjawab sejarawan serta masalah-masalah pendidikan sejarah yang terkait dengan sosok dan pola pengajaran sejarah, yang diharapakn serta fungsi dan peranan guru sejarah.

PENAFSIRAN DALAM PENSEJARAHAN BARAT: DI ANTARA HASRAT POSITIVIS DAN KRITIKAN RELATIVIS

Prof. Dato' Dr. Qasim Ahmad, M

Kertas kerja ini membicarakan hasrat awal para sejarawan Barat yang begitu terangsang untuk mengikuti jejak langkah dan metode sains tabii. Angkatan awal mi semacam meyakini bahawa keobjektifan dalam kajian dan penulisan sejarah itu merupakan sesuatu yang boleh dihasilkan; syaratnya para sejarawan haruslah bersikap saintifik. Namun begitu, takrifan saintifik para sejarawan tersebut tidak sebenarnya menepati takrifan sains yang difahami dan dipraktikkan oleh para ahli sains tabii. Lantas jaminan keobjetifan mereka mudah sekali dicabar dan ml telah dilakukan oleh para relativis. Kritikan para relativis ini pula telah membuka ruang kepada sesetengah pihak untuk mempersoalkan satu aspek penting dalam penulisan sejarah: pentafsiran. Implikasi dan ini juga dibicarakan dalam kertas kerja ini Pembicaraan akan berakhir dengan penelitian terhadap pandangan pasca modenis dan kaitannya dengan persoalan interpretasi atau pentafsiran dalam sejarah banyak mengandung "bias gender'. Oleh karena studi perempuan dan sejarah perempuan adalah dua paradigma yang sangat berbeda, baik secara metode maupun dilihat sudut pandang teori dan metodologi

Tulisan ini akan mengetengahkan apakah itu sejarah perempuan (*women history*) dan studi perempuan (*Women studies*). Dimanakah letak persamaan dan perbedaan keduanva. Di manakah posisi sejarah perempuan dalam studi perempuan dan sebaliknya. Dan apakah hubungan antara sejarah perempuan dengan studi perempuan.

PERUBAHAN SOSIAL DAN KESENIAN DI MEDAN

Ratna

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas pengaruh perubahan sosial terhadap perkembangan kesenain di kota Medan. Bahwa perkembangan Kota Medan tidak terlepas dari peran industri perkebunan yang diperkenalkan oleh Nienhuys (1863) tidak dapat diabaikan begitu saja.

Kehadiran perkebunan mendorong terjadinya arus migrasi ke Kota Medan sehingga sejak awal abad XX Kota Medan telah menjadi tempat bermukimnya berbagai suku bangsa yang datang dari berbagai daerah. Beragamnya suku bangsa, secara kultural ikut memperkaya khasanah budaya yang ada di Kota Medan, yang selanjutnya berdampak pada berkembangnya berbagai bentuk kesenian di Medan. Ada kesenian yang datang bersamaan dengan kedatangan para migran seperti: ludruk, jaran kepang, dan ada juga kesenian yang diakui sebagai milik penduduk asli Medan (Melayu) seperti ronggeng.

Baik kesenian yang datang maupun kesenian penduduk asli akhirnya sama-sama mengalami perubahan ketika terjadi perubahan sosial masyarakat pendukung. Kesenian ronggeng pada awalnya amat populer di Medan, karena perkembangannya mendapat dukungan dari penguasa-penguasa Melayu, dalam sejarah perkembangannya kemudian termajinalisasikan dan selanjutnya orang lebih mengenal ronggeng dengan sebutan *joget dangdut*. Demikian juga halnya dengan ludruk atau jaran kepang sebagai kesenian khas para migran Jawa juga mengalami hal yang sama. Apalagi kemudian fungsi awal seni ini selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat religi berubah menjadi untuk hiburan semata.

BFO (MUSYAWARAH NEGARA-NEGARA FEDERAL): SAAT YANG MFNENTUKAN DALAM PFRJUANGAN KFMERDEKAAN INDONESIA

R.Z. Leirissa

Berdasarkan dokurnen-dokumen resmi dan pemerintah Belanda yang sudah dan belum diterbitkan antara lain dapat disimpulkan bahwa BFO (dibentuk di Bandung bulan Juli 1948) ternyata berperan sangat menentukan dalam penghentian permusuhan antara RI dan Belanda.

Masalah pokok yang tidak bisa diterima RI dalam perundingan dengan Belanda khususnva di Kaliurang adalah pembentukan sebuah Pemerintab Sementara yang didominasi Belanda untuk menyiapkan Negara Indonesia Serikat (amanat Perjanjian Renville) Karena gagalnva perundingan itu Belanda melancarkan Agresi Militer ke-2. Tetapi dalam Bulan Januari 1949 Dewan Keamanan PPB tidak saja menyerukan penghentian permusuhan, tetapi juga pembentukan Pemerintah Sementara tersebut. Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Jakarta (Dr Beel) juga menginginkan pembentukan Pemerintah Sementara tetapi tanpa campur tangan PBB (United Nations Conimission for Indonesia - UNCI). Namun BFO menolak rencana Beel itu dan menginginkan agar Beel melaksanakan KMB untuk langsung membentuk Republik Indonesia Serikat.

Dalam dua kali kunjungan delegasi BFO ke Bangka untuk berunding dengan Sukarno-Hatta Ketua BFO Sultan Harnid II meneruskan pesan Beel tentang Pemerintah Sementara itu. Tetapi dalam sela-sela perundingan Ide Anak Agung Gde Agung menvodorkan gagasan agar para pemimpin RI menerima KMB tetapi bukan untuk membentuk Pemerintah Sementara tetapi Iangsung Republik Indonesia Serikat. Gagasan itu ternyata disepakati para pemimpin RI itu. Juga disepakati agar sebelum ke Dcn Haag dilangsungkan Konperensi Inter Indonesia agar BFO dan RI merumuskan gagasan bersama mengenai RIS yang akan dibawa ke KMB. Karena tanpa kerjasama BFO akhirnva I)r Beel menghadapi jalan buntu, dan tekanan-tekanan yang sangat kuat dari negara-negara Barat (khususnya Amerika Serikat) maka akhirnya gagasan KMB untuk pembentukan RIS yang didahului Konperensi Inter Indonesia itu terpaksa diterima oleh Belanda.

Tanpa intervensi BFO dalam rencana Beel, KMB akan menjadi arena adudomba antara berbagai kelompok politik di Indonesia yang akhirnya akan menguntungkan Belanda.

K4MPUNG DI BAWAH NAUNGAN TIGA PENGUASA: PERMUKIMAN RAKYAT SEMARANG TAHUN 1930-1960

Radjimo Sastro Wijono

Semarang pada awal abad ke-20 telah berkembang menjadi kota pelabuhan yang modern. Salah satu kebutuhan masyarakat modern yang telah diusahakan pemenuhannya oleh pemerintah Hindia Belanda adalah pengadaan kompleks perumahan (permukiman modern). Permukiman rakyat, baik kampung maupun kompleks perumahan, sejak mulabuka merupakan sebuah proses terus-menerus sampai titik tertentu. Untuk memahami proses perubahan di permukiman, kekuatan-kekuatan di kota dan kekuatan daerah pinggiran di sekitarnya yang mengakibatkan timbul-tenggelamnya permukiman perlu diperhatikan. Selain itu, yang harus lebih diperhatikan adalah faktor terpentingnya yaitu intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

Makalah mi akan memaparkan bagaimana pengaruh intervensi pemerintah terhadap permukiman rakyat di Semarang dalam lintas pergantian kekuasaan (1930-1960): pengaruh apa saja yang dirasakan masyarakat pemukim. Para penguasa, dengan struktur kekuasaannya, dalam masa ini memanfaatkan fungsi permukiman rakyat berbeda-beda. Pemanfaatan fungsi permukiman rakyat, baik kampung maupun kompleks perumahan, oleh Pemermtah kolonial Belanda, Pendudukan Jeparig, dan masa awal Republik Indonesia mengakibatkan perubahan pada struktur kampung dan komunitas yang mendiaminya.

Pemerintah Kolonial Belanda di akhir masa kekuasaanya telah merubah lahan pertanian menjadi permukiman rakyat yang modern, hingga menjadi hunian yang nyaman. Tujuh kawasan perumahan telah dibangun dengan fasilitas dan struktur kehidupan modern, dan kawasan permukiman modern mi hidup berdampingan dengan permukiman tradisional (kampung). Di Semarang, pendudukan Jepang telah mengubah fungsi kompleks perumahan menjadi tempat penjara bagi orang Belanda. Perubahan fungsi mi menjadikan jalinan sosial penghuni dan komunitas penghuni permukiman berubah. Kalahnya Jepang digantikan pemerintah Repubkk Indonesia ikut mengubah funggsi permukiman rakyat.

Kompleks perumahan seolah menjadi barang rampasan perang bagi tentara dan penguasa saat itu. Pergantian penghuni di kompleks perumahan menjadikan pula perubahan dalam jalinan sosial antar penghuni kampung dan kompleks perumahan. Dalam permukiman rakyat ini kita dapat melihat tumbuh, kembang, dan hilangnya sebuah komunitas sosial dan jalinan sosialnya.

BANJIR DI BATAVIA 1913 — 1940: DINAMIKA PEMBANGUNAN KOTA DI DATARAN RENDAH

Restu Gunawan

Batavia sebagai pusat administrasi kolonial dan pusat perdagangan, telah berkembang sejak abad 19. Sebagai kota yang terletak di dataran rendah, kota berkembang dari pantai kemudian masuk ke pedalaman mengikuti aliran sungai. Berdasarkan morfologi kota, Batavia pada awalnya berkembang berbentuk spasial kota kipas. Hal ini disehabkan karena beberapa kendala, kota tidak bisa berkembang ke timur dengan bebas karena adanya lapangan udara Kemayoran, sehingga kota bergerak ke selatan mengikuti aliran sungat Molenvliet. Sebagai kota yang berada di dataran rendah, banjir merupakan masalah yang menghantui kota. Pertambahan penduduk dan bertamhahnya lahan untuk permukiman telah berakibat pada hilangnya daerah resapan air. Selain itu pemanfaatan daerah aliran sungai secara berlebihan telah berakibat semakin besamya air yang yang mengalir ke sungai sehingga berakibat banjir di daerah hilir. Batavia sebagai *Gemeente* 1905 kemudian menjadi *stadsgemeente* telah mengadakan pembangunan permukiman diantaranya Menteng dan Gondang Dia. Selain itu pemerintah mulai mengadakan pembelian tanah-tanah partikelir untuk dibangun permukiman sampai tahun 1940 pembangunan perkotaan telah meluas Sampai ke Duku Atas dan Karet.

Untuk menghindari banjir, pemerintah mengadakan perbaikan saluran dan yang selalu melanda Batavia. Penanganan banjir pada masa kolonial sampai masa sekarang, tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Setiap tahun, banjir selalu menghantui warga Jakarta. Untuk menanggulangi banjir, maka masalah tata air mulai ditangani secara sistematis sejak tahun 1913 dengan dibangunnya banjir kanal dan pembangunan sarana pengaliran air secara luas. Pembangunan banjir kanal terkait dengan penggunaan lahan di daerah aliran sungai (DAS). Dibangunnya perkebunan teh di Puncak, yang kemungkinan berakibat pada banjir besar di Batavia, maka Jr H. Van Breen ditugasi untuk menata air kota Batavia.

Titik berat dan rencana Van Breen adalah dengan pembuatan kanal-kanal dan pintu air di aliran sungai yang ada. Selain itu di daerah yang posisinya lebih rendah digunakan sebagai tempat reservoir air. Rencana ini terkenal dengan Rencana Van Breen. Bagaimana dinamika pemenintah dan masyarakat dalam menata kota dan menanggulangi banjir di Batavia akan berusaha di bahas dalam makalab mi, termasuk didalamnya menyangkut konflik penguasaan wilayah untuk pembangunan kota.

KETIDAKADILAN GLOBAL, KEAMANAN BERSAMA DAN BURUH MIGRAN INDONESIA

Riwanto Tirtosudarmo

Sejak pertengahan dekade 1980an migrasi internasional buruh migran Indonesia telah mulai mendapatkan perhatian, baik oleh mass media maupun oleh pemerintah. Perhatian terhadap buruh migran meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah mereka dan tidak sedikitnya perlakukan buruk yang dialami di negeri penerima. Malaysia dan Negaranegara Arab di Timur Tengah merupakan negara penerima terbesar dari buruh migrant yang berasal dari Indonesia. Mayoritas buruh migran Indonesia adalah perempuan dan sebagian bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Perlakuan buruk dan eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia telah menjadi pemberitaan pers dan mendorong isu buruh migran sejak itu sebagai isu nasional yang penting. Makalah ini mencoba menempatkan fenomena migrasi internasional dalam perspektif globalisasi ekonomi dan keamanan. Secara khusus akan dibahas perubahan yang berlangsung setelah Peristiwa 11 September 2001 dimana gedung WTC di New York hancur karena serangan teroris. Sejak peristiwa tragis ini migrasi internasional memperoleh makna yang baru dan memiliki kaitan dengan perubahan ekonomi global khususnya dengan ketidakadilan antara negara-negara utara yang kaya dan negara-negara selatan yang miskin. Selain makna ekonomi migrasi internasional juga dianggap mengandung elemen-elemen keamanan (security) yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari lembagalembaga internasional. Dalam konteks perubahan ekonomi dan sekuriti global inilah masa depan buruh migran Indonesia akan dilihat, dan upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki posisi mereka yang rentan

GERAKAN ASPIRASI MERDEKA: STUDI KASUS GERAKAN KEMERDEKAAN DI PAPUA PADA AWAL REFORMASI

Rusli, M. Hum

Hasil penelitian menunjukan proses integrasi wilayah Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 dianggap oleh sebagian rakyat Papua tidak syah. Pelaksanaan Pepera mereka anggap tidak sesuai dengan ketentuan *New York Agreement*. Di samping itu mereka berpendapat Papua pada tanggal 1 Desember 1961, telah merdeka. Dengan demikian Indonesia telah merampas kemerdekaan mereka.

Di situlah letak akar perlawanan sebagian orang Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Situasi itulah yang memunculkan stigma Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang dalam konstek nasional sering disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlawanan im tetap ada sampai sekarang walaupun tidak sampai mengguncangkan stabilitas nasional.

Pada era reformasi, dimana orang relatif bebas berbicara dan menuntut apa saja gerakan perlawanan orang Papua mulai terlihat bangkit kembali. Namun cara perjuangannya berbeda. Jika sebelum era reformasi perlawanan mereka menitikberakan pada perlawanan bersenjata, maka pada era reformasi dilakukan dengan cara politis. Namun, isu yang mereka lontarkan dalam perlawanan relatif sama yaitu, masalah Pepera, pelanggaran HAM, perlakuan tidak adil dan faktor suku bangsa yang berbeda.

Aspirasi untuk merdeka secara resmi disampaikan kepada Presiden B. J. Habibie di Istana Negara, pada tanggal 26 Februari 1999. Dari ketiga butir pemyataan yang disampaikan satu diantaranya berbunyi, Papua ingin merdeka.

Langkah selanjutnya tanggal 23 Februari 2000 mereka mengadakan Musyawarah Besar (Mubes) di Sentani yang dihadiri oleh elemen perjuangan Papua merdeka, termasuk Moses Weror, tokoh senior OPM. Mubes ini berhasil membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) wadah tunggal perjuangan kemerdekaan Papua yang diketuai oleh Theys Hiyo Eluay dan Tom Beanal. Sebagai tindak lanjut dart Mubes tanggal 29 hingga 4 Juni 2000 diselenggarakan kongres. Kongres mi melahirkan resolusi yang berisi antara lain menolak hasil Pepera.

Tetapi, pemerintah tetap pada pendiriannya yaitu hanya akan memberikan status otonomi khusus bagi Papua. Pada tanggal 22 Oktober 2001 Rancangan Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) disyahkan oleh Presiden Megawati menjadi UU No. 21Tahun 2001.

KURIKULUM: PERKEMBANGAN IDEOLOGIS DAN TEORITIK PEDAGOGIS (1950 – 2005)

S. Hamid Hasan

Makalah ini membahas perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 2005. Tahun 1950 digunakan sebagai titik awal berangkat karena pada waktu itu Republik Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 yaitu undang-undang pertama tentang pendidikan. Tahun 2005 digunakan sebagai batas akhir pembahasan karena pada tahun 2003 pemerintah Republik Indonesia menghasilkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku sampai sekarang. Implementasi undang-undang tersebut dibahas sampai dengan tahun 2005. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan berbagai peraturan dan keputusan yang berkenaan dengan bidang pendidikan menjadi sumber informasi yang digunakan dalam makalah ini. Sumber lain yang digunakan adalah statistik dan buku-buku berkenaan dengan pendidikan di Indonesia.

Pembahasan mengenai aspek ideologis difokuskan pada penafsiran dan terjemahan ideologi Pancasila pada kebijakan pendidikan dan pengembangan kurikulum. Penafsiran dan terjemahan ideologi Pancasila dalam kebijakan pendidikan dan kurikulum tentu saja sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Hal ini adalah sesuatu kebenaran yang tak dapat disangkal karena kebijakan pendidikan dan kurikulum adalah kebijakan publik dan sangat ditentukan oleh kekuasaan. Ideologis dan pandangan teoritis pedagogis yang dipercaya oleh pengambil keputusan adalah yang akan menentukan kebijakan tersebut.

Kebijakan mengenai kurikulum dijadikan pembahasan utama dibandingkan aspek pendidikan lainnya karena posisi kurikulum sebagai jantung suatu proses pendidikan dan aspek pendidikan yang sangat dinamis. Pembahasan mengenai pendidikan sejarah dalam kurikulum digunakan untuk mempertajam analisis. Frame waktu yang digunakan adalah masa berlakunya undang-undang pendidikan (1950/1952, 1988, 2003) serta keberlakuan kurikulum (1950, 1964, 1966, 1975/1976, 1984, 1994, 2004).

Analisis menunjukkan bahwa pandangan ideologis yang diterjemahkan pada pandangan filosofis pendidikan tidak pernah berubah. Tujuan pendidikan nasional tidak mampu diterjemahkan dalam kebijakan kurikulum. Perkembangan yang lebih mencolok terjadi pada pandangan teoritik pembelajaran. Perkembangan dalam penilaian hasil belajar cukup berarti pada jenjang sekolah tetapi tidak pada tingkat nasional.

POLITIK MILITER PASCA PERANG KEMERDEKAAN 1950-1952

Saleh A. Djamhari

Sesuai perang, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, menghadapi problema yang rumit, yang berkaitan dengan masalah sosial, politik dan psikologi. Menteri Pertahanan RIS bersama Pimpinan APRIS menetapkan beberapa kebijakan untuk tahap demi tahap guna memecahkan problema tersebut.

Pertama, mensosialisasikan konsep pembangunan Angkatan Perang baru (*the new formed of Armed Forces*) berdasarkan persetujuan KMB

(organisasi, pendidikan).

Kedua, demobilisasi TNI.

Ketiga, menegakkan keamanan dalam negeri.

KSAD Kolonel A.H Nasution menjabarkan kebijakan militer tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, membentuk Markas Besar Baru, (dengan model staf umum) dan

komando bawahannya.

Kedua, melakukan amalgamasi kesatuan-kesatuan mantan KNIL dengan

kesatuan-kesatuan TNI.

Ketiga, melakukan re-edukasi para komandon batalyon (sebagai prioritas)

dalam lembaga pendidikan baru.

Keempat, melaksanakan dislokasi pasukan dalam rangka operasi keamanan

dalam negeri dan demobilisasi.

Kebijakan pimpinan APRIS dan Kepala Staf Angkatan Darat, tidak diterima oleh kesatuan-kesatuan bawahan. Reedukasi dianggap sebagai tindakan untuk melunturkan heroisme, patriotisme dan nasionalisme TNI, yang berangkat dari Tentara Revolusi, Amalgamasi diterima dengan diterima dengan berat hati, kesatuan bawahan sebenarnya menolak berbaur dengan bekas lawan yang dianggap pengkhianat. Mereka menolak KMB.

Dislokasi pasukan menjadi sangat urgent untuk dilaksanakan. Pulau Jawa memikul beban berat, atas besarnya jumlah pasukan bersenjata. "Kebetulan" di Sulawesi dan Maluku terjadi pemberontakan bersenjata. KSAD berserta Panglima Teritorium sepakat melaksanakan dislokasi pasukan APRIS/TNI, terutama yang "berbau ideologi politik" (pasukan yang pemah terlibat dalam peristiwa Pemberontakan PKI 1948), dan pasukan "trouble maker" di daerahnya, kedaerah-daerah yang bergolak. Nasution ingin menjauhkan pasukan ini dari pengaruh partai-partai politik induknya dan membubarkan kesatuan-kesatuan "trouble maker" di luar daerahnya.

MEREKA TIDAK BISU: MAKNA DAN PEREBUTAN SIMBOL MONUMEN, PATUNG, DAN TUGU DI KOTA SURABAYA

Sarkawi B. Husain

Makalah im hendak menguji asumsi bahwa setiap perubahan kekuasaan akan rnengakibatkan terjadinya perubahan, penciptaan, dan pelestarian simbol simbol kota. Monumen, tugu, dan patting merupakan salah satu simbol kota yang tidak luput dan pengaruh kekuasaan. Berbeda dengan nama jalan yang penetapannya diatur dalam sebuah undang-undang (hanya pernerintah yang boleh memberi nama jalan), pendirian monu men, tugu, dan patung pada zaman kolonial banyak dilakukan atas inisiatif masyarakat, tetapi tetap elifis dan beraroma kolonial.

Dengan semangat menghilangkan jejak kekuasaannya, pemerintah pendudukan Jerpang menghancurkan satu persatu simbol-simbol tersebut. Dan 14 patting atau monumen di zarnan Belanda, hanya ada dua yang bertahan hingga tahun 1960-an. Namun demikian keduanya juga harus tanah dan digantikan dengan simbol-simbol baru berupa patting perjuangan.

Kata kunci: Monumen, Tugu, Patung, dan Surabaya

BERGERILYA DENGAN BATALYON NASUHI

Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn)

Bergabung dengan Batalyon Nasuhi

Setelah dilantik sebagai Letnan Dua TNI-AD oleh Presiden Soekarno pada 28 November 1948, saya segera menuju ke tempat tugas. Permintaan saya untuk ditempatkan di Batalyon (Yon) Nasuhi Divisi Siliwangi dikabulkan. Maka saya melapor ke Staf Div. Siliwangi (SDS) yang berada di Solo. Setelah diproses di bagian Administrasi Personil, saya pada 20 Desember 1948 akan menuju ke Yon Nasuhi yang berada di Banjarnegara untuk bergerak kembali ke Jawa Barat. Akan tetapi pada 19 Desember 1949 Belanda menyerang Yogyakarta.

Mula-mula saya turut SDS meninggalkan Solo pada 19 Desember malam, kita masih dapat naik kereta api sampai Prambanan. Sesudah itu seluruhnya berjalan kaki menuju Jawa Barat. Karena gerak SDS lambat, saya putuskan mencari jalan untuk bergerak lebih cepat. Setelah menyeberang Sungai Progo, saya dapat bergabung dengan rombongan MBKD yang kecil. Rombongan MBKD berhenti di Legokherang karena akan membuka posnya di situ. Saya terus berjalan ke arah barat mencari pasukan Yon Nasuhi.

Kondisi Daerah Tugas Yon Nasuhi

Yon Nasuhi adalah Batalyon 4 di Brigade XIV/Slw. Yon ini harus menjalankan tugas di daerah Kabupaten Ciamis sebelah utara Sungai Citandui, sedangkan di selatan Citandui adalah daerah Batalyon 1 Be XIV/Slw yang dipimpin Mayor Sudarman. Daerah Ciamis berbukit-bukit yang tepat untuk daerah gerilya. Kabupaten Ciamis dibelah dua oleh Sungai Citandui, sedangkan di bagian utara ada Gunung Syawal yang tingginya sekitar 1.764 m. daerah persawahan juga cukup luas, terutama di Ciamis bagian selatan. Selain itu pohon kelapa menutupi bagian terbesar kabupaten dan menjadi sumber penghasilan penting bagi rakyat. Juga banyak sekali terdapat kolam ikan yang menghasilkan ikan gurami, ikan emas dan ikan mujair. Boleh dikatakan bahwa kehidupan rakyat Ciamis cukup subur.

Rakyat Ciamis kuat beragama Islam, terutama di bagian barat dimana terletak Desa Gunung Cupu. Di desa inilah pasukan Hizbullah memproklamasikan Darul Islam ketika tentara di Jawa Barat harus hijrah atau keluar dari Jawa Barat. Darul Islam (DI) yang dipimpin S.M. Kartosuwiryo ini memberontak terhadap Republik Indonesia dan melawan kedatangan kembali Siliwangi. Banyak kerugian ditimbulkan pada Siliwangi ketika baru kembali, termasuk pada Yon Nasuhi. DI ini kemudian memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada 9 Agustus 1949.

Bergerilya sebagai Komandan Seksi Kompi 3

Saya ditetapkan menjadi Komandan Seksi 2 Kompi 3. Mula-mula ada persoalan karena pasukan jatuh semangatnya ditinggalkan komandannya yang masuk kota. Akan tetapi setelah ditantang dan diberikan tauladan, sikap pasukan berubah dan kemudian menunjukkan semangat juang yang amat membesarkan hati rakyat. Secara teratur dan terus menerus dilakukan pencegatan terhadap gerak pasukan Belanda, terutama di jalan

antara Tasikmalaya dan Ciamis. Serangan ke pos Belanda yang ada di Desa Gunung Cupu hanya dilakukan sporadis karena sukar menimbulkan kerugian. Sebab rakyat daerah itu berpihak DI dan menolak kalau TNI datang. Sehingga serangan ke pos Belanda sukar dipersiapkan secara matang. Titik berat gerilya diletakkan pada pencegatan yang dapat menimbulkan banyak kerugian pada Belanda, baik karena mati atau luka-luka maupun kehilangan senjata. Menimbulkan luka-luka malahan lebih besar dampaknya dari mati, karena orang luka harus dirawat dan membuat cerita tentang kegiatan gerilya kita pada teman-temannya.

Pasukan Belanda selalu berusaha memukul kita. Akan tetapi pasukan kita selalu dapat lolos dan sampai akhir gerilya tidak ada satu orang pun jadi korban. Ini semua juga berkat hubungan kita yang erat dengan rakyat. Akhirnya Belanda tidak dapat lagi bergerak leluasa dan semua hubungan berkendaraan antara Tasikmalaya dan Ciamis harus dilakukan dalam konvoi. Hubungan Cirebon – Ciamis malahan sepenuhnya putus karena gerakan Kompi 2 dan Kompi 4.

Ketika pada 7 Agustus 1949 dinyatakan penghentian tembak menembak, maka posisi Yon Nasuhi dan Republik Indonesia kuat sekali. Malahan di daerah Yon Nasuhi kebanyakan Kepala Desa sudah menyatakan setia kepada Republik Indonesia dan Uang Republik Indonesia berlaku kembali di desa-desa. Setelah penghentian tembak menembak malahan gerakan teritorial Yon Nasuhi dapat membuat juga para Camat menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia, sehingga kekuasaan Republik Indonesia de facto sudah berjalan di daerah Yon.

BAGAIMANA MENYIKAPI OVER PRODUKSI HISTORIOGRAFI DALAM ERA POSTMODERN:

PEMBELAJARAN DARI PERSPEKTIF F.R. ANKERSMIT UNTUK PROYEKSI DIRI KE-INDONESIAAN

Slamet Subekti

Sejalan dengan semangat reformasi, wacana persejarahan Indonesia ditandai perdebatan yang semakin marak berkat pertumbuhan subur publikasi buku-buku dan artikel sejarah, semisal pewacanaan peristiwa Gerakan 30 September 1965 versi CIA files versus Baskara T Wardaya. Tambahan lagi, penerbitan biografi tokoh-tokoh sejarah lokal berlimpah-ruah seiring dengan semangat otonomi daerah. Adakah ini indikator keberhasilan penerapan KBK yang menghasilkan sarjana sejarah dengan kompetensi berbisnis masa lalu? Selanjutnya berkait dengan pembelajaran Civic Education pada tingkat pendidikan dasar dan menengah perlu dipertanyakan: Adakah kelimpah-ruahan wacana historiografi akan berarti meneguhkan penyadaran diri keindonesiaan, manakala sejarah negeri ini penuh bias sesuai selera penguasa?

Bagaimana pun fenomena mi patut dikritisi agar memungkinkan penilaian serta penentuan sikap baik positif maupun negatif, yang sangat bergantung pada perspektif kesejarahan seseorang: esensialis, modernis, atau postmodernis.

Pembahasan makalah mi berfokus pada pertanyaan kunci: Bagaimana kita menyikapi overproduksi historiografi yang berlangsung dewasa ini? Pemahaman masalah tersebut diteropong dan perspektif F.R. Ankersmit sebagaimana tertuang dalam karyanya bertajuk *History and Tropology: the Rise and Fall of Metaphor* (Berkeley: University of California Press, 1994), terutama pembahasan bab *Historiography and Postmodernism*. Citra negatif terbentuk dan overproduksi historiografi ini: di satu pihak, pembahasan lebih cenderung pada interpretasi daripada sejarah sendiri; dan di lain pihak, sifat multiinterpretabilitas menjadikan teks original sejarah secara berangsur dipeloroti kapasitasnya "semau gue" dalam debat sejarah. Sebenarnya gambaran situasi bahwa kelimpah-ruahan penerbitan buku serta penulisan artikel sejarah justru menimbulkan kesulitan dalam rangka menyusun pandangan sejarah komprehensif, yang pada giliraimya mengaburkan pandangan ke masa lalu itu telah dirasakan oleh Nietzsche lebih dari seratus tahun lalu; sehingga beberapa usaha telah dilakukan untuk mengatasinya.

Pertama, Romein melihat bahwa dalam suasana overproduksi ini terdapat kecenderungan ke arah spesialisasi. Konsekuensi logisnya dituntut sejarah teoretis yang akan membantu untuk memperbaiki pemahaman masa lalu yang sebelurnnya.

telah dikaburkan oleh spesialisasi. Sejarah teoretis diharapkan memampukan untuk meneropong secara memadai dan mengatasi kekacauan akibat spesialisasi dan overproduksi tersebut. Akan tetapi, sejarah teoretis memiliki kelemahan mendasar karena ketidakmampuannya untuk mengintegrasikan berbagai spesialisasi yang ada.

Kedua, para sejarawan mazhab *Annales* kemudian berusaha mencurahkan perhatian kepada penemuan objek-objek barn bagi penyelidikan masa lalu. Dengan

strategi itu mereka menginginkan terjadi perubahan lagi atas penemuan sejarah dalam keadaan murni. Sayangnya, usaha itu pun tidak lebih dan sekedar "pelipur lara" sebelum sejarawan lain marak mengusung topik-topik baru yang akan menimbulkan kekacauan lagi, demikian seterusnya.

Akhirnya, belajar dan kegagalan kedua usaha sebelumnya kaum Postmodernis tidak perlu bersikap menghindar dan overproduksi historiografi melainkan menghadapi dan "berdialog" dengannya. Sikap para Postmodernis dan Poststrukturalis bertolak dan fokus perhatian pada pemungsian ilmu dan informasi ilmiah, yang dipandang selalu berkembang-biak dan bersifat "tidak mapan". Sikap revolusioner dalam pandangan keilmuan ini tampak dalam konklusi logis bahwa interpretasi sejarah dikenali melalui interpretasi lain, serta konklusi ontologis bahwa melalui dekonstruksi terhadap hirarki tradisional sebab akibat telah merontokkan *raison d'etre* klairn modernis mengenai bahasa ilmiah sebagai "cermin realitas". Hayden White maupun Paul Ricouer menjelaskan bahwa realitas masa lalu hams dilihat sebagai sebuah teks yang dirumuskan dalam suatu bahasa asing dengan matra leksikal, gramatikal, sintaktikal, dan semantik yang sama seperti teks lain.

Demikianlah, kaum Postmodemis memusatkan perhatian mereka bukan kepada masa lalu sendiri melainkan keganjilan masa kini dan masa lalu, antara bahasa yang digunakan sekarang untuk membicarakan masa lalu dan bahasa masa lalu. Sikap penolakan terhadap "asas tunggal sejarah" mi dimaksudkan untuk menetralisir keganjilan tersebut. Praktis perhatian Postmodemis kepada segala hal yang dipandang remeh-temeh dan tidak relevan dan perspektif historiografi ilmiah; semisal ketertarikan Michel Foucault untuk meneliti sejarah seksualitas, penjara, dan kegilaan. Bagaimana pun ditekankan bahwa sifat dasar penulisan sejarah berikat pada konteks intensional bahasa, dan disadari pula adanya kemiripan proses kreatif sejarawan dengan novelis maupun psikoanalis.

Pergerakan kesadaran sejarah dapat ditamsilkan sebagai pergeseran sudut pandang terhadap pohon. Tradisi esensialis dalam historiografi Barat memusatkan perhatian pada batang pohon, hasilnya berupa sistem-sistem spekulatif yang berusaha mendefinisikan sifat dasar dan bentuk pohon. Sedangkan historisisme dan historiografi ilmiah modernis memperhatikan apa yang terjadi di masa lalu serta penolakannya terhadap skema-skema *a priori* menjadikan lebih berfokus pada cabang-cabang pohon. Sementara pandangan historiografi Postmodernis tidak berpusat pada batang maupun cabang-cabang pohon, melainkan pada dedaunan.

Pandangan sejarah Postmodernis tidak lagi ditujukan pada integrasi, sintesis, dan totalitas; melainkan "lembaran-lembaran daun" sej arah yang dijadikan pusat perhatian. Karakteristik daun itu bergantung pada dahan pohon. yang akan rontok ketika musim gugur tiba. Berdasarkan tamsil tersebut, kiranya musim gugur sekarang telah tiba pada historiografi Barat; sehingga tugas yang tersisa bagi sejarawan adalah bagaimana mengumpulkan lembar demi lembar dedaunan yang berserakan ditiup angin, dan bagaimana mempelajari secara independen dan sumbernya. Ketika kita mengumpulkan lembaran dedaunan masa lalu, maka tidak penting persoalan di mana letaknya dalam pohon itu dahulu; melainkan penting untuk menyusun pola yang dapat dibentuk dan dedaunan mi sekarang serta kemungkinan bagaimana pola mi dapat disesuaikan dengan bentuk-bentuk lain dan peradaban yang sekarang berkembang.

Sekilas pandang, pemaparan awal Ankersmit tentang overproduksi historiografi dikesankan kontrapoduktif bagi pemahaman realitas masa lalu, tetapi kesimpulan akhirnya mengandaikan keharusan untuk menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana. Overproduksi historiografi patut disambut positif sebagaimana sikap yang diteladankan oleh para Postmodernis dan Poststrukturalis. Pembelajaran yang dapat dipetik adalah "kacamata lama" historiografi perlu digantikan dengan "kacamata baru": historiografi mesti disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan peradaban yang berkembang dewasa mi, termasuk untuk kepentingan memproyeksikan din keindonesiaan kita. Anda berminat dengan penawaran kacamata terbaru merk Historiografi Postmodernis?

REKAMAN SEJARAH DALAM LEGENDA REYOG PONOROGO

Slamet Sujud P.J.

Abstrak Sebagai sastra rakyat, Legenda Reyog Ponorogo (LRP) mempunyai potensi berkaitan dengan peristiwa faktua!, sejarah, latar geografis, dan tokoh historis. LRP juga mengandung sejumlah unsur budaya atau realitas sosial empunya cerita sebagai hasil pengalaman masa lalu atau sejarahnya. Walau berupa sastra lisan, LRP termasuk jenis sastra historis dalam arti ada paduan sejarah dan sastra. Kajian historis LRP mi bertujuan untuk memberjkan interpretasi historis tetbadap tokoh, lokasi, dan penstiwa dalam LRP terkait dengan sejarah hubungan kerajaan Wengker-Kadiri. Oleh karena itu dalam perkara identifikasi akan dilakukan analisis hubungan antara LRP dengan fakta historis. Identifikasi mi dilakukan dengan menghubungkan tokoh, lokasi, dan peristiwa dalam LRP dengan tokoh, lokasi, dan peristiwa dalam periode sejarah Kerajaan Wengker

Kadiri yang dijadikan acuan bagi terciptanya legenda imaginatif tersebut

Kata-kata kunci: legenda reyog Ponorogo. historis.

DINAMIKA SAUDAGAR KAUM PEREMPUAN JAWA DI LAWEYAN

Drs. Soedarmono, SU

Makalah ini sengaja membedah fenomen sejarah lokal "saudagar " Laweyan di kota Solo, pada awal abad 20. Sosok kampung industri dan sumber perdagangan batik yang pemah dikonsumsi masyarakat luas, Jahir dan sana, dan ethos kaum perempuan Jawa, "mbok mase" Laweyan. Banyak pengamat yang gagal, atau setidaknya kurang pas menterjemahkan kehadiran mereka, untuk citra industri dan perdagangan kias menengah Jawa, dijaman Kolonial. Bisa disebutkan berbagai masalah, karena perempuannya, karena lokalitasnya, dan karena klas sosial-kulturalnya, maka sejarah local daerah itu hampir terhapus dalam peraturan sejarah ekonomi di era post kolonial. Padahal di era jamannya, nilai ekonomi, politis dan kultural saudagar Laweyan, tidak kalah penting memainkan peranannya dalam sejarah lokal raja-raja Mataram di Surakarta.

Penulis, secara pribadi sangat tertank pada sikap dan tingkah laku wong Laweyan, yang jejak masa lampaunya, setidaknya meninggalkan kesan agak aneh dan serasa ada keterasingan dengan Iingkungan social masyaraakat Jawa. Pengalaman berinteraksi social selama proses pergaulan dengan anak-anak komunitas Laweyan, memunculkan kesadaran untuk menangkap keganjilan dalam potret social-alienasi komurtitas Laweyan. Mereka sangat asing, dimata penulis karena sebutan "Wong" dagang, terasa diasingkan oleh cerita rakyat lokal untuk nama "Laweyan" sebagai tempat eksekusi hukuman awe, lebih-lebih cerita tutur versi kerajaan yang memposisikan keturunan secara genealogis orang Laweyan sebagai gen "bau-laweyan".

Tiga folklor yang menjadikan komunitas Laweyan teralienasikan ke dalam segregasi social itu, mendorong penulis untuk meluruskan sejarah, dan persepsi yang anachronis, dan tidak disembunyikan dalam sejarah, yaitu etos kaum perempuan Jawa dalam pergumulan ekonomi klas menengah Jawa.

Mitos Laweyan

Wong laweyan di jaman dahulu, di tengah peradaban dominan budaya feudal kerajaan, komunitas Laweyan agak dibenci oleh kalangan bangsawan kerajaan di kota Solo. Orang yang lebih mencerminkan gaya hidup yang praksis dalam dunia ekonomi industri dan perdagangan batik itu, dalam wacana prilaku masyarakat kerajaan di Solo, dianggap kurang pantas hidup bergaul dalam dengan masyarakat feudal. Ada sebagian besar bangsawan kerajaan yang gaya hidupnya lebih mencerminkan pola hidup establish pada sistem ekonomi feodom, agak kurang senang berdampingan dengan saudaranya wong Laweyan yang mencerminkan sebagai golongan kias menengah J Mereka takut bersaing dalam hal meraih ethos hedonis Jawa drajad, semat dan pangkat, maka dengan menghalalkan segala cara orang Laweyan harus dialienasikan, diasingkan atau kalau dianggap penting bahkan disingkirkan dan pergaulan masyarakat Jawa.

Ada kesan negatif folklore orang Laweyan, dan kalangan bangsawan kerajaan balk di era kerajaan Pajang, Kartasura, bahkan disaat PB II, mengalami tragedi gegerpecinan di jaman Kartasura.

Era Pajang.

- 1. Eksistensi orang Laweyan di jaman Pajang, dilahirkan folklor Raden Pabelan yang melakukan perselingkuhan dengan putri raja Ratu Sekar Kedhaton. Peristiwa itu mengakibatkan jatuhnya eksekusi mati dar lembaga peradilan Pajang atas Raden Pabelan bertempat di Laweyan. Folklor ini seolah-olah menjadikan wacana memori kolektif orang Jawa dalam Babad minor Pajang, untuk akses pembenaran (legitimate) bahwa sudah layak dan sepantasnya orang yang melanggar tata-krama adat istana harus di-eksekusi hukum Lawe.
- 2. Folklor Kyai Ageng Ngenis, konon menurut cerita lokal, asal usul nama tempat "laweyan" sangat berhubungan erat dengan nama tokoh lokal yang disakralkan, yaitu Kyai Ageng Ngenis. Di era pemerintahan Sultan Hadiwijoyo di Pajang, Kyai Ageng Ngenis, putra Kyal Ageng Selo, (tokoh cikal-bakal Mataram) karena jasanya yang besar atas Kasultanan Pajang, beliau diberi hadiah tanah "perdikan". Tanah itu diberi nama "luwihan", kemudian berubah sebutan menjadi ulaweyan karena kekaguman rakyat Pajang atas "keluwihan" (kesaktian) Kyai Ageng Ngenis

Era Kartasura

Sama halnya, peristiwa yang terjadi di jaman Kartasura, terekam dalam folklor eksekusi putri raja Raden Ayu Lembah. Putri Pangeran Puger yang diperistri oleh Sunan Amangkurat Mas ini nekat bermain cinta dengan Raden Sukro, hingga berakhir pada eksekusi hukuman gantung dengan tali Lawe di lokasi Kampung Laweyan. Dengan demikian maka opini publik dibangun imaginasinya untuk senantiasa mengingat peristiwa yang berkaitan dengan nama Laweyan, dikonotasikan sebagal tempat untuk pelaksanaan hukuman "lawe"

Era PB II

Kesan negatif pada penciptaan folklor sebagal memori kolektif sejarah Mataram Kartasura hampir mirip terulang kembali di era raja PB II, menjadi pelarian di pengasingan makam Ki Ageng Ngenis di Kampung Laweyan. Secara kompromis raja minta bantuan pada para saudagar batik, untuk bisa diijinkan meminjam kuda-kuda koleksi para saudagar batik, untuk mendukung pelariannya ke Ponorogo. Tapi permintaan itu, secara mentah-mentah ditolak oleh para saudagar Laweyan hingga menimbulkan rasa marah raja itu sampai pada sikap raja mengeluarkan sumpah serapahnya, bahwa kelak keturunannya berharap tidak boleh mengawini wanita 'mbok-mase' Laweyan. Ironis memang, sesama keturunan ethnis Jawa, hanya dibedakan pada nilai filsafat sosial resmi, dan juga karena factor local-genius, terjadilah permusuhan yang meruncing sampai menimbulkan potret segregasi sosial. Bahkan pada tingkatan cerita tutur rakyat Jawa tempo dulu, hampir pasti setiap orang Jawa mengenal folklor "bau Laweyan" yang sangat sarkartis untuk menjatuhkan moral-ekonomi orang Laweyan.

Budaya Feodal

Pendeknya, dalam bentuk apapun baik, sikap, mental hingga persepsi sosio-kultural kalangan aristokrasi Jawa, senantiasa memandang rendah dan negatif terhadap gaya hidup dan orientasi ekonomi pada para saudagar Laweyan. Kontroversi ini, bisa dengan

mudah dimengerti bila kita memahami filsafat sosial resmi kaum aristocrat feudal Jawa. Bahwa budaya feudal ("feodom"- penguasa tanah), yang meletakkan dasar sumber ekonomi di atas kekuasaan atas tanah, selalu memegang prinsip kekayaan adalah identik dengan kekuasaan atas tanah. Dengan demikian maka melihat kekayaan seseorang, senantiasa bisa dengan mengukur tinggi-rendahnya jabatan dan kekuasaan atas tanah lungguh yang menyertainya. Padahal para saudagar Laweyan, kaya karena berani menekuni ethos kerja secara kompetitif dalam persaingan industri dan perdagangan batik Jawa, dan bukan kaya karena penguasaan atas tanah.

Realitas Sejarah.

Sejarah panjang perkampungan industri batik, yang juga mencerminkan potret homogenitas kampung industri pertukangan di Laweyan, agaknya seirama dengan lahirnya peradaban air Bengawan Solo yang masih sarat berfungsi sebagai alat jaringan transportasi sungai. Bila Prof. Darsiti Suratman mampu mengidentifikasikan jumlah 160-an bandar perdagangan di bibir Bengawan Solo, dan hulu hingga hilir di pantai Tuban, maka bandar perdagangan "kidul pasar" dan "lor pasar" Laweyan, agaknya menjadi bukti yang kuat untuk mengungkap komunitas dagang Laweyan sudah ada sejak Pajang. Lebihlebih putra angkat Sultan Pajang Sutowijoyo yang memperobeh tanah bumi perdikan di Laweyan, juga diberi sebutan "hangabehi sa-loring pasar" (Laweyan).

Mloyodipuro, dalam memoar-historiograafnya, pernah merangkai argumentasi tentang nama bandar perdagangan "laweyan," agaknya erat kaitannya berhubungan dengan jaringan perdagangan benang "lawe", sebagai bahan utama tenun lawe. Disebutkan aktivitas pusat industni tenun lawe, berada di ujung barat dan pasar laweyan, yaitu "pedan", suatu kawasan pertanian sekaligus penghasil "kapok randu". Tenun "gedhog', seirama dengan suara aktifitas tukang yang ahli penyulam tenun Pedan, utamanya penghasil tenun "lurik", agaknya sangat karakteristik untuk memenuhi kebutuhan "tapih-kemben" bagi wong cilik Jawa. Kebutuhan supply demand untuk merujuk kepribadian orang Jawa berpakaian maka tenun lurik agaknya menjadi afdol untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, nampaknya lebih argumentatif bila nama laweyan diambil dan rujukan aktivitas pasar dalam perdagangan benang lawe. Kompetisi pasar, adalah kultur yang membentuk kepribadian kaum perempuan laweyan untuk membangun etos drajad, semat, pangkat. Itulah sebabnya, mengapa tradisi bisnis lokal di Laweyan, senantiasa berada di bawah kendali kaum perempuan.

Struktur sosial resmi dalam sistem industri batik keluarga di Laweyan, bertumpu pada sentral management "mbok mase" sebagai pengendali industri dan perdagangan batik. Mereka disebut juragan, karena menguasai modal dan jaringan pasar. Serumah dalam keluarga besar indogam, wilayah kekuasaan ekonomi mbok mase, senantiasa masih dikontrol oleh orang tua perempuan yang memerankan sebagai "mbok-mase sepuh". Dunia pendidikan management keluarga juga dikenalkan disana, utamanya untuk generasi cucu perempuan, yang biasa disebut "mas rara". Kepala rumah tangga yang diperankan oleh para suami, juga disebut "mas nganten" (nom-sepuh), sebenarnya hanya memegang peran simbolik untuk penjaga moral para saudagar perempuan kaya disana. Sementara, anak laki-laki yang juga disebut sebagai "mas bagus", sangat dimanjakan, karena tidak pantas memperoleh pekerjaan mengelola pabrik batik.

JALAN PANJANG MENUJU PERDAMAIAN DI ACEH (4-12-1976 – 15-8-2005)

Dra. Srisuyanti, M.Hum

Makalah ini mengangkat permasalahan mengapa pemerintah dalam mencapai kesepakatan danilai dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM di Helsinki dalam kurun waktu yang relatif lama kurang lebih 29 tahun, khususnya setelah pemerintah menggelar operasi terpadu di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Dengan mengacu pada format politik Orde Baru yang menempatkan TNI/Polri yang pada waktu itu disebut ABRI sebagai stabilisator, dinamisator, modernisator dalam kehidupan berbangsa dan benegara, maka pemerintah dalam mengatasi GAM tsb dengan menekankan pendekatan keamanan atau operasi militer. Melalui pendekatan keamanan ini maka (3AM pada fase 1 (1976 — 1982) dapat dipadamkan oleh ABRI melalui operasi militer (Operasi Gajah Sakti, Operasi Sandhi Yudha, Operasi Jeumpa) maupun melalui represif politik (menyatakan Gam hanya sebagai Gerakan Pengacau Keamanan/GPK Aceh dan memobilisir massa di kampung-kainpung melakukan apel bersama untuk mengikrarkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Namun sayang keberhasi!an ABRI tersebut tidak diiringi dengan kebijakan pemenntah merebut kembali hati masyarakat Aceh, misalnya menjamin keseimbangan perwakilan po!itik dan ekonomi serta menghidupkan kembali kultur lokal masyarakat Aceh dll. Hal tersebut merupakan peluang (3AM mengeksploitasi kcemburuan sosial masyarakat Aceh. untuk mengadakan rekonsolidasi tahun 1982 1989((fase II)

Dalam rangka menggagalkan perjuangan (3AM pada fase III tahun 1989-2004 pada awalnya pemerintah masih menekankan pendekatan keamanan yaitu dengan mengge!ar Operasi Jaring Merah. Namun Sebelum pemenntah berhasil menumpas (3AM dengan operasi Jaring Merah tersebut datang era reformasi dan pemerintahan Soeharto jatuh sehingga tetjadilah perubahan format politik yang mengacu pada faham supremasi sipil.Dalam rangka mengimplementasikan reformasi interal TNI tahap awal maka pada masa pemerintah Presiden Bj. Habibie

Operasi Jaring Merah tersebut dicabut 7 Agustus 1988 sehingga di Aceh berlaku masa Tertib Sipil sebagaimana yang terjadi di daerah lain di Indonesia.

Seiring dengan keluamya TAP MPR No. VI dan V IMPR/2000, maka ABRI yang telah berganti nama menjadi TNI-Po!ri dan TNI terpisah dengan Polri maka mereka tidak lagi diperankan sebagai penjuru dalam pembangunan dan integiitas nasiona!, Tetapi berperan sebagai bagian dan komponen bangsa. Dengan demikian tindakan militer hanya dapat dilakukan bila keputusan politik untuk penggunaan militer telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mengacu pada Tap MPR tersebut sejak tahun 2000 maka Presiden Abdurrabman Wahid dalam menangani GAM lebih menekankan pendekatan dialog dan peningkatan kesejahteraan (12 Mei 2000 menyepakati status Jeda kemanusiaan dan 15 anuari 2001 menyepakati memorotarium kekerasan) namun Gain mengingkari kesepakatan tersebut.

Pada masa pemenntahan Megawati kebijakan tersebut direvisi dan dikembangkan menjadi kebijakan yang lebih komprehensif: 1. Tetap melanjutkan dialog I perundingan

hingga mencapai kesepakatan penghentian permusuhan, 2.Memulihkan kehidupan sosial ekonomi dan menegakkan hukum maupun ham serta memulihkan keanianan. Hal tab diamanatkan dalani Tap MPR No.VII/MPRI2002. Setelah pemerintah melakukan berbagai upaya yang intensif pada akhirnya tanggal 9 Desember 2002 pemerintah Megawati dan GAM menandatangani perjanjian penghentian permusuhan atau Cassation of Hostilities Agreemen (Coha).

Namun penyelesaian GAM yang hanya menekankan pendekatan kesejahteraan dan dialog serta penghentian permusuhan tersebut tidak membawa hasil. Bahkan opsi yang ditawarkan pemerintah pada Gain da!am pertemuannya di Tokyo tanggal 17-18 Mei 2003, yakni otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ditolak Gam. Penolakan otonomi khusus dan menguatnya GAM tersebut menyebabkan pemerintah berfikir tentang cara lain untuk mengatasi GAM tersebut yakni dengan mensinergikan pendekatan militer dengan pendekatan kesejahteraan, penegakan hukum, perlindungan dan peningkatan harkat kemanusiaan serta pemberdayaan aparat Pemda dengan menggelar Operasi Terpadu (Operasi kearnanan, pemantapan jalannya pemerintahan, penegakan hukum, pemulihan perekonomian dan bantuan kemanusian)

Setelah operasi terpadu mi digelar di Aceh pada masa Darurat Militer I—il (19 Mei 2003 — 18 Mei 2004) dan pada masa Darurat Sipil I-il (19 Mei 2004.48 Mei 2005) maka Gam semakin melemah. Hal tersebut membuat kondisi Aceh semakin kondusif sehingga pemerintah mengakhiri kondisi Darurat Sipil di Aceh ke keadaan normal yang biasa disebut Tertib Sipil sejak tanggal 19 Mei 2005.

Pada masa Tertib Sipil inilah pada akhirnya pemerintah dan Gam mengesahkan Nota Kesepahaman Daniai di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 sehingga dikenal dengan sebutan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, yang berkaitan dengan masalah kesepemahaman dalam: penyelenggaraan pemerintahan, hak asasi manusia, amnesty dan reintegrasi kedalam masyarakat, pengaturan keamanan. Dengan demikian MoU Helsinki adalah merupakan tonggak sejarah menuju perdamaian di Aceh.

KERJA MAGANG: DARI JURUTULIS SAMPAI BUPATI PADA ZAMAN KOLONIAL BELANDA

Drs. Sudarno, M.A.

Semenjak pertengahan kedua abad XIX, oleh Pemenntah Kolonial Belanda telah diselenggarakan pendidikan bagi penduduk Pribumi kebijakan ini telah membuka peluang secara terbuka kepada Orang Pnbumi yang berpendidikan untuk mernperoleh jabatan sehagai Kepala-Kepala Rakyat (Volkshofden) rnulai dan Carnat, Wedana. sampai dengan Bupati di lingkungan Pemerintahan orang Pribumi (Inlands Bestuur) Dampak lain dan meluasnya pendidikan di kalangan Pribumi ini adalah melahirkan intektual-intelektual birokratis dan profesional yang akan menjadi pemimpin-pernimpin rakyat. Namun dernikian mereka tidak mungkin dapat masuk menjadi pejabat di lingkungan Pemerintahan Orang Eropa (Europeeseke Besiuur). Oleh karena jabatan-jabatan di lembaga ini hanya menjadi hak istimewa untuk orang Belanda atau Eropa lainnya.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa orang-orang Pnbumi tidak semudah seperti orang Belanda (Eropa) dalarn mendapatkan pekerjaan atau jabatan di lembaga pemerintahan pada waktu itu. Mereka harus mernenuhi syarat sehagai pegawai yang diatur oleh pernerintah yang bersitat diskriminatif dan sangat rumit. Misalnva peraturan tentang asal-usul klas orang tua: priyayi/ningrat atau orang biasa, status orang tua: kaya atau miskin, dan mereka adalah pro atau kontra kepada pemenintah

Pekerjaan sebagai pegawai pemerintah yang diemban oleh Orang Pribumi terutama jabatan-jabatan strategis mulai Camat Wedana sampai Bupati harus dilalui dengan kerja magang (yantrik) terlebih dahulu pada pekerjaan yang paling rendah yaitu sebagai juru tulis. Jadi seseorang yang ingin meniadi Bupati ia harus rnau rnenjadi pegawai terendah - jurutulis - di setiap tingkat. Yaitu magang di tingkat kecamatan kemudian di tingkat Kawedanan, dan di tingkat kabupaten. Pekerjaan ini sangat berat. karena memagang tidak hanya mengerjakan pekerjaan resminya (kedinasan) tetapi juga harus mengerjakan pekerjaan untuk menyediakan air minum dan mempelajari sopan santun di kantornya maupun mengerjakan pekerjaan di rumah pimpinan atau pejabat yang dimagangi, sehingga mereka hampir mirip seperti pembantu rurnah tangga. Karena magangnya tidak ada batasan waktu itu tergantung pada tingkat kecerdasan dan setiap pemagang. Kerja magang sebagai juru tulis itu bisa herlangsung selama 3 sampai dengan 10 tahun. Baru setelah dianggap mampu bekerja seperti yang diinginkan oleh atasannya, mereka dapat dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi jabatan camat. wedana, atau bupati. Proses itu harus dilalui dengan perjuangan kecerdasan keterampilan disiplin loyalitas yang tinggi. Di dalam sistem pemerintahan yang bercorak beamstenstaat (pernerintah pegawai), pejabat-pejabat tersebut ditempatkan sebagai pegawai - pegawai pemerintah di tingkat daerah yang loyal dan harus menjalankan kebijakan – kebijakan pemerintah yang bersifat top down bukan sebaliknya. Sehingga hal itu mematikan daya kreatifitas para Kepala Rakyat (Volkshofden) di dalam menjalankan tugas, dan cenderung menimbulkan tindakan – tindakan penyalahgunaan wewenang yang kurang memihak kepada bawahannya dan bertanggung jawab.

MENJINAKKAN KULI: PRAKTIK DEHUMANISASI TERHADAP PARA KULI DI DELI BERDASARKAN NOVEL KULI DAN BERPACU NASIB DI KEBUN KARET KARYA M.H. SZEK ELY-LULOF S

Sudibyo

Kolonisasi Belanda terhadap wilayah Hindia-Belanda berlangsung sampai dengan paro pertama abad ke-20. Dalam kurun waktu itu, terekam begitu banyak dokumentasi baik yang berasal dan arsip VOC maupun arsip Kementerian Tanah Jajahan. Jumlah arsip itu bahkan tidak dapat ditandingi oleh arsip aparat pemerintah kolonial yang mana pun (Blusse, 1990: 46). Di antara dokumen-dokumen itu. terdapat dokumen-dokumen yang bersifat pribadi, seperti surat, buku harian (dagboek), kisah perjalanan (*reisverhalen*,), dan catatan harian para awak kapal (scheepjournalen). Di samping itu, tak terhitung jumlah karya sastra yang berkisah atau mendapatkan inspirasi dan masa pendudukan itu berupa roman, novel, sandiwara, dan puisi. Semuanya merupakan perbendaharaan sastra Hindia-Belanda (Termorshuizen, 1990: 18 dan Sastrowardoyo, 1990: 1)

Secara substansial, dalam sebagian besar karya sastra di atas, baik yang berupa dokumen pribadi maupun karya sastra terdapat benang merah yang hampir sama. Keduanya kebanyakan menempatkan diri (*self*) Eropa sebagai subjek dan memandang "sang lain" (others), penduduk bumiputra sebagai objek. Posisi itu sekaligus menempatkan Belanda sebagai poros dan "sang lain" sebagai periferi. Akibatnya, dunia di luar Belanda, secara stereotip dilukiskan sebagai suatu wilayah yang penuh dengan keindahan berbahaya, hutan belantara penuh dengan monster dan ular, laut tanpa dasar serta daerah yang dihuni oleh para kafir yang tidak bisa dipercaya (Gelderbiom, 2000: 5) Prasangka seperti itu menumbuhkan keyakinan bahwa kolonisasi Belanda terhadap wilayah Hindia-Belanda merupakan kewajiban moral. Kepulauan Hindia diyakini sebagai negara yang dihadiahkan oleh Tuhan dan sejarah sebagai wilayah Belanda. Kepulauan yang didiami oleh berbagai suku bangsa yang menurut orang-orang Belanda masih terbelakang itu tidak akan dapat berkembang tanpa pemerintah Belanda yang kuat dan beradab (Gelderblom, 2000: 6).

Berangkat dan tesis mengenai kompleks superioritas peradaban dan keunggulan ras din (Belanda) sebagaimana diungkapkan di atas, tulisan mi akan menghampiri dua teks sastra Hindia-Belanda. Teks yang dipilih adalah Kuli dan Berpacu Nasib di Kebun Karet karya M.H. Szekely-Lulofs. Kedua novel itu mengungkapkan praktik-praktik dehumanisasi yang terjadi di perkebunan karet di Deli pada awal abad ke-20. Kedua novel tersebut mengukuhkan paradigma tentang pernarjinalan yang lazim dalam wacana pascakolonialisme. Tokoh cerita yang sebagian besar adalah para kuli dilihat sebagai objek kepuasan dan ejekan. Para kuli sebagai "sang lain" diberi peran wadag, liar, instinktif, dan kasar sehingga terbuka bagi penguasaan dan dapat dipergunakan untuk bebagai kepentingan. Para kuli dicitrakan secara stereotip sebagai makhluk irasional, tak memiliki energi dan inisiatif, suka menjilat, pembohong, suka berpura-pura, malas, bodoh, kekanak-kanakan, dan mencurigakan. Stereotip watak itu dihadapkan pada citra

Bangsa Eropa yang diwakili oleh para pengusaha perkebunan yang rasional, cermat, dewasa, berbudi luhur, dan intelegensianya sangat terlatih bekerj a seperti sebuah mesin. Konflik antara dua stereotip itu dengan segala kompleksitasnya menjadikan kedua novel di atas dapat dijadikan sebagai dokurnen sejarah atau sekurang-kurangnya sebagai mentifact tentang praktik-praktik dehumanisasi terhadap para kuli yang terjadi di perkebunan-perkebunan karet di Pantai Timur Sumatra, khususnya Deli.

LAUT, SUNGAI DAN PERKEMBANGAN PERADABAN: BENCANA ALAM DAN KESIAPSIAGAAN MANUSIA

Sukendra Martha

Laut, sungai, gunung dan semua aspek fisik geografis menjadi bagian sistem bumi yang tak terpisahkan, terkait dengan perkembangan peradaban manusia. Aspek fisik geografis tadi menjadi bagian terpenting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia penghuni bumi. Laut, kita ambil contoh, dapat dimanfaatkan untuk pelayaran, sumber pencarian ikan, bahan pembuatan garam, dan masih sekian banyak manfaat lainnya. Sungai dapat digunakan untuk pelayaran dan transportasi dan seterusnya. Sementara gunung juga bermanfaat bagi keindahan alam yang dapat dinikmati manusia, dan letusannya pun bahkan dapat berperan sebagai penyubur lahan pertanian di sekitarnya. Peradaban manusia modern (modern civilization) dikenal setelah terlebih dahulu mengalami proses historis yang panjang. Manusia, secara bertahap, mampu menguasai dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan atau aspek geografi fisik tadi dalam ujud kemanfaatan bagi kehidupannya. Semua aspek itu kalau dilihat dan sisi positif sebagai berkah atau nikmat dan Yang Maha Kuasa. Sebaliknya, apabila aspek geografis fisik dan geologis lempeng kerak burni itu kernudian oleh tenaga dinamikanya burni baik vulkanik maupun tektonik geologis boleh jadi menjadi bencana dan musibah. Lantas apa yang terkait dengan perkembangan peradaban manusianya. Letaknya yaitu pada kesiapsiagaan (preparadness) dalam menghadapi bencana itu. Makalah mi tidak membahas keseluruhan aspek geografis alam tadi: laut dan sungai, tetapi lebih terfokus pada laut dan tsunami sebagai dampak dan bencana yang terkait dengan gelombang laut dan kesiapan kita dalam menghadapi bencana tersebut.

GENDER DAN DINAMIKA SEJARAH

Sulistyowati Irianto

Gerakan perempuan di Indonesia memeiliki sejarah yang panjang, sejak sebelum kemerdekaan sampai hari ini. Suara perempuan selalu bergaung pada setiap fase sejarah bangsa yang manapun. Tuntutan terhadap persamaan di muka hukum sudah dilakukan pada masa sebelum kemerdekaan. Keikutsertaan perempuan dalam perebutan kemerdekaan Indonesia memiliki sejarahnya sendiri. Gugatan terhadap ketidakadilan dalam bidang perkawinan selalu muncul baik pada zaman pemerintahan Presiden Sukarno maupun Presiden Suharto. Pada masa reformasi dapat kita saksikan bagaimana gerakan perempuan muncul dalam perjuangan memperoleh kuota dalam bidang politik, melahirkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan ikut berperan dalam mengawasi jalannya berbagai proses legislasi lain.

Gerakan perempuan yang memunculkan isu-isu perempuan Indonesia dalam banyak hal bersentuhan dengan gerakan perempuan dunia. Pada tingkat internasional, perempuan Indonesia juga ikut dalam gerakan perempuan dunia, seperti yang dilakukan melalui badan dunia (PBB), ketika merumuskan Konferensi CEDAW (Confention on The Elemination of All Form of Discrimanition Againts Women) saat ini konferensi tersebut sudah diratifikasi oleh lebih dari 180 negara termasuk Indonesia, yang meratifikasinya melalui UU No.7/1984. Isu-isu perempuan juga mulai memasuki dunia akademik pada pertengahan 1980-an, dan pada tahun 1990-an studi perempuan sudah menjadi mata ajaran yang dikuliahkan di beberapa universitas dan beberapa bidang ilmu seperti: ilmu sosial dan politik, psikologi dan ilmu hukum. Namun eksistensi gerakan perempuan sering tidak terdengar diantara hiruk pikuk peristiwa-peristiwa besar negeri ini. Suara perempuan seringkali bersaing dengan suara kekuasaan. Berbagai rumusan hukum dan kebijakan publik sering mengabaikan pengalaman perempuan, sehingga berbagai masalah ketidakadilan masih dihadapi perempuan dalam bidang: kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, budaya dan politik. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimanakah sejarah gerakan perempuan Indonesia Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan dilakukan melalui bidang hukum. bagaimana strategi perempuan menghadapinya.

WANITA DAN REVOLUSI KEMERDEKAAN DI SUMATERA UTARA 1945-1950

Suprayitno

Tulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan tentang Peran Wanita Dalam Perang Kemerdekaan di Sumatera Utara 1945-1950 dalam perspektif gender dengan fokus pada aktivitas wanita yang tergabung dalam Barisan Srikandi, Palang Merah. Dapur Umum, dan mata-mata. Tulisan ini juga berupaya menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan mereka dalam moment sejarah tersebut. Isu utamanya adalah apakah peran heroik kaum wanita pada masa itu telah mengubah relasi antara pria dan wanita dalam kultur patriaki yang dominan di Sumatera Utara? Atau sebaliknya justru mempertegas klaim dominan kaum pria terhadap kaum wanita?

Keikutsertaan kelompok wanita dalam memikul beban masyarakatnya dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada masa Revolusi Kemerdekaan telah menjadi bagian dalam sejarah Indonesia. Mereka aktif mendukung kaum pria dalam berjuang menegakkan Kemerdekaan Indonesia. Diantara peranan mereka adalah memberikan bantuan dalam bidang logistik (bahan makanan) dan informasi militer kepada pasukan TNI. Bahkan pada kasus-kasus tertentu mereka menjadi pelopor dan pemimpin perjuangan. Bantuan mereka terasa sangat penting mengingat masalah logistik dan informasi tentang kondisi militer pasukan Belanda sangat menentukan jalannya operasi militer itu sendiri. Namun dalam persfektif gender, peran dominan dan heroik mereka tetap saja dibawah peran dominan kaum pria. Artinya, relasi antara pria dan wanita secara kultur sepanjang masa revolusi di Sumatera Utara, masih tetap saja mengikuti pola-pola baku dalam kultur etnik di Sumatera Utara, meskipun sebagian wanita secara psikologis merasa terlepas dan kultur etniknya selama ikut dalam revolusi.

Sebelum serbuan militer Belanda tahun 1947 kesegenap basis-basis militer republik di Medan Area, banyak wanita yang masuk mengikuti pelatihan militer yang diadakan oleh TKR dan Lasykar Rakyat. Boleh dikatakan bahwa sebagian besar mereka adalah kalangan terdidik perkotaan. yang memiliki kesadaran politik tinggi. Rata-rata mereka adalah anggota atau bahkan pimpinan organisasi pada masa pendudukan Belanda, Jepang dan setelah prokiamasi, seperti Partindo. Fujinkai, Perwari dan lain-lain. Mereka sebenarnya adalah menjadi bagian dan revolusi dan telah melakukan persiapan-persiapan menghadapi kemungkinan serangan militer Belanda terhadap Republik Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan masa akhir pendudukan Jepang dan bulan-hulan pertama setelah prokiamasi kemerdekaan merupakan 'rnasa bersiap''. Masa bersiap itu terlihat dan menu latihannya yang berkisar masalah mengahadapi pertempuran, seperti menggunakan senjata, kepalangmerahan, dapur umum, kurir dan mata-mata. Dalam bidang-bidang itulah mereka banyak berperan dalam perang kemerdekaan di Sumatera Utara.

Sebagian wanita juga merasa bagian dan revolusi karena apa yang dilakukan oleh suaminya, sedangkan lainnya karena terbawa oleh situasi revolusi yang tidak menentu. Beberapa informan menyatakan keikutsertaannya mengungsi ke daerah republik karena banyak orang lain atau teman-temannya mengungsi. Mereka menjadi wanita yang terbebas dan ikatan keluarga dan bahu-membahu bersama kaum pria menjadi pejuang revolusioner. Mereka sebagian besar adalah kaum wanita yang pada masa itu berumur belasan tahun yakni antara 12-15 tahun.

FUNGSI BUDAYA MEGALITIK DI ORAHILI-GOMO, KABUPATEN NIAS SELATAN, 1000-1500 MASEHI

Supsiloani, S.Sos.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah fungsi budaya Megalitik di Orahili-Gomo, Kabupaten Nias Selatan pada tahun 1000-1500 Masehi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi perpustakaan (*Library Research*), dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, buku serta literatur yang mendukung. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kalimat urajan.

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi Megalitik di Orahili-Gomo, Kabupaten Nias Selatan pada masa tersebut, sangat besar peranannya dalam segala bentuk kegiatan kehidupan masyarakat, terutama dalam hal kegiatan religi, hukum, dan seni. Pada kegiatan religi, kehidupan masyarakat pemujuaan terhadap arwah nenek moyang merupakan rutinitas yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai tanda pengejawantahan dan penghormatan terhadap orang tua mereka yang telah meninggal dunia dan dewa yang dipuja agar mereka terhindar dari segala malapetaka, penyakit, kutukan, dan kematian serta sebagai alat kontrol sosial. Di dalam hukum juga budaya Megalitik ini berguna sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat tata krama manusia. Dalam seni, masyarakat membuat patung lebih banyak bermakna simbol pribadi raja untuk pemujaan roh nenek moyang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fungsi budaya Megalitik di Orahili-Gomo, Kabupaten Nias Selatan, pada tahun 1000-1500 Masehi sebagai media penghormatan terhadap arwah nenek moyang, penghormatan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia dan untuk mengangkat derajat kedudukan raja. Jadi setalah tahun 1500 Masehi pembuatan patung tidak dilakukan lagi oleh masyarakat seiring dengan masuknya pengaruh agama yang dikembangkan oleh para Misionaris German.

LAUT, SUNGAI DAN PERADABAN: TANTANGAN DAN PELUANG INDONESIA SEBAGAI NEGARA BAHARI

Susanto Zuhdi

Pembangunan bangsa (national building) sebagai agenda historiografi nasional, seperti yang dilakukan di Asia yang dipengaruhi angin musim (Asia Monsoon): tidak cukup menyiapkan warganegaranya untuk memasuki zaman kerja sama regional dan glohalisasi. Secara tradisional bangsa yang berada di lingkaran samura Hindia dan laut bagian timur itu memiliki "pandangan keluar" (outward looking). Untuk beberapa milenia negeri-negeri itu dihubungkan dan berinteraksi satu sama lain melalul transport laut dan perdagangan. Anthony Reid menyebut periode ini sebagai masa modern awal Asia Tenggara antara ahad XVI-XVL tetapi dapat ditarik mundur sampai abad XV atau diulur maju sampai ahad XVIII.

Interaksi antara masyarakat Asia Tenggara dengan kebudayaan asing dalam masa itu memperlihatkan bagaimana pusat-pusat kekuasaan klasik dan para pemimpinnya menangani wilayahnya. Dinamika peradaban di Asia Tenggara dapat dipaparkan dari dua bentuk negara klasik di Asia: "negara pesisir/sungai" (*riverine coastal states*) yakni kepulauan Indonesia, Semenanjung Malaya, Filipina; dan "negara persawahan/daratan rendah" (*lowland wet-rice states*) yaitu Burma. Thailand. Kamboja, Laos, Vietnam dan Jawa. Tanggapan Asia Tenggara terhadap perdagangan internasionial dicerminkan dengan pola-pola pertukaran: antara penduduk di dataran tinggi dan dataran rendah; perdagangan antara penduduk di pedalaman dengan pesisir; dan antara pedagang asing yang menetap dengan penduduk di pedalaman. Sebelum secara berarti penetrasi ekonomi asing (Barat) terjadi, jejaring sosial-ekonomi dan politik internal telab lana berkembang di Asia Tenggara

Sejarah maritim memperlihatkan bahwa globalisasi merupakan perkembangan yang lazim dari sistem-sistem yang terbentuk karena proses integratif kewilayahan. Permasalahannya mulai terlibat pada saat pusat (center) yang notabene Barat secara terus menerus menarik keuntungan da pinggiran (periphery). Ini bertolak dml sejarah kolonialisme-iniperialisme dunia. Interkoneksitas antara Timur dan Barat dalam konteks global menjadi jelas dalam abad impenialisme (the age of imperialism). Dalam konteks itu Barat berarti maju (progress) dan oleh karena itu memperoleh keuntungan (benefit). Dalam analisis Hobson dan V. I . Lenin telah terjadi ketimpangan struktural yang memaksa Asia ke dalam orbit Eropa. Teori pasca kolonial menjelaskan mata rantai struktural antara kemajuan Barat dan Non-Barat yang miskin bukan akibat keterbelakangannya tetapi konsekuensi langsung dan berlangsungnya pemusatan kernakmuran Asia ke Fropa yang disebut colonial drain. Penjelasan teoretik selain dari Andre Gunder Frank (1966) yang paling berpengaruh adalah dari Imanuel Walterstein (1974). Ia menibeni rumusan bentuk paling awal da "cistern dunia" --scberianiya bukan clalam arti 'sedunia atau global-melainkan mengacu pada lingkungan luas interkoneksi perekonomian. Walterstein mencatat munculnya kapitalisme di Eropa abad ke-16. sejak itulab sistern dunin modern terhagi menjadi "pusaf" (core) yang mengendalikan ekonomi politik dan mendikte kerangka produksi dan distribusi da peripheiy, tempat sumber daya mengalir ke pusat (*core*) dan hampir tak mungkin tere merajadi subordinasi sejak awal,

Jika kerja sama regional diabaikan maka apakah aksioma "siapa menguasai laut menguasai dunia" justru akan memperkuat teori ketimpangan? Kemampuan seperti apa yang diperlihatkan masyarakat Asia Tenggara dalam konteks itu. Sejauh mana dengan pendekatan kelautan. masyarakat dunia mampu memecahkan masalah ketimpangan struktural dengan berbagai aspeknya? Bagaimana Indonesia sebagai negara bahari dapat mengatasi masalah dan memanfaatkan potensi laut (dan sungai) untuk kesejahteraan bangsanya? Suatu keiangka pemetaan mengenai peradahan laut dan sungai Asia Tenggara kiranya dapat memberi wawasan dan pemahaman kekinian kita.

KEBIJAKAN EKONOMI BERDIKARI DAN PERKEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN

Sutejo K. Widodo

Pada saat memasuki persaingan global, sumberdaya manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat berperan dalam percaturan yang lebih luas. Jika harapan tersebut terlalu tinggi, maka setidak-tidaknya dapat menjadi pelaku ekonomi di negerinya sendiri. Kaitannya dengan permasalah tersebut pada satu episode strategi dasar dalam pembangunan ekonomi, politik, dan kebudavaan yang telah menjadi sejarah bernama Politik Berdikari dirasa menjadi penting untuk dibahas kembali. Kebijakan politik yang juga disebut TRISAKTI TAVIP; mempunyai pokok tujuan yaitu: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan didasarkan pada semangat nasionalisme. Lebih khusus pelaksanaan berdikari telah menjadi peletak dasar dan faktor pendorong berkembangnya usaha perikanan.

Sampai dengan akhir tahun 1950-an, kebijakan pemenuhan kebutuhan ikan untuk penduduk di Jawa didasarkan pada impor atau mendatangkan ikan dan daerah atau wilayah lain. Belum lagi masalah garam sebagai bahan penting terkait dengan usaha penangkapan ikan masih merupakan komoditi yang pengadaan dan penyalurannya masih dimonopoli oleh pemerintah; sehingga usaha perikanan di sepanjang pantai utara Jawa masih belum menguntungkan. Namun sejalan dengan palaksanaan Berdikari dalam bidang ekonomi, pada tahun 1961 pemerintah menghentikan ijin impor ikan. Sebelumnya ikan asin dan kening didatangkan dan Vietnam Selatan, Siam, dan Malaya. Hal itu telah berlangsung lama sejak masa kolonial. Kebijakan berdikan di bidang pemenuhan ikan diperkuat oleh adanya ketegangan hubungan politik antar bangsa Indonesia dengan Malaya, yang sering dinamakan proyek penghancuran neo-kolonialis.

Makalah dengan judul Kebijakan Ekonomi Berdikari dan Perkembangan Sektor Perikanan berusaha membahas suatu kebijakan ekonomi yang berdasarkan pada pelaksanaan semangat nasionalisme kaitannya dengan perkembangan ekonomi yang dalam hal ini adalah perkembangan ekonomi perikanan. Permasalah tersebut menarik dan penting karena telah memberikan pondasi bagi perkembangan sektor perikanan pada masa-masa selanjutnya. Di masa lampau, walau Indonesia dengan kekayaan deposit ikan sebagai salah satu sumber daya laut yang melimpah ruah, tetapi kebutuhan ikan dan penduduknya dilakukan dengan impor. Pelaksanaan Ekonomi Berdikari menjadi penting bukan saja untuk kepentingan pembahasan di masa lampau, akan tetapi bisa pula menjadi suatu perspektif historis dalam pergaulan ekonomi global yang sangat merugikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tak berdaya seperti masa sekarang ini

KOTA DAN DINAMIKA KEBUDAYAAN: RASIONALITAS MENJADIKAN PEKANBARU SEBAGAI PUSAT KOTA BUDAYA MELAYU DI ASIA TENGGARA

Prof. Suwandi, M.S.

Perkembangan sebuah kota tidak terlepas dari dinamika penduduknya. Dimanapun kota itu berada, suatua hal yang pasti, penduduk kota tersebut ingin mencirikan budaya tempatan dalam setiap aspek pembangunannya terutama dari bentuk fisik bangunan. Dalam konteks ini adalah bentuk fisik bangunan dan budaya tempatan yang betul-betul digali dari kultur tempatan dimana kota tersebut dibangun. Sebab pada dasarnya masingmasing kota mempunyai karakter yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau dalam sejarahnya yang panjang, sekitar lima tahun terakhir, sedang berupaya dan bersungguh-sungguh untuk menanamkan kembali nilai-nilai melayu dalam aspek pembangunannya, setelah sekian lama menghilang akibat sentralisasi pemerintah Orde Baru.

Untuk merealisasikan keinginan itu, maka atas inisiatif pemerintah kota dan DPRD telah dirumuskan Visi Kota Pekanbaru, yaitu menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perekonomian, Pendidikan, dan Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara tahun 2021. Penetapan visi ini dari segi peran dan fungsinya adalah sebagai pandangan hidup penduduk Kota Pekanbaru dalam mencerna masa depan. Salah satu langkah kongkret yang telah diambil dalam mewujudkan visi ini adalah dengan ditetapkannya Perda nomor: 14 Tahun 2000 tentang Ijin Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru, dimana ditegaskan keberpihakan Pemerintah setempat kepada bangunan yang bercirikan arsitektur Melayu. Tentu saja langkah ini belum cukup, perlu penjabaran lebih terperinci tentang apa yang harus dilakukan, dimana harus memulai, kapan waktu untuk melakukannya, dan siapakah orang-orang yang akan terlibat. Lebih dari itu, agar tidak terkendala dikemudian hari, tidak salah kiranya bila pembangunan yang akan dilakukan, selalu bercermin kepada kearifan sejarah masa lalu bagaimana kota-kota di negara maju dirancang sesuai dengan keunggulan dan karakteristiknya masing-masing.

ORANG CINA DI BANDUNG, 1930-1960 SIASAT EKONOMI ETNIS CINA DI BANDUNG DALAM MENGHADAPI KEBLJAKAN PENGUASA

Tanti Restiasih Skober, S.S., M.Hum.

Tulisan inimencoba mengungkap kehidupan orang Cina di Bandung, selama periode 1930 sampai dengan 1960. Sebuah harapan akan adanya benang merah dan kebijakan pemerintah terhadap orang Cina di Bandung, serta bagaimana mereka bisa tetap bertahan terhadap tekanan ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Adaptasi atau lebih sederhananya dalam penelitian mi memakai istilah siasat, adalah usaha untuk tetap menjalankan eksistensi bukari hanya kodrat sebagai manusia yang terus berusaha hidup, juga tetap mempertahankan eksistensi sosio kultural.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat kebijakan kebijakan yang diterapkan oleh penguasa terhadap orang Cina di Bandung yang pada sisi tertentu tidak menguntungkan bagi orang Cina di Bandung. Hal inilah yang membuat orang Cina sebagai minoritas melakukan siasat-siasat tertentu untuk dapat bertahan hidup. Dalam bidang ekonomi, pada masa Hindia Belanda, Gina Mindring, ternyata cukup banyak ditemukan di Bandung. Kemudian, pada masa Pendudukan Jepang terdapat Kumiai yang cukup besar di Bandung. Akan tetapi, ternyata juga ditemukan, perdagangan gula ilegal pada masa revolusi.

Mengarungi ruang dan waktu, dalam memetakan kehidupan sosio kultural sejarah orang Cina di Bandung, tentunya menampilkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adaptasi etnis Cma. Lantas akan muncul kebijakan pemerintah yang terkadang tidak berpihak, kalaupun ada keberpihakan tentunya hanya menghadirkan catatan dikotomi. Dan yang menjadi penting adalah tekanan dan komunitas mayor tas. Bahwa dikotomi mayoritas dan minoritas maupun penguasa dan yang dikuasai menghasilkan siasat etnis Cina.

NASIONALISASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN DALAM TRANSISI KETATANEGARAAN INDONESIA (JEMBER 1900 – 1960)

TrI ChandraAprianto

Tulisan ini membincangkan berbagai upaya pemindahan sumber ekonomi yang sebelumnya dikuasai Belanda ke Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nasionalisasi. Dasar dan ide mi adalah, kendati kemerdekaan nasional tahun 1945 telah diraih namun terdapat persoalan mendasar, khususnya di bidang ekonomi yang harus sesegera mungkin diselesaikan oleh pemerintah RI. Persoalan tersebut berupa masih banyak sektor ekonomi modern yang dikuasai oleh kekuatan modal asing yang berpusat pada industri perkebunan, di mana berbagai perusahaan perkebunan Belanda di Jember pada khususnya telah beroperasi sejak periode 1830-an.

Di Jember mi setidaknya sebanyak 24 perusahaan perkebunan di bawah 8 (delapan) kantor direksi harus mengalami proses nasionalisasi. Permasalahannya kemudian adalah tidak saja berlangsung proses perpindahan kepengurusan perusahaan perkebunan dan milik asing ke kalangan Bumi Putera. Perubahan tersebut juga menyisakan persoalan, baik itu teknis ekonomi di perusahaan perkebunan, masalah sumber daya manusia dan lebih dan itu terdapat juga persoalan yang bersifat politik yang menyertai proses nasionalisasi tersebut. Karena bersamaan dengan proses tersebut berlangsung pula pertarungan ideologi politik guna menentukan arah dan orientasi pembangunan nasional nantinya.

Persoalan lain yang dibicangkan dalam tulisan ini mengenai adanya konflik perebutan sumber daya agraria yang terjadi selama kurun berlangsungnya proses nasionalisasi di wilayah perusahaan perkebunan di Jember. Tampaknya konflik perebutan klaim atas penguasaan sumber daya agrania di Jember masih tetap berlangsung kendati telah berlangsung proses nasionalisasi. Sehingga dapat digambarkan dasar apa yang menyebabkan adanya konflik yang berkepanjangan tersebut.

PERUBAHAN PERANAN WANITA DALAM EKONOMI KELUARGA DI PEDESAAN NELAYAN (DESA PERCUT, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)

Trisni Andayani

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun masalah yang di rumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Peranan apa sajakah yang dilakukan wanita dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga?; 2. Mengapa terjadi perubahan pekerjaan wanita di desa penelitian dalam bidang mata pencaharian?; 3. apakah pekerjaan wanita menjadi seorang nelayan wanita sama dengan yang dilakukan oleh laki-laki.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan masyarakat desa secara keseluruhan terutama peranan wanita sebagai ibu rumah tangga dalam mencari nafkah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan sebab-sebab wanita menjadi nelayan, serta menganalisa perbedaan wanita dan laki-laki dalam melakukan pekerjaan sebagai, nelayan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan wanita dalam ekonomi keluarga mengalami perubahan. Sebelumnya wanita di desa penelitian mencari nafkah dengan berdagang kecil-kecilan, baik berjualan makanan maupun membuka kedai kopi dan bukan menjadi nelayan. Perubahan pekerjaan wanita menjadi nelayan juga terjadi pada wanita yang selama ini hanya berperan sebagai ibu rumah tangga biasa.

Adapun penyebab terjadinya perubahan, yaitu : 1. untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga; 2. kelaut tidak memerlukan modal financial yang cukup berarti. Walaupun mengalami beberapa hambatan baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat serta ketika berada di tengah laut, tetapi jumlah nelayan wanita di desa penelitian menunjukan angka peningkatan atau bertambah.

Selanjutnya hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan teoritis bagi kalangan ilmuwan untuk memperdalam kajian tentang wanita. Kemudian hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan kaum wanita di tanah air baik di pedesaan maupun di perkotaan.

REFLEKSI KRITIS TERHADAP STRATEGI PEDAGOGIS MATA PELAJARAN SEJARAH DI SMA

Umasih

Pendidikan sejarah mempunyai fungsi fundamental dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Untuk itu, salah satu tugas yang diemban Sejarah sebagai pendidikan adalah *transmission of culture*.

Dalam pandangan Taufik Abdullah, strategi pedagogis Sejarah Indonesia sangat lemah, karena pendidikan sejarah di sekolah masih berkutat pada pendekatan *cronicle* yang menuntut siswa agar menghapal suatu peristiwa. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengajak siswa agar mengerti suatu peristiwa guna memahami dinamika suatu perubahan. Siswa SMA sudah seharusnya dibiasakan berdialog dengan lingkungan dan memilih-milih persoalan yang ada.

Berbicara tentang strategi pedagogis Sejarah, tentu tidak terlepas dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan opersional lainnya dalam periode tertentu. Salah satu komponen pendidikan yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan pendidikan adalah kurikulum. Artinya kurikulum menjadi acuan strategi pedagogis, agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan Undang-undang dasar 1945 dapat terwujud.

Dalam sejarahnya, sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 hingga kini telah melakukan delapan kali pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Atas, dan kurikulum Sejarah berada di dalamnya. Bagaimana strategi pedagogis Sejarah yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut ? Dalam hal strategi pedagogis tentu berkaitan dengan bagaimana pembelanjaan sejarah berlangsung.

Dari hasil penelitian beberapa pakar pendidikan sejarah, saya menyimpulkan bahwa strategi pedagogis sejarah dari periode kurikulum yang satu ke periode berikutnya boleh disebut sebagai pendekatan apa adanya. Metodologi pembelanjaran yang digunakan umumnya masih konvensional dominan ceramah, tanya jawab dan diskusi Metode ceramah bervariasi tidak memiliki kemampuan mengembangkan tujuan kurikulum sejarah dalam aspek kognitif tinggi dan afektif. Selain itu pengembangan bahan/materi lepas dari hakikat kesejarahan. Terdapat indikator kebiasaan guru membaca kurang serta malas dalam menggunakan alat peraga dan media. Bahkan evaluasi yang pernah dilakukan Balitbang Depdiknas menyimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum di sekolah (SMA) kurang optimal, kurang ada usaha guru untuk mempelajari pedoman yang ada serta sarana penunjang yang belum memadai. Di SMA Kabupaten Pati, menurut hasil penelitian Sayono, pendekatan yang di gunakan guru-guru cenderung monodimensi-politik, mengikuti alur berpikir penyusunan buku pegangan, serta meremehkan pentingnya strategi pembelajaran, karena guru mengajar sama saja untuk jurusan yang beda.

Kenyataan lain menunjukan bahwa evaluasi hasil belajar yang dilakukan sebagian besar masih dalam bentuk *pencil and paper test*, walaupun sudah ada variasi

dalam bentuk *multiple choice* dan uraian. Dengan hanya mempelajari bentuk evaluasi itu saja bagaimana guru-guru sejarah dapat mengembangkan kemampuan berpikir prosesual dan juga sikap siswa sebagai pribadi serta bangga sebagai bangsa Indonesia dan masyarakat dunia.

Terdapat alasan klasik yang dikemukakan oleh guru-guru, antara lain karena mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan buku sumber, alat dan media yang dapat mengembangkan proses pendidikan seperti yang diharapkan dapat mengembangkan pendidikan seperti yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis dan berpikir kesejarahan. Beberapa kepala sekolah dan wakil urusan kurikulum mengakui bahwa para guru sejarah kurang kreatif dan inovatif. Sebenarnya ada juga guru-guru yunior yang menunjukan kreativitas dalam meramu materi, sehingga materi sejarah yang di sajikan lebih menarik perhatian siswa. Dan yang lebih penting lagi adalah nilai – nilai universal kemanusiaan itu harus diajarkan, sehingga tugas transmission of culture dari pendidikan sejarah dapat terwujud dengan baik.

KONFLIK TANAH DI DAERAH PERBATASAN: (STUDI KASUS TIGA KELOMPOK ETNIK DI PASAMAN, SUMATERA BARAT, 1930-1960)

Undri. SS. M. Si

Persoalan tanah di Sumatera Barat sejak dekade terakhir mi terpusat kepada tiga masalah, pertama adalah masalah perubahan sistem pernilikan tanah; kedua mas konflik tanah; dan ketiga masalah proses penyelesaian konflik tanah. Ketiga masalah tersebut dan dulu sampal sekarang merupakan masalah serius yang dialami oleh etnik Minangkabau sebagai etnik mayoritas yang mendiami daerah Sumatera Barat.

Perubahan-perubahan dalam sistem pemilikan tanah di Minangkabau misalnya telah ama terjadi. Perubahan-perubahan tersebut diiringi oleh meningkatnya intensitas konflik tanah di Minangkabau. Meningkatnya intensitas konflik bukan saja disebabkan oleh faktor merebaknya sistem monetisasi keseluruh pelosok negeri, sistem hibah, sistem kekerabatan, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, namun juga oleh faktor lainnya salah satunya faktor migrasi. Bermigrasinya dua etnik yakni Mandailing, dan Jawa ke Pasaman, rantau nya Minangkabau, telah menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Konflik tersebut dalam bentuk perebutan tanah, baik untuk pemukiman maupun lahan pertanian. Dalam perebutan tanah konflik yang mengarah kebentuk kekerasan tidak dapat dihindarkan.

Berawal dan bermigrasinya orang Mandailing secara besar-besaran tahun 1930. Tercatat dan 37.612 orang yang bermigrasi keseluruh Indonesia sebanyak 25.945 orang (68.9%) bermigrasi ke daerah Sumatera Barat, khususnya ke Pasaman. Sebab kampung halaman Mandailing terletak bersebe disebelah utara Pasaman. Telah memungkinkan mereka untuk bermigrasi ke daerah tetangganya tersebut. Adapun arus migrasi orang Mandailing yang berasal dan Tapanuli Selatan tahun 1930 menempati daerah Rao Mapat Tunggul. Dari daerah ini kemudian menyebar keberbagai daerah yakni Kinali, Simpang Empat, Ophir, Ujung Gading, Air Bangis dan Tongar. Saat datang mereka menganbil tanah penduduk setempat dengan sekehendak hatinya. Tanah yang mereka ambil bukan saja tanah untuk pemukiman namun juga untuk lahan perkebunan dan lahan pertanian sawah. Fenomena seperti ni membuat mereka golongan yang 'lapar tanah' (*land hunter*). Mengutip pendapat Langenberg dalam memahani tipelogi orang Mandailing d penguasaan tanah.

Migrasi orang Mandailing tahun 1930 seiring dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam membangun sektor perkebunan khususnya perkebunan karet rakyat di Rao Mapat Tunggul. Sebab potensi daerah ini dari segi ekonomi didukung oleh keadaan alamnya. Sehingga pemenintah kolonial Belanda menjadi tertarik untuk menjadikan Rao M Tunggul sebagai salah-satu daerah eksploitasi ekonomi. Kecendrungan pemenintah kolonial pada masa itu terutama kepada jenis produksi tanaman yang dapat dieksport di pasaran internasional. Etnik Mandailing yang datang kedaerah mi juga ikut mengambil tanah hutan untuk dijadikan perkebunan karet. Dengan hal tersebut, penduduk ash merasa kuatir akan keadaan ekonomi rumah tangganya. Sebab

kedatangan penduduk pendatang mempersempit kesernpatan penduduk asli untuk berusaha terutama dalam melakukan pembukaan lahan baru.

Pada zaman pendudukan tentara Jepang karena dalih biaya perang., Jepang merehabilitasi kebun karet. Disamping itu tentara pendudukan Jepang pun mengeksploitasi tenaga rakyat dengan istilah romusha. Romusha mi membuat konflik antara penduduk ash dengan penduduk pendatang dapat di "redam". Karena adanya otoritas yang kuat dan Jepang dalam mengeksploitasi tenaga rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, migrasi etnik Mandailing dan Tapanuli Selatan tenjadi tahun 1950-an. Migrasi yang menurut penulis cukup menghebohkan daerah Pasaman khususnya Rao Mapat TungguL Tercalat migrasi orang Tapanuli Selatan kedaerah Rao Mapat Tunggul tahun 1953 berjumlah 200 orang. Jumlah tersebut meionjak tajam hingga pu(uhan nibu orang ditahun 1957. Mereka mengambil tanah penduduk ash dengan sewenang-wenangnya, Mereka datang dengan menyelundup (sembunyi-sembunyi).

Konflik diperparah, ketika tahun 1950-an itu pemerintah pusat mendatangkan orang Jawa lewat kebijakan transmigrasi. Awalnya daerah yang menjadi tempat para transmigran Jawa adahah Rao Mapat Tunggul. Keberadaan orang Jawa di daerah tersebut ditentang oieh masyarakat dan tokoh masyarakat. Karena mendapat tantangan, akhirnya mereka dipindahkan ke bagian banal Rao Mapat Tunggul yakni Pasaman Barat. Daerah ini telah ditempati oleh etnik Minangkabau dan Mandailing sebelumnya. Kehadiran mereka di daerah ini kerapkali terjadi konflik dengan penduduk "seternpat" menyangkut hak milik atas tanah. Sebab penduduk setempat masih merasa tanah yang ditempati transmigran tersebut milik mereka. Walaupun oleh ninik mamak setempat telah menyerahkan tanah kepada penduduk pendatang.

Makalah ini akan melihat tentang bagaimana proses migrasi tiga kelompok etnik, Minangkabau, Mandaihing dan Jawa berebut tanah ke daerah Pasaman. Di daerah rantau Minangkabau tersebut, etnik Minangkabau sebagai penduduk ash mengaggap dua etnik yakni Mandaihing dan Jawa telah merebut hak mihik mereka atas tanah yang ada didaerahnya. Bagaimana mereka saling menguasai tanah, baik untuk pemukiman maupun lahan pertanian sehingga terjadi konflik?, bagaimana bentuk konflik?, bagaimana pengaruh konflik terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat ?, dan bagaimana bentuk penyelesaian konflik itu sendiri?.

PENCURIAN DAN PELANGGARAN HUTAN: PERBANDITAN SOSIAL DI PEDESAAN REMBANG PADA AKHIR ABAD KE-19 DAN AWAL ABAD KE-20

Warto

Pencurian kayu dan pelanggaran hutan marak terjadi di Keresidenan Rembang selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Fenomena itu merupakan bagian dan respons petani terhadap tekanan struktural yang membatasi akses mereka dahim memanfaatkan hutan. Pencurian kayu dapat dipandang sebagai bentuk perbanditan sosial yang muncul di pedesaan kawasan hutan jati. Sejak lama sumberdaya hutan di Keresidenan Rembang menjadi rebutan banyak pihak. Perebutan sumber daya itu semakin meningkat ketika, di satu pihak, hutan semakin langka akibat eksploitasi yang berlebihan sehingga menyebabkan degradasi; dan di lain pihak, kebutuhan para pemangku kepentingan terus bertambah. Tiga aktor yang terlibat dalam konflik kepentingan itti adalah negara, pengusaha swasta, dan masyarakat lokal. Negara kolonial yang menggantikan peran penguasa tradisional (raja) semakin penting kedudukannya dalam menguasai sumber daya hutan sejak abad ke-19. Tidak lama kemudian peran negara digantikan oleh swasta sejak masa liberal 1 870-an. Sementara itu perekonomian penduduk lokal yang berbasis hutan semakin terpinggirkan oleh hegemoni kekuatan asing yang menguasai hutan. Perebutan sumberdaya hutan pada akhirnya memunculkan eskalasi konflik dan ketegangan yang berkepanjangan antarberbagai aktor.

Munculnya istilah 'pencurian' dan 'pehinggaran hutan' sesungguhnya merupakan kreasi negara yang memegang otoritas kekuasaan atas hutan. Ketika hutan dinyatakan menjadi milik negara (staatsdomein) sehiruh pranata tradisional dipaksa tunduk pada tatanan yang baru. Bagi penduduk yang mengambil hasil-hasil hutan dianggap sebagai pencuri bila tidak membawa izin dan petugas kehutanan. Untuk menjaga klaim 'hutan negara', pemerintah memperluas birokrasi dan peraturan kehutanan. Kedua hal mi juga menjadi sarana untuk melindungi kepentingan swasta. Akhirnya hak-hak tradisional penduduk menjadi hilang.

Ketika katup pengaman kebutuhan subsistensi terancam, petani terpaksa mencuri kayu dan hasil-hasil hutan lainnya yang menjadi larangan. Fenomena pencurian dan pelanggaran hutan sebagai bentuk perbanditan sosial di pedesaan Rembang menarik diungkapkan karena dua hal. Pertama, fenomena itu merefleksikan terjadinya depnvasi relatif di pedesaan hutan akibat adanya intervensi kekuatan asing. Kedua, pencunan dan pelanggaran hutan merupakan 'transkrip tersembunyi' (meminjam istilah Scott, 1990) perlawanan kaum lemah yang dilakukan secara sporadis, fragmentaris, dan tents menerus terhadap hegemoni kekuatan asing. Dengan memahami fenomena itu usaha menempatkan kaum tani sebagai aktor sejarah lebih dimungkinkan.

DINAMIKA PEREKONOMIAN KERAJAAN SINTANG DI KALIMANTAN BARAT 1822 – 1855

Yuda B. Yangkilisan, M. Hum

Ketika utusan Hindia Belanda memasuki kawasan pedalaman aliran sungai Kapuas di Kalimantan Barat, inereka menemukan suatu keadaan dan perkembangan yang dinamis di Sintang. Masyarakat di tempat itu telah mengenal bentuk politik berupa kerajaan yang bertahun-tahun sebelumnya menjalin hubungan dengan kerajaan Pontianak dan sekitar yang terletak di hulu sungai dan pesisir pantai. Perekonomiannya pun demikian beragam dan dalam dinamika interaksi komersial yang modem, marak dan giat dengan sungai sebagai urat nadi komunikasi dan sumber daya alamnya. iakalah mi mengambil kurun waktu mulai tahun 1822 hingga 1855 sebagai batasan pembahasan yakni sejak pengenalan Sintang dengan kekuatan kolonial Hindia Belanda dan menjelang pecahnya sebuah pemberontakan oleh kalangan elite kerajaan itu. Penggambaran dinamika ekonomi mi didukung terutama oleh keterangan kwantitatif berdasarkan studi arsip dan suinber-sumber sejaman yang dilandaskan pada metode penelitian sejarah yang multidisipliner. Penjelasan keadaan dan dinamika sektor-sektor perekonomian Sintang disampaikan pula dalam bentuk-bentuk tabel-tabel sederhana yang mendukung maksud peinbahasan. Gambaran perekonomian tersebut raemperlihatkan suatu dinamika dan pencapaian perekonomian yang relatif cukup menguntungkan untuk kehidupan masyarakat daerah tersebut. Selanjutnya, berjalin dengan blue print ekspansi kolonial terutama di wilayah-wilayah perbatasan negara Hindia Belanda yang mulal dibina sejak usainya Perang Diponegoro dan ancaman atau persaingan dan luar berupa kehadiran seorang Inggris, White Rajah dan Serawak James Brooke yang sejak tahun 1840-an mulai memperluas pengaruh dan janingan ekonominya, dinamika ekonomi internal itu menjadi penyebab dan latar belakang pelancaran penguasaan atas kerajaan Sintang oleh kolonialisme Belanda yang berpusat di Pontianak sebagai bagian dan suatu Residensi Borneo West. Suinber daya ekonomi itu menjadi suatu penyebab signifikan merebaknya sebuah pemberontakan di kerajaan itu yang bermula pada tahun 1856 dan berakhir tahun 1861. Dan lima pemuka pemberontakan itu hanya seorang yang menyerahkan diri sedangkan lainnya tidak tertangkap atau terbunuh. Mereka wafat satu persatu dalam perjuangan dan seorang dan mereka bergabung dengan perlawanan Mas Natawijaya yang menyingkir ke pedalaman Kapuas sebagal sempalan perang Banjar dan Belanda tahun 1864. Penyelesaian pemberontakan itu berupa sebuah perjanjian perdamaian.

SATU ISLAM BEDA PEMAHAMAN SATU IMAN BEDA JALAN: NURCHOLISH MADJID DAN GERAKAN PEMBARUAN PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA 1970-2004

Yudhi Andoni, SS

Penelitian ini merupakan penulisan sejarah intelektual atau pemikiran. Sejarah pemikiran ialah sejarah tentang ide seseorang yang dipublikasikan ke tengah masyarakat dalam bentuk artikel media massa, buku, makalah dan sejenisnya. Dalam hal mi, penulis mengarahkan penelitian pada sejarah pemikiran Nurcholish Madjid.

Nurcholish Madjid adalah seorang cendikiawan Muslim Indonesia ternama. Hasil pemikiraimya mempengaruhi sebagian besar pemahaman keislaman masyarakat urban Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenalnya berkat pidato dalam pertemuan silahturahmi pemuda Islam yang tergabung dalam organisasi seperti, HMI, GPI, P11 dan Persami. "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat", merupakan pidato penting sekaligus tonggak perubahan pemikiran keislamannya. Ada dua momen penting sehubungan pidatonya tanggal 3 Januari 1970 tersebut. Pertama, berakhirnya periodesasi sejarah gerakan pembaruan pemikiran Islam modernisme dan munculnya periodesasi neo modemisme. Kedua, mulai berkuasanya pemerintahan Orde Baru yang secara terang tak mau mengakomodir kepentingan politik Islam. Dalam dua konteks mi, Nurcholish Madjid menyampaikan dalam pidato 7 Januari tersebut ungkapan; Islam, Yes, Partai Islam, No, serta menganjurkan sekularisasi pemahaman keislaman masyarakat Muslim Indonesia.

Pasca keluarnya makalah tefsebut, berbagai reaksi timbul guna merespon pemikiran Nurcholish Madjid. Beberapa tokoh Islam terkemuka menuding dirinya sebagai antek AS, Yahudi, sekuler dan berusaha me-counternya lewat terbitan-terbitan berkala. seminar atau ceramah di mesjid-mesjid. Berbarengan dengan hal itu pula, beberapa kajian ilmiah pun muncul, baik memahami ataupun mengkritik pemikiran Nurcholish Madjid tersebut. Diantaranya adalah; Kamal Hassan (1987), Nahdroh (1999), Sufyanto (2001), Azis (1999), Malik dan Ibrahim (1998), dan Ridwan (2002). Namun, kajian-kajian tersebut memiliki banyak kelemahan, dan salah satunya bersifat ahistori. Diakui bahwa kajian yang ada tersebut lebih mengarahkan pada observasi substansial pemikiran Nurcholish Madjid, terutama menyangkut istilah-istilah yang dipak padahal spektrum pemikiran Nurcholish Madjid lebih luas dan istilah-istilah tersebut. Selain itu aspek sosio-kultural, politik dan relasifitas kesejarahannya sangat rendah dan lemah. Barangkali kajian Barton (1998) yang menjabarkan ha! i, namun tetap saja kajian dia lebih terfokus pada pemikiran Nurcholish Madjid dalam buku, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan.

Maka dan itu penelitian mi berusaha melakukan kajian sejarah kritis dan komprehensif terhadap pemikiran Nurcholisn Madjid, mulai dan tahun 1970-2004. Batasan akhir dan penelitian ini—tahun 2004—menjadi klimaks pemikiran Nurcholish Madjid dan seorang pemikir ke praktisi politik lewat pencalonan dirinya sebagai presiden dalam Konvensi Partai Golkar.

Untuk itu guna mengarahkan penulis, beberapa pertanyaan penting telah diajukan; Pertama, bagaimana latar belakang pendidikan dan sosial budaya Nurcholish Madjid? Kedua, mengapa pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam cenderung bersikap akomodatif terhadap Orde Baru? Ketiga, pemikiran keislaman seperti apa menurut Nurcholish Madjid yang dapat diterima oleh Orde Baru yang senantiasa curiga terhadap semua aktivitas politik tokoh Islam? Keempat, mengapa pemikiran Nurcholish Madjid lebih menekankan aspek etis dalam memberi bentuk filosofi politik Islam, tanpa menekankan aspek politik praktis? Kelima, tanggapan dan respon seperti apa yang didapat Nurcholish Madjid dalam masyarakat?

Dan hasil penelitian, sejarah pemikiran Nurcholish Madjid dalam kurun yang ditentukan tersebut tak bisa dilepaskan dan kerangka utama hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Sejak awal Nurcholish Madjid berkeyakinan bahwa kaum Muslim Indonesia perlu merevisi hubungan agama (Islam) dan negara (politik). Perevisian tersebut berdasar pada penekanan aspek etis dan moral Islam, seperti nilai universal Islam, sikap inklusif dalam beragama, pemikiran Islam sebagai agama peradaban dan kemanusiaan. Aspek etis inilah menurut Nurcholish Madjid bisa menjadi ragi bagi pengisian prinsip-prinsip keindonesiaan, demokrasi, keadilan sosial dan Pancasila sebagai dasar negara.

Menurut Nurcholish Madjid, Islam diturunkan untuk semua manusia. Ada perbedaan mendasar antara Islam (dengan huruf "i" besar) dan al islam (dengan huruf "i" kecil). Islam dengan huruf "i" besar memiliki formulasi sosial yang merujuk pada orangorang yang memeluk suatu agama dan dinamakan agama Islam". Sedangkan al islam (dengan 'i" kecil) memiliki definisi yang lebih dinamis sebagai sikap penyerahan din kepada Tuhan dan bersifat untuk semua manusia. Antara menjadi muslim (dengan "m" kecil) dan Muslim (dengan "m" besar) dalam manifestasi bentuk kepasrahan kepada Allah itu juga dapat dibedakan. Nurcholish Madjid menerangkan, bahwa seorang Muslim (dengan 'm" besar) memiliki makna lahiriah lewat syarat-syarat sebagai anggota masyarakat atau kelompok orang-orang yang mengaku memeluk agama Islam. Sementara seorang muslim ("m" kecil) adalah seorang yang benar-benar al islam, yakni penyerahan din sepenuhnya kepada Allah.

Selain dan itu, sejarah pemikiran Nurcholish Madjid tidak dapat dipisahkan dan dua hal. Pertama, adanya pengaruh dominan dan lingkungan rumah dan keluarga besar K.H. Abdul Madjid dan Fathonah. Kedua, dalam beberapa hal tertentu seperti gerakan pembaruan Islam yang digagas Nurcholish Madjid sesungguhnya telah ada yang merintis. Untuk kawasan Indonesia dikenal gerakan pembaruan kaum modernis Muhammadiyah yang mulai mengalami fase transisi ke arab neo-modernisme Islam di awal-awal Orde Baru yang kembangkan oleh Harun Nasution dan Mukti Au lewat Limited Group di Yogyakarta sekitar tahun 1967-1971. Harun Nasution dan Mukti Ali dalam ha! mi dapat dikatakan perintis pemikiran Nurcholish Madjid. Selain itu nama Mohammad Natsir dan Hamka merupakan tokoh-tokoh Masyumi yang ikut memberi arti bagi pemikiran Nurcholish Madjid.

TUJUH BUKU MEMOAR TENTANG PULAU BURU

Dr. Zeffry Alkatiri

Otobiografi atau juga memoar merupakan sumber rujukan untuk penulisan sejarah. Telah banyak diterbitkan di Indonesia berbagai memoar dari berbagai tokoh dengan berbagai pengalaman hidupnya. Sejak tahun 1989 sampai akhir tahun 2006 ini tercatat telah diterbitkan oleh beberapa penerbit, tujuh buku memoar berkaitan dengan pemukiman tapol PKI yang ada di Pulau Buru. Pemerintah Orde Baru secara bertahap telah memulangkan eks Tapol Pulau Buru ke tempatnya masing-masing tahun 1977-1979. Dari ribuan eks Tapol itu tercatat baru 6 orang yang membuat memoar tentang kehidupan mereka selama diasingkan di Pulau itu. Enam orang dengan latar belakang profesi yang berbeda itu menuliskan memoar mereka dengan kecendrungannya bahasa dan arah masing-masing. Makalah ini akan memperlihatkan hubungan teks dan konteks mengapa buku tersebut diterbitkan. Selain itu juga akan memperlihatkan perbedaan dalam cara pengungkapan memoar dari masing-masing penulisnya. Makalah ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya memoar yang dapat juga dijadikan sumber rujukan dalam melihat perkembangan sejarah Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Memoar, Tapol, dan Pulau Buru

KOTA BUKITTINGGI DAN KAITANNYA DENGAN PEMILIKAN TANAH 1945-1980

Zul Asri

Bukittinggi merupakan sebuah kota yang terletak di ranah Minang, daerah pedalaman Sumatra Barat. Kota im berdiri pada masa pemerintahan kolomal Belanda, yang bermula dan pendinan sebuah benteng (Fort de Kock) di atas tanah penduduk Nagan Kurai Limo Jorong atas kesepakatan para elitnya dengan Belanda, akibat konflik antara kaum Adat dan golongan Agama, yang salah satu di antaranya minta bantuan kepada Belanda. Berawal dan benteng de Kock tersebut pemerrntah kolomal mendirikan kota Bukittinggi untuk mendukung kepentingannya dalam rangka memperkuat kedudukannya di pedalaman Minangkabau. Semula wilayah yang dijadikan kota oleh pemenntah kolonial Belanda adalah wilayah yang masih belum didiami oleh penduduk ash Bukittmggi, sehmgga dapat lebih leluasa mendinkan bangunan untuk perkantoran dan pasar serta pemukiman barn bagi pendatang. Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, kota mi pernah mengalami perluasan dan tidak ada permasalahan dengan penduduk setempat. Selanjutnya masa pendudukan Jepang, sebelas nagan di luar kota Bukittinggi dimasukkan menjadi wilayah kota, juga tidak ada konflik dengan penduduk setempat, karena kekuatan dan kekajaman tentara Jepang yang sangat ditakuti, di samping itu perluasan kota tidak banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

Namun setelah prokiamasi kemerdekaan Republik Indonesia, nagari-nagan yang dimasukkan ke dalam wilayah kota menolak masuk menjadi wilayah kota, kecuali Nagan Kurai Limo Jorong yang sebagian daii wilayahnya telah masuk ke dalam wilayah kota sejak masa pemenntahan kolonial Belanda. Setelah seluruh wilayah Nagari Kurai Limo Jorong secara definitif menjadi wilayah kota yang luasnya lebih kurang 25,5 Km2, barn muncul masalah dalarn pengembangan kota. Untuk mendapatkan lahan (areal) bagi pembangunan fasihitas umum, pemerintah mengalami kesulitan untuk mendapatkan tanah dan masyarakat, sehingga sebagian besar pembangunan hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pada tanah-tanah pernnggalan pemenntah kolonial Belanda dan peninggalan Pendudukan Jepang. Sementara itu sebagian terbesar wilayah tersebut merupakan areal terbangun. Hal itu sangat terasa setelah tahun 1970, karena pembangunan negara sejak itu semakin pesat, termasuk kota Bukittinggi. Persoalan mi tidak terlepas dan sistem pemihkan tanah secara umum di Mmangkabau, temiasuk kota Bukittinggi, bersifat kolektif dan komunal, yang mempunyai beberapa hak pemilikan atas tanah, sehingga kalau akan menggunakan tanah hak mihik masyarakat, persoalannya akan menjadi rumit, kecuali ada kesepakatan terlebih dahulu dan anggota kelompok suku (clan) melepas hak mihik mereka. Hal itupun tidak mungkin pula didapatkan sesual dengan kebutuhan pemenntah atau pihak lainnya, karena pemilikan tanah merupakan identitas sebagai penduduk ashi di Minangkabau. Kota Bukittinggi merupakan barometer dan kehidupan budaya (adat istiadat) Minangkabau pedahaman, termasuk masalah tanah, yang semestinya pada daerah perkotaan pemilikan tanah secara kolektif dan komunah tersebut menjadi sangat longgar, bahkan sudah mengalami perubahan menjadi milik mdividu, namun tidak demikian halnya pada kota Bukittinggi.

BENTUK SIKAP ANTIKEKERASAN

Dr. William Chang

Pembentukan sikap antikekerasan (terhadap diri, sesama, keluarga, lingkungan hidup/ekologi dan Tuhan) seharusnya menjadi program utama dalam perbaikan sosial bangsa kita. Belakangan ini tindak kekerasan berkembang subur di beberapa kawasan (Poso, Papua). Hanya, akar-akar kekerasan (a.l. kecenderungan jahat dalam diri manusia, persaingan tak sehat dan dendam-kesumat) perlu dikikis dengan arif dalam hidup bersama. Kearifan-kearifan lokal perlu digali dan dikembangkan dalam menyuburkan sikap antikekerasan.

Sikap ini dapat terwujud sekurang-kurangnya melalui dua jalur penting, yaitu pendidikan dan penegakan hukum. (1) Pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah) dan non-formal (masyarakat) mengenai konstruksi kultural pola pikir dan perilaku manusia tanpa kekerasan dalam menghadapi masalah-masalah konfliktual sosial. Benihbenih perdamaian disemaikan dalam hati nurani dan sel terkecil hidup sosial manusia; (2) Sedang dinantikan penegakan hukum positif dengan adil dan manusiawi. Menghadapi aktor tindak kekerasan dalam bidang apapun, penegak hukum (terutama polisi, jaksa, hakim) seharusnya berani menjatuhkan hukuman yang sungguh edukatif. Ketidakadilan si penegak hukum akan mengundang kekerasan dalam ajang pengadilan dan hidup kemasyarakatan. Acapkali masyarakat menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keadilan yang mereka tuntut. Ketidakadilan akan mendatangkan protes dan ketidaktenangan sosial. Akibatnya, prinsip keadilan perlu sungguh-sungguh diterapkan dalam dunia pengadilan.

Penegakan keadilan sosial ini mencakup semua bidang kehidupan sehingga anakanak bangsa sungguh hidup dalam kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah. Kesejahteraan dalam artian luas (material, cognitive, spiritual, politik) akan menyuburkan benih-benih antikekerasan dalam pribadi manusia. Justru itu, keadaan hidup sosial, ekonomi, politik, religius dan kebudayaan yang sungguh adil akan membantu pembentukan sikap antikekerasan,sebab kekerasan mendatangkan dampak destruktif bagi pembangunan bangsa kita.

Sejarah mengingatkan, penanganan kompleksitas sosial dengan kekerasan bakal menimbulkan penyakit sosial baru. Sorotan antropologis mengenai sistem nilai damai dan kerja sama perlu diperteguh oleh keyakinan adikodrati mengenai pertanggungjawaban manusia di akhirat. Masalahnya, bagaimanakah proses globalisasi kekerasan dapat ditanggapi dengan *gerakan antikekerasan*?

Perpusta Jendera